

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K j)**

**UNIT KERJA BPKAD
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH**

Jalan. A. Syairani Pelaihari Telp. (0512) 21274

RINGKASAN EKSEKUTIF

Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia- Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan sebuah laporan yang memuat penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Rencana Strategik (Renstra).

Untuk meningkatkan mutu penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran berikutnya, senantiasa diharapkan saran dan kritik yang membangun serta partisipasi dari semua pihak dalam rangka mendapatkan informasi penilaian kinerja yang akurat dan lebih baik lagi.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 ini, kami mengucapkan terima kasih.

Pelaihari, Januari 2021

Kepala BPKAD
Kabupaten Tanah Laut,



Muhammad Darmin, S.IP, M.Si
NIP.196612271987031002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
RINGKASAN EKSEKUTIF	
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi	3
C. Isu Strategis.....	8
D. Produk dan Layanan	10
E. Sistematika Penyajian.....	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA.....	16
A. Visi RPJMD.....	16
B. Misi RPJMD.....	17
C. Tujuan dan Sasaran Strategis	17
D. Indikator Kinerja Utama.....	32
E. Perjanjian Kinerja.....	33
F. Program dan Kegiatan.....	43
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	45
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi.....	46
1. SasaranRPJMD.....	49
2. Analisa Capaian Sasaran Strategis SKPD.....	51
3. Eselon II (Kepala Badan).....	51
2.1.1. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 1.....	53
2.1.2. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 2.....	59
4. Eselon III.B (Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan)	61
2.1.3. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 3.....	61
4.1). Eselon IV.A1 (Kasubbid Anggaran).....	63

2.1.4. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 4.....	74
4.2). Eselon IV.A1 (Kasubbid Perbendaharaan & Verifikasi).....	75
4.3) Eselon IV.A1 (Kasubbid Pembiayaan).....	81
5. Eselon III.B (Kepala Bidang Akuntansi).....	89
2.1.5. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 5.....	89
5.1). Eselon IV.A1 (Kasubbid Pengelolaan Kas).....	90
5.2). Eselon IV.A1 (Kasubbid Akuntansi Pendapatan & Piutang).....	100
5.3). Eselon IV.A1 (Kasubbid Akuntansi Belanja dan Beban).....	113
6. Eselon III.B (Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian).....	123
2.1.6. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 6.....	123
6.1). Eselon IV.A1 (Kasubbid Pengamanan dan Pemeliharaan).....	125
2.1.7. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 7.....	138
6.2). Eselon IV.A1 (Kasubbid Perencanaan Kebutuhan).....	139
2.1.8. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 8.....	149
6.3). Eselon IV.A1 (Kasubbid Pemanfaatan dan Penggunaan).....	150
7. Eselon III.B (Kepala Bidang Penatausahaan Aset)	172
2.1.9. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 9.....	172
7.1). Eselon IV.A1 (Kasubbid Inventarisasi).....	172
2.1.10. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 10.....	181
7.2). Eselon IV.A1 (Kasubbid Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan).....	182
8. Eselon III.A (Sekretaris).....	207
2.1.11. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 11.....	207
2.1.12. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 12.....	208
8.1). Eselon IV.A1 (Kasubbag Umum dan Kepegawaian).....	209

2.1.13. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 13.....	236
8.2). Eselon IV.A1 (Kasubbag Perencanaan).....	237
2.1.14. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 14.....	245
8.3). Eselon IV.A1 (Kasubbag Keuangan).....	245
2.1.15. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 15.....	250
8.2). Eselon IV.A1 (Kasubbag Perencanaan).....	251
B. Akuntabilitas Keuangan.....	251
1. Anggaran dan Realisasi APBD 2020.....	252
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program.....	255
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan 2020.....	269
BAB IV PENUTUP.....	284
A. Kesimpulan.....	284
B. Strategi Peningkatan Kinerja	308

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pernyataan Hasil Reviu

Lampiran 2 Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 bertanda tangan

Lampiran 3 Cascading (Pohon Kinerja)

Lampiran 4 Matrik Keselarasan Tahun 2020

Lampiran 5 Capaian Kinerja Per Triwulan Tahun 2020

Lampiran 6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018-2020

Lampiran 7 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2017-2020

Lampiran 8 IKU 2019

Lampiran 9 SOP LAKIP

Lampiran 10 SK Tim Penyusun LAKIP SKPD Tahun 2020

Lampiran 11 Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Kinerja Per Triwulan Tahun 2020

Lampiran 12 Rencana Aksi Per Triwulan Tahun 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut salah satu perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, BPKAD Kabupaten Tanah Laut berwenang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP menyebutkan bahwa Kepala SKPD menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) kepada Bupati atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang dialokasikan dan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKj) merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Pelaksanaannya juga telah diatur dengan Keputusan Kepala LAN No.589/IX/6/4/1999 tentang LAKIP, yang diubah dengan Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut tahun 2020, disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan

pencapaian kinerja sebagaimana disepakati dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 serta dalam mencapai misi tujuan organisasi. Dalam menyusun LKj BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 antara lain didasarkan atas :

1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 55 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Dalam LKj hal-hal yang dimuat tentunya meliputi Penilaian kinerja yang menyangkut baik segi-segi kuantitas dan kualitas dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik, motivasi para birokrat pelaksana, melakukan penyesuaian budget, mendorong SKPD agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani, dan menuntun perbaikan dalam memberikan pelayanan publik. Dari

pemahaman seperti itu dapat dirinci dalam butir-butir penting untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah antara lain yaitu :

- Seberapa jauh efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.
- Seberapa jauh kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain apakah terjadi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Seberapa banyak (kuantitas) dan bagaimana mutu (kualitas) penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat.
- Bagaimana dengan ketepatan lokasi serta waktu pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintah dan pembangunan.

B. STRUKTUR ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI

Dasar hukum pembentukan SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selain menyelenggarakan fungsi-fungsi di atas, sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 5 ayat (1) Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintahan Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selanjutnya pada ayat (3) kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :

1. Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD.
2. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Atas dasar ketentuan itu, maka BPKAD selain menjalankan tugas-tugas dan fungsinya selaku SKPD, juga melaksanakan tugas dan fungsi selaku SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Adapun tugas Kepala SKPKD selaku PPKD sesuai Pasal 7 Permendagri No. 13 Tahun 2006 adalah :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD.
3. Melaksanakan fungsi BUD.
4. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
5. Melaksanakan tugas lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Kepala Daerah.

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :

1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
2. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SOPD.
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah.
6. Menetapkan SPD.
7. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
8. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
9. Menyajikan informasi keuangan daerah.
10. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD selaku Kuasa BUD. PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dalam Pasal 8 Permendagri no. 13 Tahun 2006, Kuasa BUD mempunyai tugas :

1. Menyiapkan anggaran kas.
2. Menyiapkan SPD.
3. Menerbitkan SP2D.
4. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.
5. Memantau pelaksanaan pengeluaran APBD oleh Bank dan / atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk.
6. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD.
7. Menyimpan uang daerah.
8. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola / menatausahakan investasi daerah.
9. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.

10. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
11. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
12. Melakukan penagihan piutang daerah.

Selanjutnya sesuai Pasal 9 Permendagri No.13 Tahun 2006, PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas :

1. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
3. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah.
4. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
5. Menyajikan informasi keuangan daerah.
6. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

b. Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perencanaan;
- 2) Sub Bagian Keuangan; dan
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Belanja dan Pembiayaan, terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Anggaran;
- 2) Sub Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi; dan
- 3) Sub Bidang Pembiayaan.

d. Bidang Akuntansi, terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Piutang;

- 2) Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Beban; dan
 - 3) Sub Bidang Akuntansi Pengelolaan Kas.
- e. Bidang Penatausahaan Aset, terdiri dari:
- 1) Sub Bidang Inventarisasi;
 - 2) Sub Bidang Pemindah tangan Pemusnahan dan Penghapusan.
- f. Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset, terdiri dari:
- 1) Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan;
 - 2) Sub Bidang Pemanfaatan dan Penggunaan; dan
 - 3) Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan.
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya sesuai dengan struktur organisasi yang ada pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut terdapat tingkat eselonering sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Eselon II B
- b. Sekretaris Eselon III A
- c. Kepala Bidang (ada 4 Bidang) Eselon III B
- d. Para Kepala Sub Bagian (di bawah Sekretaris ada 3) Eselon IVA
- e. Para Kepala Sub Bidang(di bawah Kepala Bidang ada 11) Eselon IVA.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi,BPKAD Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2020 memiliki PNS berjumlah 46 orang yang dapat dibedakan berdasarkan tingkat pendidikan,golongan, jabatan struktural dan staf yang terdiri dari:

- a) Berdasarkan tingkat pendidikan, terdiri dari :
- S-2 : 3 orang
 - S-1 : 20 orang
 - D-III : 16 orang

- D- II : 0 orang
- SLTA : 7 orang
- SLTP : 0 orang
- SD : 0 orang

b) Berdasarkan Golongan, terdiri dari :

- IV/c : 1 orang
- IV/b : 1 orang
- IV/a : 2 orang
- III/d : 7 orang
- III/c : 5 orang
- III/b : 6 orang
- III/a : 10 orang
- II/d : 11 orang
- II/c : 3 orang
- II/b : 0 orang
- II/a : 0 orang
- I/d : 0 orang

c) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Staf, terdiri dari :

- Eselon II : 1 orang
- Eselon III : 4 orang
- Eselon IV : 13 orang
- Staf : 22 orang
- Staf Fungsional : 6 orang

C. ISU STRATEGIS

Berdasarkan analisis Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal (SWOT) dapat ditetapkan dan dirumuskan yang menjadi isu-isu strategis pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan tugas dan fungsinya yang harus mendapat prioritas dan penanganan secara sungguh-sungguh selama kurun waktu 2018-2023 adalah sebagai berikut :

a). Peningkatan pengelolaan keuangan daerah

Peningkatan pengelolaan keuangan sangatlah vital, dimulai dari proses penyusunan anggaran, pelaksanaan belanja, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Proses penyusunan anggaran haruslah secermat mungkin, karena apabila salah pada tahap penganggaran, sudah tentu akan semakin bertambah salah pada waktu pelaksanaan belanja, sehingga akan menyulitkan pada waktu penatausahaan dan akan diragukan akuntabilitasnya saat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, melalui perencanaan penganggaran yang tepat, akurat, wajar, memenuhi aspek kepatutan, efisien dan efektif, taat pada peraturan perundang-undangan, maka akan membawa manfaat yang sangat besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Begitu juga dengan pelaksanaan belanja yang benar, akuntabel dan dikelola dengan baik tentunya akan memberikan nilai positif bagi pemerintah daerah dan akan mendapatkan Opini yang optimal bagi pengelolaan keuangan daerah yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang setiap tahunnya dilakukan audit oleh BPK RI.

b). Kelengkapan penyajian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, merupakan isu-isu yang tidak bisa dikesampingkan, karena begitu penting dan sangat menentukan, tidak saja bagi kredibilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, tetapi juga bagi nasib rakyat Tanah Laut. Proses penganggaran yang baik, kesesuaian pelaksanaan belanja, penatausahaan keuangan yang tertib, dan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel, bukan merupakan hasil akhir dalam pengelolaan keuangan daerah, karena apabila kelengkapan dalam penyajian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih banyak kekurangannya, maka penilaian atau opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI menjadi kurang/minus pula. Dalam penyajian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah haruslah mengikuti kaidah-kaidah dan aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Tentunya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dibuat dan disampaikan setiap tahun mengharapkan mendapat opini yang terbaik, karena hal ini sebagai bentuk cerminan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

c). Peningkatan pengelolaan aset daerah.

Aspek lain yang menjadi isu penting bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD adalah berkaitan dengan peningkatan pengelolaan aset daerah. Disadari bahwa untuk pengelolaan aset daerah dahulu-dahulunya terpinggirkan, namun sekarang ini menjadi hal yang sangat penting dan vital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena bagaimana mungkin sebuah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat disusun dan disajikan dengan benar dan dapat diyakini kewajarannya kalau pengelolaan aset daerah yang disajikan tidak tertib dan meragukan. Oleh karena itu penataan aset daerah menjadi salah satu prioritas untuk segera dituntaskan dan terus dilakukan bagi tersajinya suatu Neraca SKPD dan Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang dapat diyakini kebenaran dan kewajarannya.

D. PRODUK DAN LAYANAN

Secara umum pencapaian kinerja pelayanan SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut selama 1 tahun terakhir cukup berhasil, tetapi bukan berarti sempurna, tentunya masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi, sehubungan dengan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Tanah Laut selain tugas dan fungsi selaku SKPD juga sebagai SKPKD (PPKD) dan BUD. Tidak mudah memang untuk mencapai apa-apa yang telah ditetapkan, karena dalam rangka pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renja SKPD yang juga adalah merupakan implementasi dalam rangka pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD. maka BPKAD Kabupaten Tanah Laut diharapkan mewujudkan Tujuan dan Sasaran SKPD yang telah ditetapkan tersebut seperti yang akan diuraikan pada bab-bab selanjutnya.

Sedangkan kondisi sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung produk dan pelayanan pada BPKAD untuk saat ini cukup memadai baik dari jumlah SDM aparatur dengan sarana dan prasarana lainnya yang dapat

menunjang kelancaran tugas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut.

Adapun sumber daya yang ada pada BPKAD Kab. Tanah Laut adalah berkaitan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki dan digunakan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini :

**Daftar Sarana dan Prasarana
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020**

No.	Jenis Barang	Jumlah Barang
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 persil
2	AC Split	38 buah
3	Alat Penghancur Kertas	2 buah
4	Bangku Tunggu	7 buah
5	Brand Kas	5 buah
6	Camera Electronic	2 buah
7	CCTV	19 buah
8	Digital multi Tester	1 buah
9	Dongkrak Hidrolik	1 buah
10	DVD-Rom Drive	2 buah
11	Filling Besi/Metal	28 buah
12	Genset	2 buah
13	Gordyn	6 buah
14	GPS	2 buah
15	Handycam	2 buah
16	Hard Disk	2 buah
17	Harddisk Eksternal	18 buah
18	Karpet	8 buah
19	Kipas Angin	8 buah
20	Kursi Besi/Metal	44 buah
21	Kursi Kerja	1 buah
22	Kursi Putar	30 buah
23	Kursi Rapat	65 buah
24	Kursi Tamu	2 buah

25	Laptop	26 buah
26	Lemari Besi	14 buah
27	Lemari Kaca	1 buah
28	Lemari kayu	13 buah
29	Meja Besi	1 buah
30	Meja Kayu	71 buah
31	Meja Komputer	2 buah
32	Meja Rapat	17 buah
33	Mesin Jilid	2 buah
34	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1 buah
	Mesin Pengering tangan	1 buah
35	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	2 buah
36	Mesin Pompa Air	2 buah
37	Mesin Potong Rumput	1 buah
38	Meteran Laser	1 buah
39	Microphone/Wireless Mic	2 buah
40	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	5 buah
41	Monitor	1 buah
42	Note Book	6 buah
43	P.C Unit/ Komputer PC	58 buah
44	Peralatan Jaringan Lain-lain	2 buah
45	Pick Up	3 buah
46	Printer	88 buah
47	Proyektor + Attachment	3 buah
48	Rak Besi/Metal	85 buah
49	Router	5 buah
50	Scanner	9 buah
51	Sepeda Motor	18 buah
52	Server	2 buah
53	Sofa	3 buah
54	Stabilizer/Stavolt	3 buah
56	Switch Hub	2 buah
57	Tangga	1 buah
58	Televisi	2 buah
59	Tong Sampah	2 buah
60	UPS	37 buah
61	White Board	3 buah
62	Wireless Access Point	7 buah

63	Wireless Portable (Sound System)	1 buah
64	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5 buah
65	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2 buah
66	Instalasi Listrik Gedung Kantor	1 buah
67	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1 buah
68	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	2 buah
69	Konstruksi Pagar	1 buah
70	Bangunan Nama Instansi/Unit Kerja	1 buah
71	Kanopi	1 buah
72	Bangunan Menara/Tower Air	1 buah
73	Halaman Gedung	2 buah
74	Bangunan Sarana/Prasarana Lainnya	1 buah
75	Bangunan Pembuangan Air Kotor Lain-lain	1 buah
76	Jaringan Distribusi Tegangan Di atas 20 KVA	1 buah
77	Hukum	1 buku
		820 buah

Terdapat keterkaitan antara jumlah SDM aparatur dengan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki sehingga dapat menunjang dan mendukung dalam rangka pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut khususnya dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah di Kabupaten Tanah Laut.

Dengan demikian Badan Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu SKPD yang melaksanakan kewenangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah tidak melaksanakan tugas tugas yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang sebagian besar telah ditetapkan dalam SPM oleh masing-masing Kementerian, namun demikian, dalam aspek pengelolaan keuangan dan aset dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi
- C. Isu Strategis
- D. Produk dan Layanan
- E. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Visi RPJMD
- B. Misi RPJMD
- C. Tujuan dan Sasaran Strategis
- D. Indikator Kinerja Utama
- E. Perjanjian Kinerja
- F. Program dan Kegiatan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi
 - 1. Sasaran RPJMD
 - 2. Eselon II (Kepala Dinas/Badan)
 - 3. Eselon III (Sekretaris/Kepala Bagian) A
 - 1). Eselon IV (Kasubbag /Kasubbid) A.1
 - 2). Eselon IV (Kasubbag/Kasubbid) A.2
 - 4. Eselon III (Kepala Bidang) B
 - 1). Eselon IV (Kasubbag/Kasubbid/Kasi) B.1
 - 2). Eselon IV (Kasubbag/Kasubbid/Kasi) B.2

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2020
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan 2020

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Lampiran 1 Pernyataan Hasil Reviu

Lampiran 2 Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 bertanda tangan

Lampiran 3 Cascading (Pohon Kinerja)

Lampiran 4 Matrik Keselarasan Tahun 2020

Lampiran 5 Capaian Kinerja Per Triwulan Tahun 2020

Lampiran 6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018-2020

Lampiran 7 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2017-2020

Lampiran 8 IKU 2019

Lampiran 9 SOP LAKIP

Lampiran 10 SK Tim Penyusun LAKIP SKPD Tahun 2020

Lampiran 11 Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Kinerja Per Triwulan Tahun 2020

Lampiran 12 Rencana Aksi Per Triwulan Tahun 2020

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. VISI RPJMD

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut, telah disusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2018–2023 dengan memperhitungkan potensi (kekuatan), peluang dan kelemahan serta ancaman (kendala) yang ada atau mungkin timbul.

Sesuai dengan Visi Pembangunan Tanah Laut 2018-2023 yaitu : **Terwujudnya Tanah Laut yang “BERINTERAKSI”** dimana dari visi itu diartikan sebagai berikut :

- a. **Berkarya;** Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
- b. **Inovatif;** Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
- c. **Tertata;** Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
- d. **Religius;** Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
- e. **Aktual;**
- f. **Sinergis;** Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. MISI RPJMD

Berdasarkan Visi tersebut di atas, kemudian dijabarkan ke dalam **5 Misi** sebagai berikut :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut yaitu mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan mendukung Misi ke- 2 dan Misi ke- 3 Kepala Daerah, dengan menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategi BPKAD Kabupaten Tanah Laut serta cara pencapaian tujuan dan Sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini, kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2020 yaitu bertepatan dengan tahun ke dua tahun Renstra akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2020 pada pembahasan selanjutnya.

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dan melihat latar belakang serta mencermati fenomena – fenomena yang berkembang, maka Tujuan Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023 adalah :

1. Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan secara tertib, akuntabel dan transparan.
2. Meningkatkan kinerja pengelolaan dan Penatausahaan aset Daerah secara tertib,
3. Terwujudnya tata kelola Administrasi yang tertib, efektif dan efisien.

Pernyataan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sepenuhnya mengacu pada Pernyataan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023. Hal ini dapat dipahami mengingat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan bagian integral atau unsur dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, sudah selayaknya tujuan yang dikemukakan sepenuhnya mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Pernyataan tujuan BPKAD Kabupaten Tanah Laut di atas, mengandung makna adanya tekad yang kuat untuk menjadikan BPKAD Kabupaten Tanah Laut handal dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, karena bukan pekerjaan mudah untuk mencapai akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Melalui tujuan tersebut diharapkan BPKAD Kabupaten Tanah Laut menjadi motor penggerak bagi SKPD-SKPD lainnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam mewujudkan apa yang menjadi visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Sesuai kerangka konsep akuntansi pemerintahan, akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Berdasarkan uraian itu maka pernyataan tujuan BPKAD Kabupaten Tanah Laut di atas dapat diartikan bahwa Pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan yang telah ditetapkan BPKAD Kabupaten Tanah Laut merupakan implementasi dari pernyataan organisasi yang akan dicapai dan dilaksanakan dari kurun waktu 1 (satu) tahun hingga 5 (lima) tahun sehingga memudahkan bagi Kepala Badan beserta jajarannya untuk mencapai kinerja yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.

Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan organisasi. Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan lebih lanjut ke dalam sasaran. Oleh karena itu sasaran haruslah terinci dan dapat diukur. Uraian dari tujuan dan sasaran jangka panjang yang akan di capai oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut sehubungan dengan visi dan misi yang ditetapkan. Konsep dasar strategi adalah memberdayakan kekuatan untuk mencapai suatu keadaan yang diinginkan, jadi merupakan cara atau langkah mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan progam/kegiatan. Berdasarkan tujuan dan sasaran BPKAD Kabupaten Tanah Laut, maka strategi dan kebijakan yang akan dilakukan periode 2018-2023.

Adapun sasaran startegi yang yang telah ditetapkan dan yang akan dicapai BPKAD Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah
3. Meningkatnya kualitas penganggaran keuangan sesuai ketentuan
4. Meningkatnya kualitas pemberian pelayanan kepada stakeholder dalam Penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan

5. Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemkab sesuai ketentuan
6. Meningkatnya kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan
7. Meningkatnya kualitas penyusunan RKBMD sesuai ketentuan
8. Meningkatnya kualitas pemanfaatan BMD sesuai ketentuan
9. Meningkatnya kualitas Inventarisasi BMD sesuai ketentuan
10. Meningkatnya kualitas Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan
11. Meningkatnya kualitas pemenuhan sarpras perkantoran
12. Meningkatnya pemberian pelayanan administrasi kepegawaian SKPD
13. Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja SKPD
14. Meningkatnya kualitas Laporan keuangan & Kinerja Keuangan SKPD
15. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Setelah ditetapkan Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan adalah disusunnya program dan kegiatan sebagai langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Visi. Program dan kegiatan yang disusun tentulah harus sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut, dalam rangka menjawab tantangan/permasalahan dan isu-isu strategis sebagaimana telah dirumuskan.

Renstra yang disusun oleh SKPD tentulah harus bersinergi dengan RPJMD nya, karena hal ini terkait dengan pencapaian visi, misi yang ada dalam RPJMD. Oleh karena itu penetapan indikator kinerja oleh SKPD dalam Renstra untuk lima tahun ke depan harus mendukung bagi pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Visi Kepala Daerah sebagaimana tersebut diatas agar bisa diwujudkan harus dituangkan dan dirinci ke dalam misi Kepala Daerah yang ditetapkan untuk BPKAD Kabupaten Tanah Laut harus menetapkan tujuan dan sasaran strategis sebagai gambaran aktivitas yang akan dilaksanakan. Untuk menggambarkan Visi, Misi, Kepala Daerah dan Tujuan, Sasaran Strategi dan

indikator-indikator beserta target-targetnya pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut sesuai Renstra BPKAD Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT																										
NO	VISI RPJMD	MISI RPJMD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA TUJUAN					SASARAN	INDIKATOR SASARAN/NIKU	TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					Ket									
					2019	2020	2021	2022	2023			2019	2020	2021	2022	2023										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)									
1	Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI	Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan secara tertib, akuntabel dan transparan.	Persentase ketepatan waktu dalam pengelolaan keuangan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	1. Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Meningkatkan kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah 3. Meningkatkan kualitas penganggaran keuangan sesuai ketentuan 4. Meningkatkan kualitas pemberian pelayanan kepada stakeholder dalam Penatausahaan 5. Meningkatkan kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemkab sesuai ketentuan	Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah Persentase SKPD yang menyampaikan perencanaan penganggaran sesuai ketentuan Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah Persentase pelaporan keuangan SKPD sesuai ketentuan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		Kepala Badan								
												BAIK(82)	BAIK(83)	BAIK(84)	BAIK(85)	BAIK(86)										
												100%	100%	100%	100%	100%		Kepala Bidang Belanja dan Pembelian								
												100%	100%	100%	100%	100%										
												100%	100%	100%	100%	100%		Kepala Bidang Akuntansi								
2			Meningkatkan kinerja pengelolaan dan Penatausahaan aset Daerah secara tertib.	Persentase peningkatan kualitas tertib penatausahaan dan pengelolaan aset daerah	100%	100%	100%	100%	100%	6. Meningkatkan kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan	Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai ketentuan	87%	89%	90%	92%	95%										
												100%	100%	100%	100%	100%		Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengendalian Aset								
												100%	100%	100%	100%	100%										
												100%	100%	100%	100%	100%										
												100%	100%	100%	100%	100%		Kepala Bidang Penatausahaan Aset								
												100%	100%	100%	100%	100%										
3	Menciptakan inovasi disegala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif	Terwujudnya tata kelola Administrasi yang tertib, efektif dan efisien	Terwujudnya tata kelola Administrasi yang tertib, efektif dan efisien	Persentase pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawalan, perencanaan dan keuangan yang tertib	100%	100%	100%	100%	100%	11. Meningkatkan kualitas pemenuhan sarpras perkantoran 12. Meningkatkan pemberian pelayanan administrasi kepegawalan SKPD 13. Meningkatkan perencanaan dan kinerja SKPD 14. Meningkatkan kualitas Laporan keuangan & Kinerja Keuangan SKPD 15. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persentase kinerja sarpras yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik Persentase pelayanan administrasi kepegawalan yg terpenuhi dan terpelihara dgn baik Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuan Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	66	67	68	69	70		Sekretaris

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Visi, Misi Kepala Daerah , tujuan, indikator tujuan,sasaran dan indikator sasaran beserta targetnya telah sesuai dengan dokumen Renstra SKPD yang telah ditetapkan, yang menjadi acuan pedoman yang dilaksanakan BPKAD Kabupaten Tanah Laut selama 5 (lima) tahun atau masa Renstra 2018-2023.

Untuk menggambarkan bahwa penyelarasan ini penting karena berkaitan dengan kesinambungan suatu perencanaan yang telah ditetapkan, dimana Renja SKPD adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra SKPD dan RPJMD yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Renstra SKPD maupun dalam RPJMD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel matrik keselarasan berikut ini :

**MATRIK KESELARASAN RENSTRA SKPD TAHUN 2020
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

VISI : Terwujudnya Tanah Laut yang “BERINTERAKSI”

Misi 2 : Menciptakan Inovasi disegala sendi kehidupan Masyarakat dan pengembangan Industri Kreatif

Misi 3 : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

Tujuan 1 : Meningkatkan kinerja Pengelolaan keuangan secara tertib, akuntabel & transparan

Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas penganggaran keuangan sesuai ketentuan

Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas pemberian pelayanan kpd stakeholder dlm Penatausahaan keu & pembiayaan daerah

Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemkab sesuai ketentuan

Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan

Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas penyusunan RKBMD sesuai ketentuan

Sasaran 8 : Meningkatnya kualitas pemanfaatan BMD sesuai ketentuan

Sasaran 9 : Meningkatnya kualitas Inventarisasi BMD sesuai ketentuan

Sasaran 10 : Meningkatnya kualitas Pemindahtanganan, Pemusnahan & Penghapusan BMD sesuai ketentuan

Sasaran 11 : Meningkatnya kualitas pemenuhan sarpras perkantoran

Sasaran 12 : Meningkatnya pemberian pelayanan administrasi kepegawaian SKPD

Sasaran 13 : Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja SKPD

Tujuan 2 : Meningkatkan kinerja pengelolaan dan penatausahaan aset daerah secara tertib

Tujuan 3 : Terwujudnya tata kelola administrasi yg tertib, efektif dan efisien

Sasaran 14 : Meningkatnya kualitas Keuangan SKPD

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN BERORIENTASI HASIL (Y/T)		IK SARGIS		IK SARGIS BERKUALITAS (Y/T)	IKU/ BUKAN IKU		INDIKATOR SASARAN PROGRAM		NO					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ya	1.Opini BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah	Ya	IKU											
2	Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah	Ya	2.Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Ya	IKU											
3.	Meningkatnya kualitas penganggaran keuangan sesuai ketentuan	Ya	3.Persentase SKPD yang menyampaikan perencanaan penganggaran sesuai ketentuan	Ya	BUKAN IKU	1.	Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	Ya	1	Penyusunan raperda dan raperbup tentang APBD dan Perubahan APBD	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Dokumen	Ya	646.520.000,00

4.	Meningkatnya kualitas pemberian pelayanan kepada stakeholder dalam Penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	Ya	4.Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	Ya	BUKAN IKU						2	Peningkatan Administrasi Penatausahaan Keuangan Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen penerbitan SP2D, Peraturan Bupati, SK. Bupati, SE. Bupati, SKPP, Laporan DAU Gaji, Taperum, IWP BPJS Kesehatan dan Laporan IWP Taspen, JKK, JKM Taspen serta Terlaksananya pembinaan terhadap penatausahaan keuangan	Ya	188.299.540,00	Te
											3	Peningkatan Administrasi Pembiayaan Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen administrasi Dana Hibah, Bantuan Sosial, Dana Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga serta Investasi Jangka Pendek dan Jangka Panjang	Ya	345.853.840,00	Te

5.	Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemkab sesuai ketentuan	Ya	5.Persentase pelaporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan	Ya	BUKAN IKU	2	Program peningkatan penerapan akuntansi dan pelaporan	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	Ya	4	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Dokumen LKPD yg akuntabel dan dapat diterima oleh Publik	Ya	218.639.800,00	T
														5	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, Laporan keuangan semesteran & Prognosis realisasi anggaran, serta lap keuangan akhir tahun	Seluruh SKPD menjadi e akuntansi pertanggung pelaksanaan Tahun 2020	
											6	Pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Seluruh SKPD yg menjadi entitas akuntansi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2020	Jumlah Dokumen SIKD berdasarkan akuntansi berbasis Akrual	Ya	238.149.700,00	T

											7	Pengelolaan akuntansi pendapatan dan piutang	Seluruh SKPD yg menjadi Entitas Akuntansi Pendapatan dan Piutang TA 2020	Jumlah dokumen	Ya	195.299.860,00	T
											8	Pengelolaan akuntansi belanja dan beban	Seluruh SKPD yg menjadi Entitas Akuntansi Belanja dan Beban TA 2020	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Prognosis	Ya	248.399.940,00	T
6.	Meningkatnya kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan	Ya	6.Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai ketentuan	Ya	BUKAN IKU	3	Program peningkatan pemanfaatan dan pengendalian Aset Daerah	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	Ya	9	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah penyelesaian penyertifikatan, Jumlah permohonan pembuatan BPKB duplikat, Jumlah pembuatan papan nama kepemilikan TMD, Jumlah pembuatan patok tanda batas TMD, Jumlah pelaksanaan rehab rumah dinas PPKD, Jumlah pemeliharaan kendaraan	Ya	1.204.605.000,00	T

			7.Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan		BUKAN IKU								dinas bermotor PPKD,Jumlah buku rekonsiliasi realisasi pemeliharaan BMD			
			8.Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan		BUKAN IKU											
7.	Meningkatnya kualitas penyusunan RKBMD sesuai ketentuan	Ya	9.Persentase RKBMD SKPD sesuai ketentuan		BUKAN IKU					10	Perencanaan dan pengadaan aset daerah,	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Dokumen Buku Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021,Jumlah Dokumen Laporan Triwulan Barang Persediaan, Jumlah Dokumen	Ya	177.607.000,00	T

													Laporan Stock Opname Tahun 2019, Jumlah Dokumen Peraturan Bupati				
8.	Meningkatnya kualitas pemanfaatan BMD sesuai ketentuan	Ya	10.Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan		BUKAN IKU						12	Pengelolaan pemanfaatan aset daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen rekonsiliasi pemanfaatan dan penggunaan BMD, Jumlah dokumen monitoring pemanfaatan dan monitoring penggunaan BMD, Jumlah dokumen pemanfaatan BMD, Jumlah dokumen penilaian BMD, Jumlah sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan BMD, Jumlah dokumen laporan hasil kegiatan	Ya	286.838.000,00	T

9.	Meningkatnya kualitas Inventarisasi BMD sesuai ketentuan		11.Persentase BMD yang dicatat dengan akurat		BUKAN IKU	4	Program Peningkatan Penertiban Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	Ya	13	Penyusunan tabulasi data aset tetap	40 SKPD Pengguna Barang Pemerintah Kab. Tanah Laut	Jumlah Dokumen Tabulasi Data Aset Tetap dan Pelaksanaan money BMD, dan Penilaian Aset untuk penyusunan Neraca Pemerintah Daerah	Ya	465.300.000,00	T
10.	Meningkatnya kualitas Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan		12.Persentase Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan		BUKAN IKU						14	Pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan aset daerah	40 SKPD Pengguna Barang Pemerintah Kab. Tanah Laut	Jumlah Dokumen pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan aset daerah	Ya	132.310.000,00	T

11.	Meningkatnya kualitas pemenuhan sarpras perkantoran	Ya	13.Persentase kinerja sarpras yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik	Ya	BUKAN IKU	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Baik	Ya	15	Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah jenis rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi	Ya	1.094.278.369,00	T
12	Meningkatnya pemberian pelayanan administrasi kepegawaian SKPD	Ya	14.Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yg terpenuhi dan terpelihara dgn baik	Ya	BUKAN IKU									16	Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran		Kantor
											17	Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Pegawai Tidak Tetap	Ya	439.356.000,00	T

						6	Program Pemenuhan , Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Nilai IKM	Baik	Ya	18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Jenis Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Ya	200.000.000,00	T
															19	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kantor B Tanah
											20	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Unit Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Ya	92.930.000,00	T

											21	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Teknis	Ya	25.000.000,00	T
											22	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Stel Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Ya	56.250.000,00	T
						7	Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD	Nilai IKM	Baik	Ya	23	Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Event Pameran	Ya	24.994.700,00	T
13	Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja SKPD	Ya	15.Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan	Ya	BUKAN IKU	8	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	Baik	Ya	24	Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Kinerja SKPD	Ya	3.996.200,00	T
14	Meningkatnya kualitas Laporan keuangan & Kinerja Keuangan SKPD	Ya	16.Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuan	Ya	BUKAN IKU									25	Penyusunan laporan keuangan	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	

15	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Ya	17.Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Ya	BUKAN IKU						26	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Dokumen evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD	Ya	4.492.000,00	T
	Jumlah total Anggaran														7.317.889.669,00		

Tabel matrik keselarasan dibuat untuk memudahkan bagi BPKAD Kabupaten Tanah Laut dalam menetapkan kinerja serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2020, sehingga terdapat keselarasan antara Renstra SKPD dengan Rencana Kerja Tahunan SKPD atau Perjanjian Kinerja SKPD, sehingga perencanaan dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut selaras dan berkesinambungan.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja BPKAD Kabupaten Tanah Laut perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :

TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD

No.	Kinerja Utama/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggungjawab / Sumber Data
1	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual	Bidang Akuntansi, Bidang Belanja dan Pembiayaan, Bidang Pemanfaatan & Pengendalian Aset, dan Bidang Penatausahaan Aset BPKAD Kabupaten Tanah Laut
2	Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Hasil Survey penilaian masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan asset daerah	Bagian Sekretariat BPKAD Kabupaten Tanah Laut

Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kabupaten Tanah Laut seperti tersaji pada tabel diatas merupakan dasar untuk dijadikan sebagai acuan dalam menyajikan laporan kinerja pada SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut setiap tahunnya.

Kinerja Utama/Tujuan/Sasaran Strategi BPKAD Nomor 1 yaitu meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan asset daerah adalah meliputi pengukuran peningkatan kinerja keuangan dan asset daerah dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kabupaten Tanah Laut yaitu Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Auditor kegiatannya berupa Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual dengan penanggungjawab Bidang Akuntansi, Bidang Belanja dan Pembiayaan, Bidang Pemanfaatan & Pengendalian Aset, dan Bidang Penatausahaan Aset BPKAD Kabupaten Tanah Laut. Sedangkan Kinerja Utama/Tujuan/Sasaran Strategi BPKAD Nomor 2 yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah adalah meliputi pengukuran Tingkat kepuasan terhadap pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah oleh masyarakat kegiatannya berupa Hasil Survey penilaian masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan asset daerah dengan penanggungjawab Bagian Sekretariat.

E. PERJANJIAN KINERJA SKPD TAHUN 2020

Perjanjian kinerja SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 didasarkan atas program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang APBD Tahun Anggaran 2020, dimana berdasarkan Dokumen pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD BPKAD Tahun Anggaran 2020 telah tergambar tolak ukur dan target kinerja yang akan dicapai untuk satu tahun anggaran.

Kinerja yang akan dicapai untuk satu tahun anggaran 2020 yang telah tergambar dalam DPA-SKPD BPKAD Tahun Anggaran 2020 itulah ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja SKPD BPKAD Tahun 2020. Untuk menggambarkan Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan beserta

target-targetnya serta keselarasan dengan Renstra SKPD dan juga sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut dapat disajikan sebagaimana tabel berikut dibawah ini:

**TABEL PERJANJIAN KENERJA TAHUN 2020
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	SARGIS	IK SARGIS	TARGET	PROGRAM			PROGRAM TERKAIT DENGAN SASARAN Y/T	NO	KEGIATAN			KEGIATAN TERKAIT DENGAN SASARAN Y/T)
				URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM			URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.Opini BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah	WTP									
2	Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah	2.Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	(83) BAIK									
3.	Meningkatnya kualitas penganggaran keuangan sesuai ketentuan	3.Persentase SKPD yang menyampaikan perencanaan penganggaran sesuai ketentuan	100%	Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	Ya	1	Penyusunan raperda dan raperbup tentang APBD dan Perubahan APBD	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Dokumen	Ya
4.	Meningkatnya kualitas	4.Persentase stakeholder	100%								2	Peningkatan

		<p>perbaikan pelayanan kepada stakeholder dalam Penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan</p>		<p>yang dilayani penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan</p>								<p>Administrasi Penatausahaan Keuangan Daerah</p>		Kabu
5.	<p>Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemkab sesuai ketentuan</p>	<p>5.Persentase pelaporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan</p>	<p>100%</p>	<p>Program peningkatan penerapan akuntansi dan pelaporan</p>	<p>Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p>	<p>WTP</p>	<p>Ya</p>	<p>3</p>	<p>Peningkatan Administrasi Pembiayaan Daerah</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Tanah</p>	<p>Jumlah dokumen administrasi Dana Hibah, Bantuan Sosial, Dana Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga serta Investasi Jangka Pendek dan Jangka Panjang</p>	<p>Ya</p>	<p>3</p>	
								<p>4</p>	<p>Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Tanah</p>	<p>Jumlah Dokumen LKPD yg akuntabel dan dapat diterima oleh Publik</p>	<p>Ya</p>	<p>2</p>	

								5	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, laporan keuangan semesteran & prognosis realisasi anggaran serta laporan keuangan akhir tahun	Seluruh SKPD yg menjadi entitas akuntansi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2020	Jumlah dokumen pengelolaan akuntansi belanja dan beban	Ya	
								6	Pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Seluruh SKPD yg menjadi entitas akuntansi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2020	Jumlah Dokumen SIKD berdasarkan akuntansi berbasis Akrual	Ya	2
								7	Pengelolaan akuntansi pendapatan dan piutang	Seluruh SKPD yg menjadi Entitas Akuntansi Pendapatan dan Piutang TA 2020	Jumlah dokumen	Ya	1

								8	Pengelolaan akuntansi belanja dan beban	Seluruh SKPD yg menjadi Entitas Akuntansi Belanja dan Beban TA 2020	Jumlah dokumen Laporan Keu Bulanan, Triwulanan dan Prognosis	Ya	2
6.	Meningkatnya kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan	6.Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai ketentuan	89%	Program peningkatan pemanfaatan dan pengendalian Aset Daerah	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	Ya	9	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	BMD Kab. Tanah Laut	Jumlah penyelesaian penyertifikatan, Jumlah permohonan pembuatan BPKB duplikat, Jumlah pembuatan papan nama kepemilikan TMD, Jumlah pembuatan patok tanda batas TMD, Jumlah pelaksanaan rehab rumah dinas PPKD, Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas bermotor PPKD, Jumlah buku rekonsiliasi realisasi pemeliharaan BMD	Ya	1.2
		7.Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan	100%										

		8.Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan	100%										
7.	Meningkatnya kualitas penyusunan RKBMD sesuai ketentuan	9.Persentase RKBMD SKPD sesuai ketentuan	100%					10	Perencanaan dan pengadaan aset daerah,	40 SKPD se Kabupaten Tanah laut	Jumlah Dokumen Buku Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021, Jumlah Dokumen Laporan Triwulan Barang Persediaan, Jumlah Dokumen Laporan Stock Opname Tahun 2019, Jumlah Dokumen Peraturan Bupati	Ya	1
8.	Meningkatnya kualitas pemanfaatan BMD sesuai ketentuan	10.Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan	100%					11	Pengelolaan pemanfaatan aset daerah	SKPD se Kabupaten Tanah Laut	Jumlah dokumen rekonsiliasi pemanfaatan dan penggunaan BMD, Jumlah dokumen monitoring pemanfaatan dan monitoring penggunaan BMD, Jumlah dokumen pemanfaatan BMD, Jumlah dokumen penilaian BMD, Jumlah sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan BMD, Jumlah dokumen laporan hasil kegiatan	Ya	2
9.	Meningkatnya kualitas	11.Persentase BMD yang	100%	Program	Opini BPK RI	WTP	Ya	12	Penyusunan tabulasi	Peng			

	Inventarisasi BMD sesuai ketentuan	dicatat dengan akurat		Peningkatan Penertiban Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah	terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah							data aset tetap	Pem
10.	Meningkatnya kualitas Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	12.Persentase Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	100%					13	Pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan aset daerah	Pengelola Barang Pemerintah Kab. Tanah Laut	Terlaksananya Pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan aset daerah	Ya	1
11	Meningkatnya kualitas pemenuhan sarpras perkantoran	13.Persentase kinerja sarpras yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik	100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Baik	Ya	14	Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah jenis rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi	Ya	1.0
12	Meningkatnya pemberian pelayanan administrasi kepegawaian SKPD	14.Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yg terpenuhi dan terpelihara dgn baik	100%					15	Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Jenis Jasa, Bahan, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Ya	7

								16	Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Pegawai Tidak Tetap	Ya	4
				Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Nilai IKM	Baik	Ya	17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Jenis Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Ya	2
								18	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Jenis Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Ya	2
								19	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Unit Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Ya	
								20	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Teknis	Ya	

								21	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Stel Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Ya	
				Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD	Nilai IKM	Baik	Ya	22	Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Event Pameran	Ya	
13	Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja SKPD	15.Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan	100%	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	Baik	Ya	23	Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Kinerja SKPD	Ya	
14	Meningkatnya kualitas Laporan keuangan & Kinerja Keuangan SKPD	16.Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuan	100%					24	Penyusunan laporan keuangan	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	Ya	
15	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	17.Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	67 (BAIK)					25	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Dokumen evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD	Ya	
	Jumlah total Anggaran											7.317.889.669,00	

Matrik perjanjian kinerja tahun 2020 seperti tergambar diatas telah sesuai dan telah tersaji pada dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Pejabat Struktural dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan pada awal tahun sebelum pelaksanaan DPA dan setelah PERDA APBD Tahun 2020 ditetapkan. Sehingga terdapat kesesuaian antara matrik perjanjian kinerja secara keseluruhan dengan dokumen perjanjian kinerja seluruh Pejabat Struktural dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 dengan disesuaikan dengan target sasaran strategis yang telah disajikan pada dokumen Renstra SKPD.

F. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mencapai sasaran strategis dan target yang ditetapkan dalam Perjanjian/Penetapan kinerja Tahun 2020, melaksanakan 8 Program dan 25 Kegiatan dengan rincian adalah sebagai berikut :

A. Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan:

- 1). Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Perubahan APBD.
- 2). Peningkatan Administrasi Penatausahaan Keuangan Daerah
- 3). Peningkatan Administari Pembiayaan Daerah

B. Program peningkatan penerapan akuntansi dan pelaporan dengan kegiatan:

- 1). Pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah
- 2). Pengelolaan akuntansi pendapatan dan piutang
- 3). Pengelolaan akuntansi belanja dan beban
- 4). Penyusunan Raperda dan Raperbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

- 5). Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD, Laporan Keuangan semesteran dan Prognosis realisasi anggaran, serta laporan keuangan akhir tahun.

C. Program peningkatan pemanfaatan dan pengendalian Aset Daerah dengan kegiatan:

- 1). Peningkatan manajemen asset/barang daerah
- 2). Perencanaan dan pengadaan aset daerah
- 3). Pengelolaan pemanfaatan aset daerah

D. Program Peningkatan Penertiban Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah dengan kegiatan:

- 1). Penyusunan tabulasi data aset tetap
- 2). Pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan aset daerah

E. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan:

- 1). Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi
- 2). Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran
- 3). Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD

F. Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan kegiatan:

- 1). Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
- 2). Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
- 3). Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
- 4). Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur
- 5). Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

G. Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD

- 1). Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan

H. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD

- 1). Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD
- 2). Penyusunan laporan keuangan
- 3). Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2020 BPKAD Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2020 ini merupakan laporan kinerja tahun kedua RPJMD 2018-2023 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

A. AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Instruksi Presiden RI No.7 Th 1999 tentang AKIP). Sesuai kerangka konsep akuntansi pemerintahan, akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Berdasarkan uraian itu maka pernyataan tujuan BPKAD Kabupaten Tanah Laut di atas dapat diartikan bahwa Pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah dilaksanakan secara akuntabel, tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab.

Untuk menggambarkan kinerja sasaran strategis target dan realisasinya di lingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut dari Eselon II sampai dengan Eselon IV selama kurun waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL PERBANUNGAN SASAKAN 3 IKAI EGIS SESUAI KENSI KA BEKUASAKAN I AKUE I DAN REALISASI I AHUN 2019, 2019 DAN I AHUN 2020
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NO	VISI RPJMD	MSI RPJMD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN 2018	REALISASI TUJUAN 2018	TARGET TUJUAN 2019	REALISASI TUJUAN 2019	TARGET TUJUAN 2020	REALISASI TUJUAN 2020	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN 2018	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020
1	Terwujudnya Tanah Laut yang BERTERAKSI	1.Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan secara terb, akuratabel dan transparan.	Persentase ketepatan waktu dalam pengelolaan keuangan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1. Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%
											2. Meningkatkan kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah	2. Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Nilai Indek	82	87	106,10%	82	90	109,76%	83	93	112,05%
											3. Meningkatkan kualitas penganggaran keuangan sesuai ketentuan	3. Persentase SKPD yang menyampaikan perencanaan penganggaran sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
											4. Meningkatkan kualitas pemberian pelayanan kepada stakeholder dalam Penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	4. Persentase stakeholder yang diayai penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
											5. Meningkatkan kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemkab sesuai ketentuan	5. Persentase pelaporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
			Meningkatkan kinerja pengelolaan dan Penatausahaan aset Daerah secara terb.	Persentase kinerja pengelolaan dan Penatausahaan aset daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6. Meningkatkan kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan	6. Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai ketentuan	%	100	100	100%	87	100	114,95%	89	30	33,70%
											7. Meningkatkan kualitas pengelolaan BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan	7. Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	0%
											8. Meningkatkan kualitas pengelolaan BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan	8. Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	150	150%
											9. Meningkatkan kualitas penyusunan RKBMD sesuai ketentuan	9. Persentase RKBMD SKPD sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
											10. Meningkatkan kualitas pemanfaatan BMD sesuai ketentuan	10. Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
											11. Meningkatkan kualitas inventarisasi BMD sesuai ketentuan	11. Persentase BMD yang dicatat dengan akurat	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
											12. Meningkatkan kualitas Pemindahgangan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	12. Persentase Pemindahgangan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	108,80	108,80%	100	2700	2700%
		2. Menciptakan inovasi sebagai sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif	Terwujudnya tata kelola Administrasi yang terb, efektif dan efisien	Persentase pengelolaan administrasi perkaratoran, kepegawain, perencanaan dan keuangan yang terb	100%	100%	100%	100%	100%	100%	11. Meningkatkan kualitas pemenuhan saipras perkaratoran	13. Persentase kinerja saipras yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
											12. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawain yg terpenuhi dan dipelihara dgn baik	14. Persentase pelayanan administrasi kepegawain yg terpenuhi dan dipelihara dgn baik	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
											13. Meningkatkan kualitas perencanaan dan kinerja SKPD	15. Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
											14. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan & Kinerja Keuangan SKPD	16. Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
											15. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	17. Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai	64,15	64,74	100,92%	66	74,98	113,61%	67	88,43	131,99%

**TABEL PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018 , 2019 DAN 2020
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN %	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN %	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN %
1	Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan secara tertib, akuntabel dan transparan.	1. Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah	2 Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Nilai Indek	82	87	106,10%	82	90	109,76%	83	93	112,05%
		3. Meningkatnya kualitas penganggaran keuangan sesuai ketentuan	3 Persentase SKPD yang menyampaikan perencanaan penganggaran sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
		4. Meningkatnya kualitas pemberian pelayanan kepada stakeholder dalam Penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	4 Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
		5. Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemkab sesuai ketentuan	5 Persentase pelaporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
2	Meningkatkan kinerja pengelolaan dan Penatausahaan aset Daerah secara tertib.	6. Meningkatnya kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan	6 Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai ketentuan	%	100	100	100%	87	100	114,95%	89	30	33,70%
			7 Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	0	0%
			8 Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	150	150%
		7. Meningkatnya kualitas penyusunan RKBMD sesuai ketentuan	9 Persentase RKBMD SKPD sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
		8. Meningkatnya kualitas pemanfaatan BMD sesuai ketentuan	10 Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
		9. Meningkatnya kualitas Inventarisasi BMD sesuai ketentuan	11 Persentase BMD yang dicatat dengan akurat	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
		10. Meningkatnya kualitas Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	12 Persentase Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	108,80	108,80%	100	2700	2700%
3	Terwujudnya tata kelola Administrasi yang tertib, efektif dan efisien	11. Meningkatnya kualitas pemenuhan sarpras perkantoran	13 Persentase kinerja sarpras yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
		12. Meningkatnya pemberian pelayanan administrasi kepegawaian SKPD	14 Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yg terpenuhi dan terpelihara dgn baik	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
		13. Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja SKPD	15 Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
		14. Meningkatnya kualitas Laporan keuangan & Kinerja Keuangan SKPD	16 Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
		15. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	17 Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai	64.15	64.74	100,92%	66	74,98	113,61%	67	88,43	131,99%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 15 Sasaran Strategis dan 17 indikator sasaran yang telah ditargetkan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, rata-rata telah tercapai seluruhnya 100% dan terdapat 4 indikator sasaran yang realisasinya melebihi target, namun pada tahun 2020 ada 2 indikator yang realisasinya mengalami penurunan dari target.

Selain itu juga disajikan rincian 15 sasaran strategis dan 17 Indikator sasaran sesuai target dan realisasi pencapaian per sasaran strategis serta perbandingan tersebut dapat dilihat baik peningkatan maupun penurunan dalam realisasi pencapaian per sasaran BPKAD Kabupaten Tanah Laut dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

Untuk menggambarkan analisa pencapaian per sasaran strategis pada pada tabel yang disajikan diatas dapat diuraikan pada sub bab berikutnya, agar dapat memberikan informasi pencapaian selama 1 (satu) tahun dan bagaimana trend yang terjadi pada setiap tahun selama Tahun Renstra 2018-2023.

1. SASARAN RPJMD

Mencermati Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Tanah Laut, jika dihubungkan dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut melaksanakan yaitu : 1). Misi yang ke 2 (dua) yaitu Menciptakan inovasi disegala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif , misi ke 2 ini pada BPKAD dimaksudkan dalam rangka mendukung kegiatan Pameran Pembangunan yang dilaksanakan setiap memperingati Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut. Namun Misi ke 2 ini tidak menjadi indikator sasaran pada RPJMD hanya dicantumkan pada Pohon Kinerja BPKAD dan yang melaksanakannya adalah Bagian Sekretariat. 2). Misi ke 3 (tiga) yaitu Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), dan uraian tentang Visi Tertata : Pelaksanaan pemerintahan yang bisa dipertanggungjawabkan kepada pemegang mandat tertinggi yaitu masyarakat. Termasuk didalamnya adalah penilaian terhadap tata kelola keuangan yang harus

tetap mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan Misi ke 3 Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), yang harus dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut.

Untuk menggambarkan keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra SKPD selama kurun waktu 5 (lima) Tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel Sasaran RPJMD Misi 3 Kabupaten Tanah Laut yang menjadi tanggungjawab Kantor BPKAD Kabupaten Tanah Laut

No	SASARAN RPJMD (IKU)	INDIKATOR SASARAN	Satuan	RPJMD					RENCANA STRATEGIS											KETERANGAN (CATATAN)
				TARGET					TARGET					REALISASI						
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	33	
MISI 3 : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)																				
Tujuan 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi																				
I		Indeks Reformasi Birokrasi		6,0	6.1	6.2	6.3	6.4		6.1										
1.	Sasaran 1.1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori)		B (68,00)	BB (71)	BB (74)	BB (77)	A (81)		BB (71)										
		Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		WTP				WTP	WTP					
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kesesuaian antara pagu RPJMD dan RKPD		100%	90%	85%	80%	80%		90%				100						
	Program Pembinaan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama Antar Pemerintahan	LPPD (skor)		3,000 (sangat tinggi)	3,025 (sangat tinggi)	3,05(sangat tinggi)	3,075(sangat tinggi)	3,1 (sangat tinggi)	3,06	3,025 (sangat tinggi)										
	Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP				WTP	WTP					

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran RPJMD sesuai target yang telah ditentukan selama kurun waktu 5 (lima tahun) yaitu Misi Ke 3 : Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) dengan Tujuan :

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi dengan Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator sasaran RPJMD yaitu Opini Pengawasan Eksternal (BPK) terhadap kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan hasil sebagai berikut untuk tahun ke 1 yaitu tahun 2019 telah tercapai 100%, kemudian pada tahun ke 2 yaitu tahun 2020 juga telah tercapai 100% yaitu selama kurun waktu RPJMD tahun ke 1 dan tahun ke 2 RPJMD telah mencapai targetnya yaitu mempertahankan Opini WTP. Sedangkan Misi yang ke 2 yaitu Menciptakan inovasi disegala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif, pada BPKAD dimaksudkan dalam rangka mendukung kegiatan Pameran Pembangunan yang dilaksanakan setiap memperingati Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut, namun pada Tahun 2020 kegiatan pameran Pembangunan ditiadakan akibat masih adanya Pandemi Covid 19 yang belum berakhir, sehingga tidak dapat dilaksanakan dengan capaian kinerja 0%.

2. ANALISA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS SKPD

Untuk menggambarkan tabel realisasi capaian sasaran strategis beserta analisa capaiannya yaitu berjumlah 15 Sasaran Strategis dengan 17 indikator sasaran dapat dijelaskan per indikator sasaran strategis dengan target dan realisasinya serta dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dalam pembahasan ini akan dibandingkan selama 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2018,2019 dan 2020 sehingga tergambar capaian kinerja per sasaran serta penanggungjawabnya secara terinci dengan penjelasan sebagai berikut :

3. ESELON II (KEPALA BADAN)

Dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja BPKAD Kabupaten Tanah Laut perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2020 yang telah ditetapkan adalah juga merupakan Perjanjian Kinerja Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BPKAD 2020

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2020		PENJELASAN RUMUS	PENANGGUNGJAWAB / SUMBER DATA
			SATUAN	TARGET		
1	Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual	Bidang Akuntansi, Bidang Belanja dan Pembiayaan, Bidang Pemanfaatan & Pengendalian Aset, dan Bidang Penatausahaan Aset BPKAD Kabupaten Tanah Laut
2	Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai Indeks	Baik (83)	Hasil survey penilaian masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Bagian Sekretariat BPKAD Kabupaten Tanah Laut

Target indikator IKU pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut disajikan disesuaikan dengan target indikator yang telah disajikan pada dokumen Renstra SKPD, dan pada Pohon Kinerja dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut dan target ini telah sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan dilaksanakan oleh Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut sebagai Pimpinan SKPD. Sebagaimana telah disajikan pada tabel sebelumnya bahwa IKU SKPD juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sasaran Strategis SKPD dan Kepala Badan mengemban Sasaran Strategis 1 dan Sasaran Strategis 2 SKPD yaitu merupakan target perjanjian kinerja Kepala Badan, maka selanjutnya dapat dilihat realisasi yang telah dicapai dari tahun 2018 sampai dengan pada tahun 2020 dengan penjelasan yang lebih rinci.

2.1.1. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 1

Sasaran Strategis nomor 1 adalah menjadi tanggungjawab Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut atau Pejabat Eselon II sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Pohon Kinerja SKPD yang telah ditandatangani.

Sasaran strategis nomor 1 ini adalah Perjanjian Kinerja Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian tergambar pada tabel sebagai berikut :

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1													
Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah													
No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100
			Rata-rata capaian kinerja				100.00			100.00			100.00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan indikator sasaran Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah capaian kerjanya mencapai target yang telah ditetapkan. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 100% dan pada tahun 2019 sebesar 100%, dan pada tahun 2018 juga mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 100%.

Dalam rangka untuk mendukung indikator sasaran nomor 1 sekaligus Perjanjian Kinerja Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang juga merupakan IKU BPKAD nomor 1 ini dilaksanakan seluruh Kepala Bidang (Kepala Bidang Belanja & Pembiayaan, Kepala Bidang Akuntansi, Kepala Bidang Pemanfaatan & Pengendalian Aset dan Kepala Bidang Penatausahaan Aset) beserta seluruh Kasubbid dibawahnya dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

Untuk menggambarkan bahwa penyelarasan berkaitan suatu perencanaan yang telah ditetapkan, dimana Renja SKPD adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra SKPD dan RPJMD yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Renstra SKPD maupun dalam RPJMD pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020, baik target IKU SKPD dan target IKU Kabupaten serta capaian IKU SKPD maupun IKU Kabupaten dapat dijelaskan dibawah ini.

Bahwa Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan target WTP dan telah terealisasi dengan capaian WTP dengan bukti-bukti sebagai berikut :

- Pada Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Opini WTP oleh BPK RI atas LKPD tahun 2013 untuk yang pertama kali dengan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) mengungkapkan sebanyak 14 temuan dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 7 temuan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2013 Laporan Keuangan SKPD Akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual), sehingga masih berbasis Cash menuju akrual yang belum sepenuhnya berbasis AkruaI.

- Kemudian pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Opini WTP dari BPK RI atas LKPD Tahun 2014 untuk yang kedua kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan mengungkapkan sebanyak 4 temuan dengan bukti surat Nomor 8B/LHP/XIX.BJM/05/2015 tanggal 25 Mei 2015

- Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Opini WTP dari BPK RI atas LKPD tahun 2015 untuk yang ketiga kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak 9 temuan dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 3 temuan, dengan bukti surat Nomor 07.A/LHP/XIX.BJM/05/2016 dan Nomor 07.B/LHP/XIX.BJM/05/2016 serta Nomor 07.C/LHP/XIX.BJM/05/2016 tanggal 27 Mei 2016

- Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Opini dari BPK RI atas LKPD tahun 2016 untuk yang keempat kalinya dengan hasil

LKj BPKAD TAHUN 2020

pemeriksaan atas laporan keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak 7 temuan dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 4 temuan, dengan bukti surat Nomor 12.A/LHP/XIX.BJM/05/2017 dan Nomor 12.B/LHP/XIX.BJM/05/2017 tanggal 26 Mei 2017.

- Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2017 untuk yang kelima kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak 3 temuan dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 5 temuan, bukti surat Nomor : 11.B/LHP/XIX.BJM/05/2018 tanggal 25 Mei 2018. sehingga dengan demikian tercapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

- Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018 untuk yang keenam kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak 8 temuan dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 5 temuan, bukti surat Nomor : 12.B/LHP/XIX.BJM/05/2019 tanggal 20 Mei 2018 dan Nomor : 12.C/LHP/XIX.BJM/05/2019 tanggal 20 Mei 2019, sehingga dengan demikian tercapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

- Sedangkan pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapat Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019 untuk yang ketujuh kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak 10 temuan dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 6 temuan, bukti surat Nomor : 7.B/LHP/XIX.BJM/06/2020 tanggal 12 Juni 2020 dan bukti surat Nomor : 7.C/LHP/XIX.BJM/06/2020 tanggal 12 Juni 2020, sehingga dengan demikian tercapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa Opini WTP yang didapatkan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 terdapat peningkatan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Tujuan BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang tercantum dalam Renstra BPKAD Tahun 2018-

2023, bahwa cita-cita BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam Renstra BPKAD Tahun 2018-2023 dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel pada tahun 2020 telah berhasil dilaksanakan 100%.

Untuk mencapai target tersebut tercapai dikarenakan adanya :

1. Komitmen Aparatur dan Pemangku Kepentingan
 - a. Penguatan Komitmen Bebas Temuan dan Rekomendasi Pemeriksa pada Tahun 2015 dengan penandatanganan pakta integritas
 - b. Peningkatan Intensitas Koordinasi Internal dan Eksternal
2. Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan
 - a. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)/Aparatur Pemda
 - b. Sistem Reward and Punishment
 - c. Penataan Organisasi dan Kelembagaan
3. Sistem Informasi Keuangan Daerah
 - a. SIMDA-Keuangan
 - b. SIMDA-BMD
 - c. SIMDA Pendapatan
4. Kelengkapan Regulasi Daerah
5. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Melalui upaya-upaya tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut optimis bisa mempertahankan Opini WTP selama semua dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Untuk kedepannya Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut akan menuangkan action plan mempertahankan Opini WTP dalam sebuah Peraturan Bupati Tanah Laut dan mencanangkan slogan “Sekali WTP tetap WTP atau Forever WTP”. Progres Action Plan / Rencana Aksi pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan Daerah telah mensosialisasikan tentang adanya regulasi terbaru berkaitan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas pada setiap pelaksanaan coffee morning untuk seluruh pimpinan SKPD.

2. Melakukan rapat koordinasi/penyamaan persepsi dengan Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan dan pengurus barang untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas.
3. .Dalam meningkatkan kualitas SDM di bidang pengelolaan keuangan dan aset, Pemerintah Daerah (BPKAD) telah mengadakan pembinaan terhadap entitas akuntansi, sosialisasi regulasi, melaksanakan rekonsiliasi dan monitoring, melaksanakan FGD untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas pada Pemerintah Daerah.
4. .Dalam menyamakan persepsi tentang pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan propinsi serta BPK dan BPKP.
5. . Bupati Tanah Laut telah menetapkan revisi Kebijakan Akuntansi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 125 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
6. .Pemerintah Daerah sudah menggunakan SIMDA versi 2.7.14 yang mengakomodir full basis akrual.
7. .Pemerintah Daerah sudah membuat jaringan online berbasis website dengan menggunakan SIM-Cloude, sehingga SIMDA Keuangan telah terintegrasi antara SKPD dengan SKPKD
8. Pemerintah Daerah akan melakukan penyesuaian kode rekening secara bertahap berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Permendagri 108 tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah.
9. Pemerintah Daerah akan memberikan penghargaan setiap tahunnya bagi SPKD terbaik, Bendahara Pengeluaran terbaik, Bendahara Penerimaan terbaik dan Pengurus Barang terbaik sesuai tupoksi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset.

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Para Pimpinan SKPD belum sepenuhnya memahami pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas.
2. Kurangnya koordinasi antara PA/KPA ,PPK, Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas
3. Kurangnya tenaga Akuntansi pada setiap SKPD terutama di SKPKD.
4. Kurangnya tenaga IT yang bisa mengoperasikan aplikasi Keuangan dan Aset.
5. Pelaksana Pengelola Keuangan dan Aset belum sepenuhnya memahami tentang Akuntansi Berbasis Akrua dalam penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan berkualitas.
6. Sering terjadi mutasi tenaga teknis pengelola keuangan dan aset, sehingga harus ada pembenahan ulang bagi SKPD terkait.
7. Belum terintegrasi antara Simda Keuangan dengan SIMDA BMD.

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan setiap adanya regulasi pengelolaan keuangan daerah yang terbaru untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas pada pelaksanaan coffee morning.
2. Melakukan rapat-rapat koordinasi antara PA/KPA ,PPK, Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang dalam dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas
3. Berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan dan BKD dalam pemerataan tenaga IT.
4. Melakukan Pembinaan entitas akuntansi, melaksanakan rekonsiliasi, monitoring, sosialisasi regulasi, FGD tentang pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas

5. Perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap tenaga ahli/tenaga teknis pengelola keuangan dan Aset dalam hal mutasi unit kerja.
6. Memberikan penghargaan bagi Bendahara Pengeluaran terbaik, Bendahara Penerimaan terbaik dan Pengurus Barang terbaik sesuai tupoksi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset

Dalam rangka untuk mendukung indikator sasaran nomor 1 ini yaitu meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab 4 (empat) Kepala Bidang dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut yaitu Kepala Bidang Akuntansi, Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan, Kepala Bidang Pemanfaatan & Pengendalian Aset, dan Kepala Bidang Penatausahaan Aset BPKAD Kabupaten Tanah Laut dan dapat dijelaskan melalui Sasaran Strategis masing-masing jabatan struktural Eselon III dan IV pada pembahasan selanjutnya.

2.1.2. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 2

Sasaran Strategis nomor 2 adalah menjadi tanggungjawab Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut atau Pejabat Eselon II sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Pohon Kinerja SKPD yang telah ditandatangani.

Sasaran strategis nomor 2 ini adalah merupakan Perjanjian Kinerja Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian tergambar pada tabel yang selanjutnya dapat dilihat realisasi yang telah dicapai dari tahun 2018 sampai dengan pada tahun 2020 sebagai berikut :

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2													
Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah													
No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah	2	Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Nilai	Baik (82)	Sangat Baik (87)	106.1	Baik (82)	Sangat Baik (90)	109,76	Baik (83)	Sangat Baik (93)	112,05%
			Rata-rata capaian kinerja				106.10			109,76			112,05%

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan untuk mendukung Indikator Kinerja Utama BPKAD nomor 2 ini maka sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 selama 7 (tujuh) tahun dilaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan SKPD khususnya terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah terhadap 4 bidang pelayanan yaitu pelayanan penerbitan SP2D, pelayanan Bansos, hibah dan bantuan keuangan lainnya, pelayanan pengelolaan aset daerah dan pelayanan pada bidang Akuntansi. Jumlah responden sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang dari Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui survei kepada masyarakat yang menjadi konsumen dari 4 bidang pelayanan tersebut, dengan jumlah responden adalah 150 (seratus lima puluh) orang. Kegiatan pengumpulan data telah dilaksanakan dalam periode minggu terakhir bulan April sampai dengan minggu keempat bulan Juni. Dari hasil survey tersebut didapat nilai indeks dengan hasil 87 dari target 82 pada tahun 2018 atau capaian 106,10%, kemudian pada tahun 2019 didapat nilai indeks dengan hasil 90 dari target 82 atau capaian sebesar 109,76%, sedangkan pada tahun 2020 didapat nilai indeks dengan hasil 93 dari target 83 atau capaian sebesar 112,05%, sehingga dengan demikian terdapat peningkatan trend kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan pencapaian nilai hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut berada dalam mutu pelayanan SANGAT BAIK, sehingga dengan demikian realisasi telah melampaui target yang ditetapkan.

atau terdapat peningkatan sebesar 3,66 % dari tahun 2019 Dengan demikian bahwa dengan adanya hasil survey kepuasan masyarakat yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut berada dalam mutu pelayanan Sangat Baik.

Adapun kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- 1). Kurangnya pengetahuan responden dalam mengisi kuisisioner
- 2). Keterbatasan SDM yang khusus untuk mendistribusikan dan mengumpulkan kuisisioner

Upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi sebagai berikut :

- 1). Melakukan pendampingan kepada responden
- 2). Menunjuk SDM khusus yang mendistribusikan dan mengumpulkan kuisisioner

Dalam rangka untuk mendukung indikator sasaran nomor 2 ini dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab Sekretaris BPKAD Kabupaten Tanah Laut.

Untuk menggambarkan masing-masing tanggungjawab dari pengemban sasaran 1 dan pengemban sasaran 2 Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut dapat dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

4. ESELON III.B (Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan)

2.1.3 Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 3

Sasaran Strategis nomor 3 adalah menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan atau Pejabat Eselon III.B sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Pohon Kinerja SKPD yang telah ditandatangani.

Sasaran strategis nomor 3 adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan dengan tabel pencapaian sebagai berikut :

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3
Meningkatnya kualitas penganggaran keuangan sesuai ketentuan

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
3	Meningkatnya kualitas penganggaran keuangan sesuai ketentuan	3	Persentase SKPD yang menyampaikan perencanaan penganggaran sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Rata-rata capaian kinerja				100.00			100.00			100.00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran Meningkatnya kualitas penganggaran keuangan sesuai ketentuan dengan indikator sasaran Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan adalah perjanjian kinerja Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan dengan realisasi capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung indikator sasaran nomor 3 ini dilaksanakan oleh Kasubbid Anggaran dengan pencapaian Program dan Kegiatan serta pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

Penyampaian penetapan APBD dan APBD Perubahan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa batas waktu penyampaian penetapan APBD dan APBD Perubahan yaitu paling lambat pada tanggal 31 Desember.

Pada tahun 2018 penetapan APBD Tahun 2018 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2018 Nomor 6 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017, dan untuk penetapan APBD Perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2018 Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 24 Oktober 2018 sehingga dengan demikian penetapan APBD dan APBD Perubahan tepat waktu 100%.

Sedangkan pada tahun 2019 penetapan APBD Tahun 2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2019 Nomor 9 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018, dan untuk penetapan APBD Perubahan tahun 2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2019 Nomor 10 Tahun 2019 tanggal 27 Agustus 2019 sehingga dengan demikian penetapan APBD dan APBD Perubahan tepat waktu 100%.

Pada tahun 2020 penetapan APBD Tahun 2020 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2020 Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019, dan untuk penetapan APBD Perubahan tahun 2020 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2020 Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 9 Oktober 2020 sehingga dengan demikian penetapan APBD dan APBD Perubahan tepat waktu 100%.

4.1). Eselon IV. A1 (Kasubbid Anggaran)

Sasaran Strategis nomor 3 yang menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan atau Pejabat Eselon III.B tersebut, dilaksanakan atau menjadi tanggungjawab Kepala Sub Bidang Anggaran atau Pejabat Eselon IV.A sesuai dengan Program dan Kegiatan, Perjanjian Kinerja serta Pohon Kinerja SKPD yang telah ditandatangani. Untuk menggambarkan pencapaian kinerja Kasubbid Anggaran Tahun 2020 yang menjadi tanggungjawabnya akan dipaparkan dari pencapaian Program dan Kegiatan serta Perjanjian Kinerja beserta analisisnya yaitu sebagai berikut :

Tabel Program dan kegiatan Kasubbid Anggaran Tahun 2020 yang telah dilaksanakan dengan capaian sebagai berikut :

Program & Kegiatan	Pagu Anggaran		Realisasi	Capaian
	Murni	Perubahan		

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Kegiatan penyusunan raperda dan raperbup tentang APBD dan Perubahan APBD	Rp. 646.520.000	Rp. 385.135.300	Rp. 279.436.900	72,56%
---	--------------------	--------------------	-----------------	--------

Indikator	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja		Realisasi	Capaian
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
Keluaran	Jumlah Dokumen Perda	Jumlah Dokumen Perda	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%
Keluaran	Jumlah Dokumen Perbup	Jumlah Dokumen Perbup	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%
Keluaran	Jumlah Dokumen KUA	Jumlah Dokumen KUA	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%
Keluaran	Jumlah Dokumen PPAS	Jumlah Dokumen PPAS	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%
Keluaran	Jumlah Dokumen Nota Keuangan	Jumlah Dokumen Nota Keuangan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%
Keluaran	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	50%

	Pedoman Penyusunan RKA	Pedoman Penyusunan RKA				
--	------------------------------	------------------------------	--	--	--	--

1. Tabel Perjanjian Kinerja Target dan Realisasi Tahun Anggaran 2020

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1. Melaksanakan Penyusunan KUA-PPAS dan KUPA-PPAS sesuai ketentuan	1. Jumlah dokumen KUA-PPAS dan KUPA-PPAS Perubahan	4 dokumen	4 dokumen	100%
2. Melaksanakan Sosialisasi Penyusunan RKA SKPD sesuai ketentuan	2. Jumlah SKPD yang mengikuti sosialisasi dan memahami penyusunan RKA sesuai ketentuan	40 SKPD	40 SKPD	100%
3. Melaksanakan Pembahasan RKA SKPD sesuai ketentuan	3. Jumlah SKPD yang mengikuti pembahasan RKA-SKPD sesuai ketentuan	40 SKPD	40 SKPD	100%
4. Melaksanakan Penyusunan Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD sesuai ketentuan	4. Jumlah dokumen Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD sesuai ketentuan	2 dokumen	2 dokumen	100%
5. Memfasilitasi	5. Jumlah Naskah	2 Naskah	2 Naskah	100%

evaluasi atas Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD ke pemprov sesuai ketentuan	Hasil Kesepakatan antara Pemkab dengan DPRD sesuai ketentuan			
6. Melaksanakan fasilitasi Penetapan Perda APBD dan Perda Perubahan APBD sesuai ketentuan	6. Jumlah Dokumen Penetapan Perda APBD dan Perubahan APBD sesuai ketentuan	2 dokumen	2 dokumen	100%
7. Melaksanakan penyusunan penerbitan Penyediaan Dana Anggaran SKPD sesuai ketentuan	7. Jumlah SPD-SKPD dan PPKD yang diterbitkan sesuai ketentuan	280 SPD	280 SPD	100%
8. Melaksanakan Pembinaan Penganggaran SKPD sesuai ketentuan	8. Jumlah SKPD yang dibina dalam penganggaran sesuai ketentuan	40 SKPD	40 SKPD	100%

Analisis Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan serta Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

- A. Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Penyusunan raperda dan raperbup tentang APBD dan Perubahan APBD Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Kasubbid Anggaran dengan Pagu Anggaran Murni sebesar Rp 646.520.000,-, namun pada APBD Perubahan berkurang menjadi Rp 385.135.300,- dikarenakan adanya Refocusing dan sampai akhir tahun telah terealisasi sebesar Rp 279.436.900,- atau dengan capaian sebesar 72,56%%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 105.698.400,- atau sebesar 27,44%

Sedangkan target kinerja yaitu 12 Dokumen (2 Dokumen Perda, 2 Dokumen Perbup, 2 Dokumen KUA, 2 Dokumen PPAS, 2 Dokumen Nota Keuangan dan 2 Dokumen Pedoman Penyusunan RKA) yang ditargetkan telah tercapai seluruhnya 11 Dokumen, sehingga realisasi capaian kinerja fisik tercapai 91,66% Untuk Pedoman Penyusunan RKA dari target 2 (dua) dokumen hanya 1 (satu) dokumen yang direalisasikan, 1 dokumen yang tidak direalisasikan yaitu Pedoman Penyusunan Perubahan RKA Tahun 2020 karena tidak ada perubahan signifikan dari pedoman penyusunan RKA murni TA.2020.

- B. Dalam menyusun APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 diperlukan Peraturan yang telah menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, berupa :
1. Peraturan Daerah sebanyak 2 dokumen
 2. Peraturan Bupati sebanyak 11 dokumen
 3. Keputusan Bupati sebanyak 1 dokumen

4. Surat Edaran Bupati sebanyak 2 dokumen

Dari keempat jenis dokumen tersebut, telah diterbitkan :

1. Peraturan Daerah, sebanyak 2 dokumen yaitu :
 - a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020.
 - b. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021
2. Peraturan Bupati, sebanyak 4 dokumen yaitu :
 - a. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 210 Tahun 2019 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020.
 - b. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 210 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020.
 - c. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 210 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020.
 - d. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 210 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020.
 - e. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 210 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020.
 - f. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 210

Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020.

- g. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 90 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 210 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020.P
 - h. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 100 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 210 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020.
 - i. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 210 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020.
 - j. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 210 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020.
 - k. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 134 Tahun 2020 tentang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020.
 - l. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 144 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Penjabaran Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020.
3. Keputusan Bupati, sebanyak 1 dokumen yaitu :
- a. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/1098-KUM/2019 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020.
4. Surat Edaran Bupati Tanah Laut, sebanyak 2 dokumen yaitu :

- a. Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor : 910/2576/BPKAD tanggal 4 September 2020 tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/ RKA-SKPKD APBD Tahun Anggaran 2021.
 - b. Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor : 910/2626/BPKAD tanggal 10 September 2020 tentang Pedoman Penyusunan RKAP-SKPD/ RKAP-PPKD Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
- C. Untuk pemenuhan data pembuatan dokumen APBD TA. 2021 dan Perubahan APBD TA. 2020 diperlukan pula data, dokumen ataupun alat bantu yaitu berupa :
1. Berita Acara Kesepakatan Antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Tanah Laut terhadap KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2021.
 2. Berita Acara Persetujuan Bersama Antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Tanah Laut terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021.
 3. Berita Acara Kesepakatan Antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Tanah Laut terhadap KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
 4. Berita Acara Persetujuan Bersama Antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Tanah Laut terhadap Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
 5. RKA yang telah dientry melalui Aplikasi SIMDA Keuangan maupun melalui Aplikasi SIPD.
- D. Dasar Pelaksanaan APBD :
1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan PPKD Tahun Anggaran 2020
 2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD dan PPKD Tahun Anggaran 2020

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH :

A. Permasalahan

Pelaksanaan kegiatan Pembahasan KUA-PPAS maupun Rancangan APBD antara TAPD dengan Badan Anggaran DPRD biasanya diselesaikan pada akhir waktu yang ditetapkan oleh ketentuan perundangan, sehingga harus disiapkan dalam waktu yang sangat terbatas dan kemungkinan untuk terjadi kekeliruan pada tahapan selanjutnya menjadi lebih besar.

B. Upaya Pemecahan Masalah

Karena pelaksanaan tahapan/proses penyusunan APBD melibatkan banyak pihak diantaranya Badan Anggaran DPRD, TAPD, Inspektorat dan SKPD sehingga kekeliruan berupa kurang lengkapnya data maupun informasi sulit untuk dihindari, hal ini bisa diminimalkan dengan koordinasi yang lebih baik diantara pihak-pihak yang terkait.

Foto-foto kegiatan Subbid Anggaran

RAPAT PERTIMBANGAN TAPD TERHADAP USULAN HIBAH DAN BANSOS TANGGAL 29 JUNI 2020

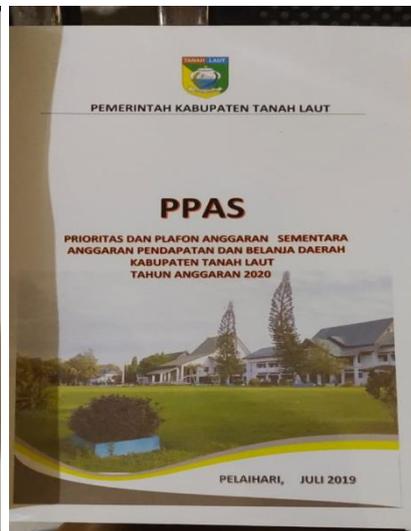
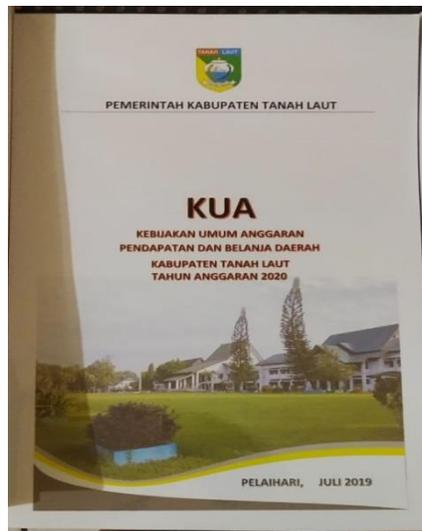
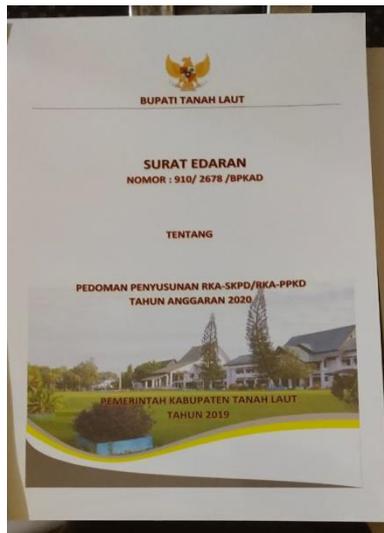




Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/RKA-PPKD Tahun Anggaran 2021 , tanggal 7 September 2020



CETAK DOKUMEN APABD 2020



2.1.4 Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 4

Sasaran Strategis nomor 4 adalah menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan atau Pejabat Eselon III.B sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Pohon Kinerja SKPD yang telah ditandatangani.

Sasaran strategis nomor 4 adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan dengan tabel pencapaian sebagai berikut :

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4
Meningkatnya kualitas pemberian pelayanan kepada stakeholder dalam Penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
4	Meningkatnya kualitas pemberian pelayanan kepada stakeholder dalam Penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	4	Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja							100.00			100.00			100.00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Meningkatkan kualitas pemberian pelayanan kepada stakeholder dalam Penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan dengan indikator sasaran Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan capaian kerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100 %.

Untuk mendukung sasaran strategis Kepala Bidang Pembiayaan nomor 4 ini Indikator sasaran dilaksanakan oleh 2 (dua) Kasubbid yaitu Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi dan Kepala Sub Bidang Pembiayaan dengan pencapaian Perjanjian Kinerja tahun 2020 dan pencapaian Program dan Kegiatan sesuai DPA Tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut dibawah ini.

4.2). Eselon IV. A1 (Kasubbid Perbendaharaan dan Verifikasi)

Sasaran Strategis nomor 4 yang menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan atau Pejabat Eselon III.B tersebut, dilaksanakan atau menjadi tanggungjawab Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi atau Pejabat Eselon IV.A1 sesuai dengan Program dan Kegiatan, Perjanjian Kinerja serta Pohon Kinerja SKPD yang telah ditandatangani. Untuk menggambarkan pencapaian kinerja Kasubbid Perbendaharaan dan Verifikasi Tahun 2020 yang menjadi tanggungjawabnya akan dipaparkan dari pencapaian Program dan Kegiatan serta Perjanjian Kinerja beserta analisisnya yaitu sebagai berikut :

Tabel Pencapaian Program dan Kegiatan sesuai DPA Tahun Anggaran 2020

Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran		Realisasi	Capaian
	Murni	Perubahan		
Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Administrasi Penatausahaan Keuangan Daerah	Rp. 188.299.540	Rp. 155.214.540	Rp 138.559.000	89,27%

Indikator	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja		Realisasi	Capaian %
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
Keluaran	Jumlah dokumen penerbitan SP2D, Peraturan Bupati, SK. Bupati, SE. Bupati, SKPP, Laporan DAU Gaji, Taperum, IWP BPJS Kesehatan dan	Jumlah dokumen penerbitan SP2D, Peraturan Bupati, SK. Bupati, SE. Bupati, SKPP, Laporan DAU Gaji, Taperum, IWP BPJS Kesehatan dan Laporan IWP Taspen, JKK,	9 Dokumen (4000 SP2D, 1 Peraturan Bupati, 20 Surat Keputusan Bupati, 1 Surat Edaran Bupati, 60 SKPP, 12 Laporan DAU Gaji, , 12	9 Dokumen (4000 SP2D, 1 Peraturan Bupati, 20 Surat Keputusan Bupati, 1 Surat Edaran Bupati, 60 SKPP, 12 Laporan DAU Gaji, , 12 Laporan	9 Dokumen (4000 SP2D, 1 Peraturan Bupati, 20 Surat Keputusan Bupati, 1 Surat Edaran Bupati, 60 SKPP, 12	100%

	Laporan IWP Taspen, JKK, JKM Taspen serta Terlaksananya pembinaan terhadap penatausahaan keuangan	JKM Taspen serta Terlaksananya pembinaan terhadap penatausahaan keuangan	Laporan Taperum, 24 laporan IWP BPJS Kesehatan, 24 Laporan IWP Taspen, 24 Laporan JKK, JKM Taspen).	Taperum, 24 laporan IWP BPJS Kesehatan, 24 Laporan IWP Taspen, 24 Laporan JKK, JKM Taspen).	Laporan DAU Gaji, , 16 Laporan Taperum, 24 laporan IWP BPJS Kesehatan, 24 Laporan IWP Taspen, 24 Laporan JKK, JKM Taspen).	
--	---	--	---	---	--	--

Tabel Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2020

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1. Meningkatkan kualitas pelayanan penerbitan SP2D, penatausahaan keuangan daerah yang tertib sesuai dengan Per-UU dan sebagai bahan dokumen pertanggungjawaban	1. Jumlah SP2D, SP2B, SPB, Daftar Penguji dan SKPP yang diterbitkan sesuai ketentuan	4.000 SP2D, 798 SP2B, 558 SPB dan 400 Daftar Penguji	5.581 SP2D, 798 SP2B, 558 SPB dan 400 Daftar Penguji	100%
2. Melaksanakan perhitungan Pembayaran Iuran Taspen, Taperum, JKK-JKM dan IWP 4% sesuai ketentuan	2. Jumlah Laporan Hasil Perhitungan Pembayaran Iuran Taspen, Taperum, JKK-JKM dan IWP 4% sesuai ketentuan	24 Lap. Taspen, 24 Lap. Taperum, 24 Lap. JKK, 24 Lap. JKM dan 24 Lap. IWP	24 Lap. Taspen, 16 Lap. Taperum, 24 Lap. JKK, 24 Lap. JKM dan 24 Lap. IWP	95%
3. Melaksanakan sosialisasi penatausahaan keuangan untuk Bendahara Pengeluaran SKPD sesuai ketentuan	3. Jumlah Bendahara Pengeluaran SKPD yang disosialisasikan tentang penatausahaan keuangan sesuai ketentuan	55 Bendahara Pengeluaran	55 Bendahara Pengeluaran	100%
4. Melaksanakan monitoring penatausahaan SKPD sesuai ketentuan	4. Jumlah SKPD yang termonitoring dalam penatausahaan keuangan sesuai ketentuan	40 SKPD	40 SKPD	100%
5. Melaksanakan	5. Jumlah stakeholder	43	43	100%

koordinasi/konsolidasi/evaluasi dengan stakeholder mengenai penatausahaan keuangan sesuai ketentuan	yang dikoordinasi/dikonsolidasi/dievaluasi mengenai penatausahaan keuangan sesuai ketentuan	Stakeholder	Stakeholder	
---	---	-------------	-------------	--

Analisis Pencapaian Program/Kegiatan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah dilaksanakan Kasubbid Perbendaharaan dan Verifikasi adalah sebagai berikut :

- A.** Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Peningkatan Administrasi Penatausahaan Keuangan Daerah Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Kasubbid Perbendaharaan dan Verifikasi dengan Pagu Anggaran Murni sebesar Rp. 188.299.540,-, namun pada APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 155.214.540,- dikarenakan adanya Refocusing dan sampai akhir tahun telah terealisasi sebesar Rp 138.559.000,- atau dengan capaian sebesar 89,27%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 16.655.540,- atau sebesar 10,73%

Sedangkan target kinerja yaitu sebanyak 9 Dokumen (4000 SP2D, 1 Peraturan Bupati, 20 Surat Keputusan Bupati, 1 Surat Edaran Bupati, 60 SKPP, 12 Laporan DAU Gaji, , 12 Laporan Taperum, 24 laporan IWP BPJS Kesehatan, 24 Laporan IWP Taspen, 24 Laporan JKK, JKM Taspen) telah tercapai seluruhnya, sehingga realisasi capaian kinerja tercapai 100%, sehingga pagu anggaran yang tersedia disesuaikan dengan kebutuhan tidak menghabiskan dana dan dapat mengefisienkan anggaran yang tersedia bahkan dapat berhemat sebesar 10,73%.

B. Pencapaian kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan:

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan penerbitan SP2D, penatausahaan keuangan daerah yang tertib sesuai dengan Per-UU dan sebagai bahan

dokumen pertanggungjawaban melalui verifikasi dokumen SPM-UP, SPM-GU, SPM-LS, SPM-TU dan SPM-NIHIL target sebanyak 4.000 dokumen terealisasi sebanyak 5.581 SP2D.

- 2) Terlaksananya perhitungan Pembayaran JKK-JKM dan IWP 4% sesuai ketentuan masing-masing 24 Laporan (masing-masing 2 Laporan per bulan), terealisasi sebanyak 95% dikarenakan sebanyak 6 dokumen laporan Taperum yang semula ditargetkan tidak dilaksanakan.
- 3) Terlaksananya sosialisasi penatausahaan keuangan untuk Bendahara Pengeluaran SKPD sesuai ketentuan sebanyak 1 kali pertemuan yang dihadiri oleh Kasubbag Keuangan dan Bendahara Pengeuaran seluruh SKPD dari target 55 Bendahara Pengeluaran terealisasi seluruhnya.
- 4) Termonitornya penatausahaan SKPD sesuai ketentuan melalui verifikasi dokumen yang disampaikan dalam rangka pengajuan Penerbitan SP2D terhadap 40 SKPD.
- 5) Terlaksananya koordinasi/konsolidasi/evaluasi dengan stakeholder mengenai penatausahaan keuangan sesuai ketentuan dengan 40 SKPD, Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pelaihari, Kantor Cabang PT. Taspen Banjarmasin dan Bank Kalsel Cabang Pelaihari selaku Bank Umum Daerah.

Kendala/Permasalahan yang dihadapi

1. Berkas pengajuan penerbitan SP2D ada yang kurang lengkap, tidak sesuai dengan Surat Edaran Bupati Tanah Laut tentang Penatausahaan Keuangan Daerah.
2. Rekening Penerima yang tercantum pada SPM sering ada kesalahan, sehingga perlu dilakukan perbaikan.
3. Keterlambatan dalam menyampaikan kembali berkas yang diperbaiki.
4. Ada beberapa SKPD yang lambat menyampaikan berkas SP2D ke Bank Umum Daerah sehingga dana yang masuk ke penerima dana mengalami keterlambatan.

Rencana Aksi yang telah dilakukan dalam rangka upaya perbaikan

- 1) Melaksanakan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku secara berkelanjutan.
- 2) Melakukan sosialisasi terhadap PPK-SKPD terhadap Verifikasi SPP yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran.
- 3) Melakukan sosialisasi terhadap Bendahara Pengeluaran yang masih baru.

Foto-Foto Kegiatan yang telah dilaksanakan Kasubbid Perbendaharaan dan Verifikasi Tahun 2020

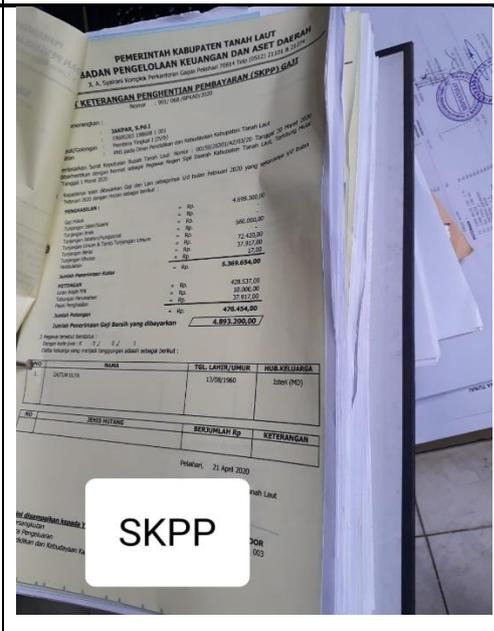
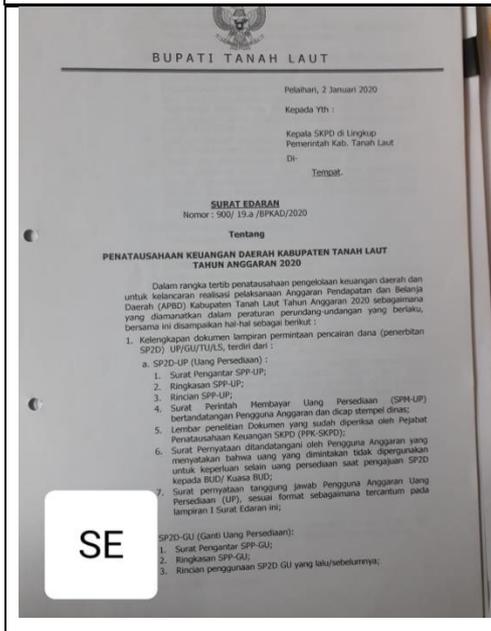
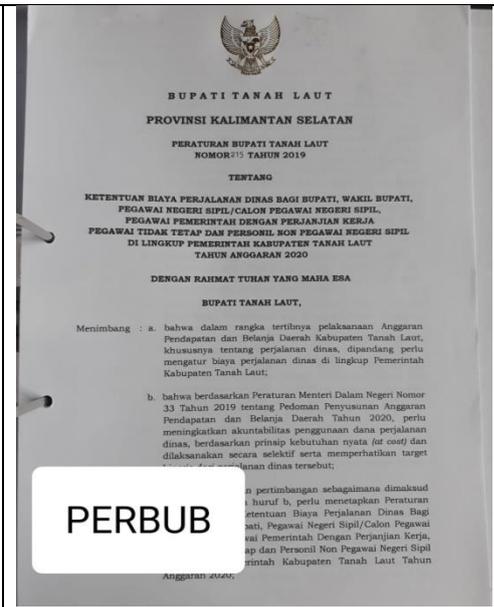
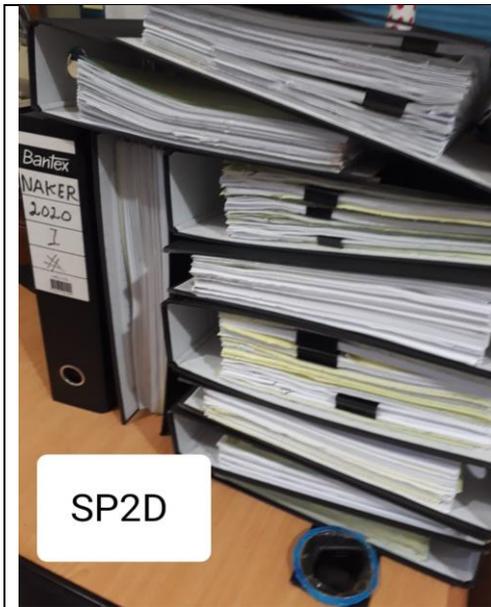
- 1) Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan Bendahara Pengeluaran



- 2) Pelaksanaan monitoring dengan Stakeholder



3) Pemberkasan dokumen penatausahaan



4.3). Eselon IV.A1 (Kasubbid Pembiayaan)

Sasaran Strategis nomor 4 yang menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan atau Pejabat Eselon III.B tersebut, juga dilaksanakan atau menjadi tanggungjawab Kepala Sub Bidang Pembiayaan atau Pejabat Eselon IV.A1 sesuai dengan Program dan Kegiatan, Perjanjian Kinerja serta Pohon Kinerja SKPD yang telah ditandatangani. Untuk menggambarkan pencapaian kinerja Kepala Sub Bidang Pembiayaan Tahun 2020 yang menjadi tanggungjawabnya akan dipaparkan dari pencapaian Program dan Kegiatan serta Perjanjian Kinerja beserta analisisnya yaitu sebagai berikut

Tabel Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan Kasubbid Pembiayaan Tahun 2020

Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran		Realisasi	Capaian
	Murni	Perubahan		
Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Administrasi Pembiayaan Daerah	Rp 345.853.840	Rp 199.746.720	Rp 164.093.000	82,15%

Indikator	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja		Realisasi	Capaian %
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
Keluaran	Jumlah dokumen administrasi Dana Hibah, Bantuan	Jumlah dokumen administrasi Dana Hibah, Bantuan	1 dokumen Laporan Belanja Tidak Langsung	1 dokumen Laporan Belanja Tidak Langsung	1 dokumen Laporan Belanja Tidak Langsung	100 %

	Sosial, Dana Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga serta Investasi Jangka Pendek dan Jangka Panjang	Sosial, Dana Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga serta Investasi Jangka Pendek dan Jangka Panjang	PPKD Tahun Anggaran 2020, 3 Kali sosialisasi peraturan perundang-undangan	PPKD Tahun Anggaran 2020, 3 Kali sosialisasi peraturan perundang-undangan	PPKD Tahun Anggaran 2020,3 Kali sosialisasi peraturan perundang-undangan	
--	---	---	---	---	--	--

Tabel Pencapaian Perjanjian Kinerja Kasubbid Pembiayaan Tahun 2020

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1. Melaksanakan penyediaan bahan penganggaran BTL-PPKD dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	1. Jumlah dokumen penganggaran BTL-PPKD dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	2 dokumen	2 dokumen	100%
2. Melaksanakan pelayanan penyaluran dana BTL-PPKD sesuai ketentuan	2. Jumlah pemohon yang menerima dana BTL-PPKD sesuai ketentuan	974 orang	797 orang	81,82%
3. Melaksanakan sosialisasi penatausahaan pembiayaan daerah bagi Aparatur Desa sesuai ketentuan	3. Jumlah aparatur desa yang mengikuti dan memahami sosialisasi penatausahaan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	130 orang	130 orang	100%

4. Melaksanakan penerbitan SPP-SPM Dana BTL-PPKD sesuai ketentuan	4. Jumlah SPP-SPM Dana BTL-PPKD yang diterbitkan sesuai ketentuan	1.010 dokumen	1.372 dokumen	135,84%
5. Melaksanakan pembinaan bagi penerima hibah dan bansos serta SKPD sesuai ketentuan	5. Jumlah penerima hibah dan bansos serta SKPD yang mengikuti dan memahami sosialisasi sesuai ketentuan	175 orang	175 orang	100%
6. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD yang melakukan monitoring terkait penyaluran dana hibah dan bansos sesuai ketentuan	6. Jumlah SKPD yang menerima dana hibah dan bansos yang terkoordinasi sesuai ketentuan	6 SKPD	6 SKPD	100%
7. Melaksanakan monitoring terkait penyaluran dana BTL-PPKD sesuai ketentuan	7. Jumlah penerima dana BTL-PPKD yang termonitor sesuai ketentuan	974 orang	797 orang	81,82%
8. Melaksanakan penyusunan Laporan Pembiayaan Daerah sesuai ketentuan	8. Jumlah dokumen Laporan Pembiayaan Daerah yang dilaporkan sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	100%

Analisis Pencapaian Program/Kegiatan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah dilaksanakan Kasubbid Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1). Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Peningkatan Administrasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Kasubbid Pembiayaan dengan Pagu Anggaran Murni sebesar Rp. Rp 345.853.840,-, namun pada APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. Rp 199.746.720,- dikarenakan adanya Refocusing dan sampai akhir tahun telah terealisasi sebesar Rp Rp 164.093.000,- atau dengan capaian sebesar 82,15%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 35.653.720,- atau sebesar 17,85%

Sedangkan target kinerja yaitu sebanyak 1 Dokumen (Laporan Belanja Tidak Langsung PPKD Tahun Anggaran 2020, 3 Kali sosialisasi peraturan perundang-undangan) telah terealisasi capaian kinerja sebesar 100%, sehingga pagu anggaran yang tersedia disesuaikan dengan kebutuhan tidak menghabiskan dana dan dapat mengefesiensikan anggaran yang tersedia bahkan dapat berhemat sebesar 17,85%.

- 2). Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan dari target sebanyak 3 kali sosialisasi dengan realisasi sebanyak 3 kali sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :
 - a) Sosialisasi kepada para bendahara pengeluaran terkait penatausahaan belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2020 sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020.
 - b) Sosialisasi kepada SKPD teknis terkait pelaksanaan hibah dan bansos Tahun Anggaran 2020 serta penganggaran hibah dan bansos pada Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- c) Sosialisasi kepada perangkat desa terkait dengan rekonsiliasi sisa dana desa pada rekening kas desa sesuai dengan PMK Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
 - 2). Pelaksanaan penyaluran dana BTL-PPKD dari target 974 orang, terealisasi sebanyak 797 orang. Hal ini dikarenakan bantuan sosial berupa uang untuk program rumah tidak layak huni dengan pelaksana Dinas Sosial dan target 200 orang tidak terealisasi.
 - 3). Terlaksananya sosialisasi yang diikuti oleh aparatur desa dengan target 130 orang dan realisasi 130 orang yaitu sosialisai terkait dengan rekonsiliasi sisa dana desa pada rekening kas desa.
 - 4). Penerbitan SPP-SPM dana BTL-PPKD yang diterbitkan dengan target 1.010 dokumen dapat terealisasi sebanyak 1.372 dokumen terdiri dari 1.346 dokumen SPP-SPM Langsung (LS) dan 26 dokumen SPP-SPM Tambah Uang (TU).
 - 5). Terlaksananya koordinasi dengan SKPD yang menerima hibah dan bansos yang dilakukan terhadap 6 SKPD dan dilaksanakan kepada 6 SKPD baik berupa sosialisai serta rapat koordinasi.
 - 6). Terlaksananya monitoring terkait penyaluran dana BTL-PPKD dari target sebanyak 974 penerima dapat direalisasikan sebanyak 747 penerima. Monitoring dilakukan dengan verifikasi laporan realisasi dana BTL-PPKD yang disusun oleh penerima dana BTL-PPKD.
- b. Dokumen laporan pembiayaan daerah dari target 1 dokumen dapat realisasi 100%, walaupun pada akhir Desember masih terdapat penyaluran hibah bansos sehingga proses penyusunan dokumen tersebut terhambat.

Kendala/Permasalahan yang dihadapi

- 1). Berkas administrasi pendukung proposal pencairan dana tidak lengkap dan perlu diverifikasi ulang.

- 2). Penggunaan dana hibah dan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan RAB yang telah di usulkan.
- 3). Penyampaian usulan pencairan dana hibah dan bantuan sosial dilakukan pada minggu ke-2 bulan Desember, sehingga masih terdapat penyaluran di akhir Desember yang seharusnya pada akhir Desember tidak ada lagi penyaluran dana hibah dan bantuan sosial.
- 4). Kurangnya kemampuan SKPD dalam mengelola waktu penyampaian usulan pencairan dana hibah dan bantuan sosial sehingga dana hibah dan bantuan sosial tidak tersalur 100%.

Rencana Aksi yang akan dilakukan dalam rangka upaya perbaikan

- 1). Melaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati dan SOP tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, kepada SKPD yang langsung berkaitan dengan masyarakat pemohon hibah dan bantuan sosial agar di informasikan kepada masyarakat.
- 2). Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dengan kelengkapan berkas dan RAB yang tidak sesuai antara usulan dengan usulan pencairan.
- 3). Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait serta dengan bidang akuntansi terkait Surat Edaran Bupati tentang langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran 2020.

Foto-Foto Kegiatan Kasubbid Pembiayaan Tahun 2020

- 1). Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan



2). Pelaksanaan penyaluran dana BTL-PPKD



3). Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD terkait



4) Pelaksanaan rekonsiliasi sisa dana desa



5. ESELON III.B (Kepala Bidang Akuntansi)

2.1.5 Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 5

Sasaran Strategis nomor 5 adalah menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Akuntansi atau Pejabat Eselon III.B sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Pohon Kinerja SKPD yang telah ditandatangani.

Sasaran strategis nomor 5 adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Akuntansi dengan tabel pencapaian sebagai berikut :

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5
Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemkab sesuai ketentuan

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
5	Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemkab sesuai ketentuan	5	Persentase pelaporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Rata-rata capaian kinerja				100.00			100.00			100.00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Meningkatkan kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemkab sesuai ketentuan dengan indikator sasaran Persentase pelaporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan capaian kerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100 % baik pada tahun 2018 maupun pada tahun 2019 serta pada tahun 2020. Untuk mendukung sasaran strategis Kepala Bidang Akuntansi nomor 5 Indikator sasaran ini dilaksanakan oleh Kasubbid Pengelolaan Kas, Kasubbid Akuntansi Belanja dan Beban dan Kasubbid Akuntansi Pendapatan dan Piutang dengan pencapaian Perjanjian Kinerja tahun 2020 dan pencapaian Program dan Kegiatan sesuai DPA Tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut dibawah ini.

5.1). Eselon IV. A1 (Kasubbid Akuntansi Pengelolaan Kas)

Pada tahun 2014 Laporan Keuangan SKPD berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual), sehingga capaian kinerja hanya mencapai 50%, karena Laporan Keuangan SKPD belum sepenuhnya berbasis akrual.

Mulai tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos Ekuitas Dana pada Neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual) dan pada tahun 2015 direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai akuntansi berbasis akrual. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2015 dibuat berdasarkan Laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, adapun yang membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2015 ini adalah sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yaitu BPKAD Kabupaten Tanah Laut. Demikian juga pada tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 Laporan Keuangan SKPD berbasis akrual telah disampaikan oleh seluruh SKPD dan telah di Audit oleh BPK – RI dan telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berbasis akrual. Dengan demikian bahwa pelaporan keuangan SKPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berbasis Akrual dapat dijamin terpenuhi 100%.

Untuk mendukung Sasaran strategis No 5 yang menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Penatausahaan Aset diatas dilaksanakan oleh Kasubbid Pengelolaan Kas yaitu dengan melaksanakan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam DPA Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah ditandatangani.

Untuk menggambarkan kinerja Kasubbid Pengelolaan Kas Tahun 2020 sesuai dengan Program dan Kegiatan serta Perjanjian Kinerja yaitu berupa tabel pencapaian beserta analisisnya dapat diuraikan dibawah ini.

LKj BPKAD TAHUN 2020

**Tabel Pencapaian Program dan Kegiatan Tahun 2020 Kasubbid Akuntansi
Pengelolaan Kas**

Program/Kegiatan	Output dalam DPA	Target Kinerja	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi			
				Fisik		Keuangan	
				Kinerja	%	Rp	%
Program Peningkatan Penerapan Akuntansi dan Pelaporan. 1. Pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah.	Tersedianya SIKD yang update dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Akuntansi Berbasis Akrual	2 Dokumen	Rp. 228.305.520	2 Dokumen	100	Rp. 209.956.900	91,96

Program/Kegiatan	Output dalam DPA	Target Kinerja	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi			
				Fisik		Keuangan	
				Kinerja	%	Rp	%
Program Peningkatan Penerapan Akuntansi dan Pelaporan.							

2. Penyusunan Raperda dan Raperbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.	Terpenuhinya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban APBD tahun 2019	8 Dokumen 40 SKPD	Rp. 137.340.300	8 Dokumen 40 SKPD	100	Rp. 129.776.100	94,49
---	---	----------------------	--------------------	----------------------	-----	--------------------	-------

Tabel Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Kasubbid Akuntansi Pengelolaan Kas

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1. Melaksanakan Rekonsiliasi Kas SKPD sesuai ketentuan	1. Jumlah Kas SKPD yang telah direkonsiliasi sesuai ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2. Melaksanakan Pembinaan Pertanggungjawaban keuangan SKPD sesuai ketentuan	2. Jumlah SKPD yang terbina dan memahami mekanisme pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan	40 SKPD	40 SKPD	100%
3. Melaksanakan fasilitasi terhadap pelayanan laporan keuangan SKPD sesuai ketentuan	3. Jumlah SKPD yang terfasilitasi dalam penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan	40 SKPD	40 SKPD	100%
4. Melaksanakan monitoring kas SKPD sesuai ketentuan	4. Jumlah Kas SKPD yang termonitoring sesuai ketentuan	40 SKPD	40 SKPD	100%
5. Melaksanakan konsolidasi Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Laporan JKN, Laporan Dana BOS, Laporan SIKD dan Laporan Simolek sesuai ketentuan	5. Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Laporan JKN, Laporan Dana BOS, Laporan SIKD dan Laporan Simolek sesuai ketentuan	11 Dokumen	11 Dokumen	100%
6. Melaksanakan penyusunan LKPD, Raperda, Raperbup, Perda, Perbup Pertanggungjawaban APBD sesuai ketentuan	6. Jumlah Dokumen LKPD, Raperda, Raperbup, Perda, Perbup Pertanggungjawaban APBD sesuai ketentuan	6 Dokumen	6 Dokumen	100%

Analisis Pencapaian Program Kegiatan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah dilaksanakan Kasubbid Akuntansi Pengelolaan Kas :

A. Program Peningkatan Penerapan Akuntansi dan Pelaporan, Kegiatan Pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Kasubbid Akuntansi Pengelolaan Kas dengan Pagu Anggaran Murni sebesar Rp 238.149.700,-, namun pada APBD Perubahan berkurang menjadi Rp 228.305.520,- dikarenakan adanya Refocusing dan sampai akhir tahun telah terealisasi sebesar Rp 209.956.900,- atau dengan capaian sebesar 91,96%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 18.348.620,- atau sebesar 8,04%

Sedangkan target kinerja yaitu 2 Dokumen (Dokumen Laporan SIKD Semester I dan Semester II) dan)yang ditargetkan telah tercapai seluruhnya 2 Dokumen, sehingga realisasi capaian kinerja fisik tercapai 100%.

B. Program Peningkatan Penerapan Akuntansi dan Pelaporan, Kegiatan Penyusunan Raperda dan Raperbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Kasubbid Akuntansi Pengelolaan Kas dengan Pagu Anggaran Murni sebesar Rp 218.639.800,-, namun pada APBD Perubahan berkurang menjadi Rp 137.340.300,- dikarenakan adanya Refocusing dan sampai akhir tahun telah terealisasi sebesar Rp 129.776.100,- atau dengan capaian sebesar 94,49%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 7.564.200,- atau sebesar 5,51%

Sedangkan target kinerja yaitu 8 Dokumen (Raperda Un-audit, Raperda Audited, Perda Audited, , Raperbup Un-audited, Raperbup Audited, Perbup Audited, LKPD Un-audited, LKPD Audited)yang ditargetkan telah tercapai seluruhnya 8 Dokumen, sehingga realisasi capaian kinerja fisik tercapai 100%.

C. Sedangkan analisis capaian Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Terlaksananya pembinaan terhadap SKPD terkait trouble shooting SIMCLOUD.

- 2) Tersedianya data SIKD bulanan untuk dilaporkan ke Kementerian Keuangan
- 3) Terlaksananya kegiatan cek pendapatan dan belanja pada Kas Umum Daerah harian.
- 4) Terlaksananya Rekon Kas Bulanan Kas Umum Daerah dengan Bank Kalsel.
- 5) Terlaksananya Rekon Kas Semesteran BLUD dan BOS
- 6) Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah kabupaten Tanah Laut berbasis Akrual TA. 2019
- 7) Tersusunnya Perda dan Perbup terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2019
- 8) Terlaksananya kegiatan FGD Penyusunan laporan keuangan SKPD
- 9) Terlaksananya rapat pembahasan langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2020
- 10) Tersusunnya langkah-langkah akhir Tahun Anggaran 2020

Kendala/Permasalahan yang dihadapi

1. SKPD tidak melaporkan perubahan pemegang user simcloud dan kurangnya pengarsipan user simcloud sehingga SKPD berulang kali meminta password dan user simcloud.
2. Kegiatan cek pendapatan mengalami kendala dikarenakan SKPD telat menginput ke SIMDA, informasi transfer dana masuk ke kasda sering kurang jelas uraiannya, sehingga untuk dana transfer perlu waktu untuk mengidentifikasi masuk ke pendapatan SKPD yang sebenarnya, serta SKPD terlambat memberikan bukti STS pengembalian untuk tahun berjalan dan tahun yang telah lewat.
3. Data belanja dan pendapatan BOS angkanya masih mengalami pergerakan sehingga pada saat penyusunan LKPD perlu waktu untuk melakukan perhitungan final untuk Kas BOS.

Rencana Aksi yang akan dilakukan dalam rangka upaya perbaikan

- 1). Mengingatkan kepada SKPD agar dapat menginformasikan dengan segera saat terjadi perubahan pemegang SIMCLOUD dan untuk menyimpan dengan baik user dan password yang digunakan.
- 2). Berkoordinasi dengan subid akuntansi pendapatan dan piutang dan BAPENDA agar dapat menginformasikan kepada bendahara Penerimaan untuk sesegera mungkin melakukan input data pendapatan.
- 3). Melakukan rekonsiliasi kas BOS tiap semester dengan Dinas Pendidikan.

Foto-Foto Kegiatan Kasubbid Pengelolaan Kas Tahun 2020

Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019



Raperbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019

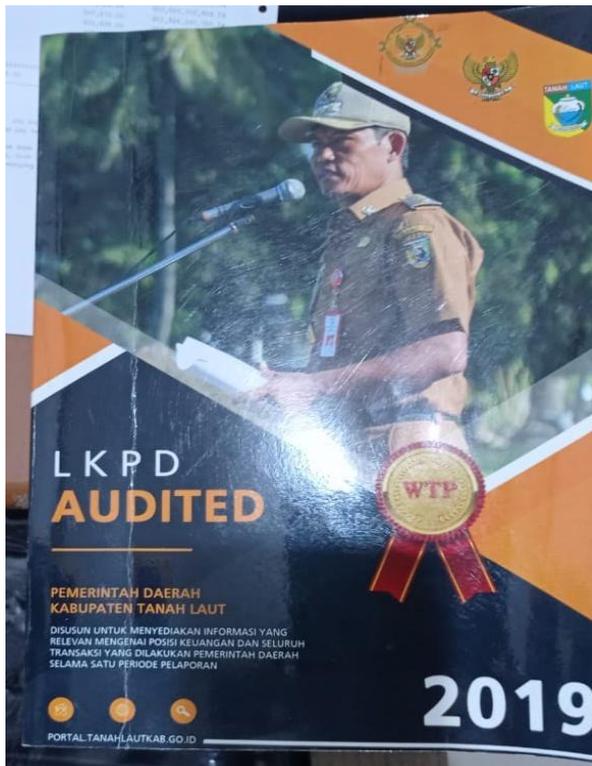


LKPD UN Audited 2019



LKj BPKAD TAHUN 2020

LKPD Audited 2019

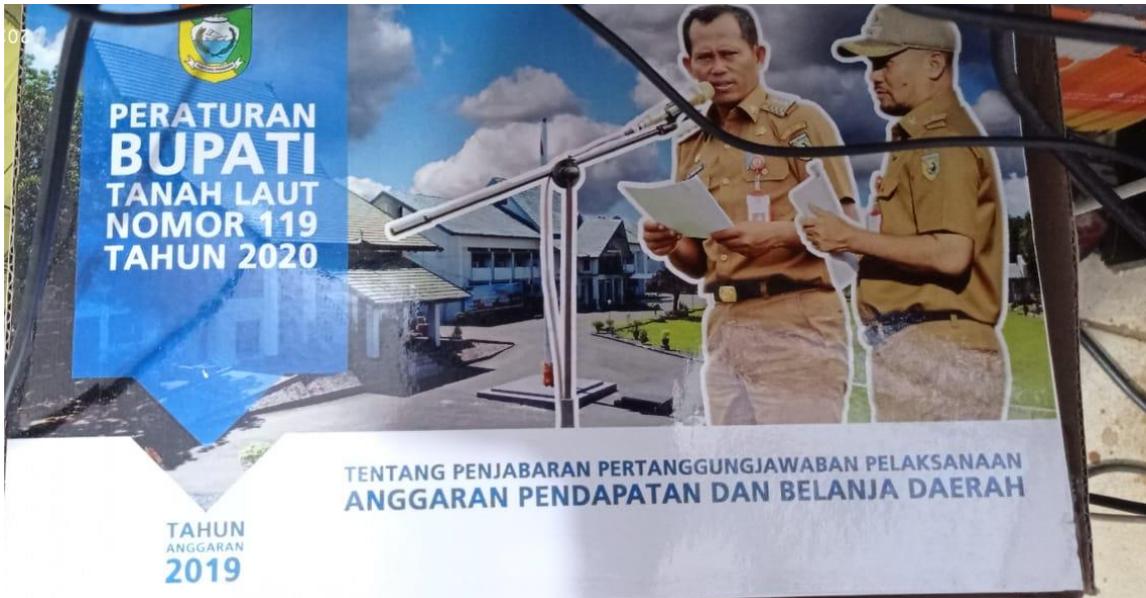


Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019



LKj BPKAD TAHUN 2020

Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019



Laporan SIKD



Rapat Pembahasan Langkah-Langkah Akhir Tahun



Sosialisasi Langkah-Langkah Akhir Tahun



5.2). Eselon IV. A 1 (Kasubbid Akuntansi Pendapatan dan Piutang)

Untuk mendukung Sasaran strategis No 5 yang menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Penatausahaan Aset diatas dilaksanakan oleh Kasubbid Akuntansi Pendapatan dan Piutang yaitu dengan melaksanakan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam DPA Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah ditandatangani.

Untuk menggambarkan kinerja Kasubbid Akuntansi Pendapatan dan Piutang Tahun 2020 sesuai dengan Program dan Kegiatan serta Perjanjian Kinerja yaitu berupa tabel pencapaian beserta analisisnya dapat diuraikan dibawah ini.

Tabel Pencapaian Program dan Kegiatan Tahun 2020 Kasubbid Pendapatan dan Piutang

Program/Kegiatan	Output dalam DPA	Target Kinerja	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi			
				Fisik		Keuangan	
				Kinerja	%	Rp	%
Program Peningkatan Penerapan Akuntansi dan Pelaporan. 4. Pengelolaan akuntansi pendapatan dan piutang	Tersedianya Laporan Rekonsiliasi Bendahara Penerimaan, Data Piutang Daerah dan Data TP TGR	3 Dokumen	155.164.000	3 Dokumen	100	153.053.800	98,64

Tabel Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Kasubbid Pendapatan dan Piutang

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Melaksanakan Rekonsiliasi pendapatan dan piutang sesuai ketentuan	Jumlah SKPD pengelola Pendapatan dan Piutang yang telah melakukan rekonsiliasi sesuai ketentuan	26 SKPD	26 SKPD	100 %
2	Melaksanakan Pembinaan Bendahara Penerimaan SKPD sesuai ketentuan	Jumlah Bendahara Penerimaan yang terbina dan memahami mekanisme pelaporan keuangan sesuai ketentuan	26 Bendahara Penerimaan	26 Bendahara Penerimaan	100 %
3	Melaksanakan fasilitasi terhadap stakeholder dalam penyelesaian kerugian daerah sesuai ketentuan	Jumlah stakeholder yang difasilitasi dalam penyelesaian kerugian daerah sesuai ketentuan	10 SKPD	10 SKPD	100 %
4	Melaksanakan monitoring SKPD yang mengelola pendapatan PPKD dan piutang sesuai ketentuan	Jumlah SKPD yang termonitoring pendapatan PPKD dan piutang sesuai ketentuan	26 SKPD	26 SKPD	100 %
5	Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Pendapatan dan Piutang Pemkab sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pendapatan dan Piutang Pemkab hasil konsolidasi sesuai ketentuan	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %

Analisis Pencapaian Kinerja Program Kegiatan dan Perjanjian Kinerja tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Terlaksananya Program dan Kegiatan Tahun 2020 dengan pagu APBD murni Rp 177.607.000 namun pada APBD Perubahan menjadi sebesar Rp 155.164.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 153.053.800 atau capaian sebesar 98,64% dan realisasi fisik sebesar 100%.
- b. Jumlah 3 (Tiga) Dokumen Laporan Keuangan Pendapatan dan Piutang Tahun 2019 yang telah dilaksanakan 100% dengan rincian yaitu :
 - 1). Dokumen Laporan Keuangan Pendapatan dan Piutang Pemda Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 (Unaudit)
 - 2). Dokumen Laporan Keuangan Pendapatan dan Piutang Tahun 2019 (Audited).
 - 3). Dokumen Daftar Piutang Daerah, Investasi Non Permanen lainnya dan Pendapatan diterima dimuka Pemda Kabupaten Tanah Laut.
- c. Jumlah SKPD pengelola Pendapatan dan Piutang yang telah melakukan rekonsiliasi sesuai ketentuan
Rekonsiliasi pendapatan dan piutang yang dilaksanakan dengan mengundang Bendahara Penerimaan se-Kabupaten Tanah Laut berjumlah 26 (dua puluh enam) SKPD sebanyak 4 kali (per-triwulan) yaitu Triwulan IV TA.2019, Triwulan I TA.2020, Triwulan II TA.2020, dan Triwulan III TA.2020. Realisasi Hasil Rekonsiliasi Pendapatan dan Piutang sebanyak 4 (empat) dokumen, sesuai target.
- d. Jumlah Bendahara Penerimaan yang terbina dan memahami mekanisme pelaporan keuangan sesuai ketentuan.

Melaksanakan pembinaan terhadap Bendahara Penerimaan dari 26 (dua puluh enam) SKPD dilaksanakan monitoring penginputan pendapatan ke dalam Aplikasi SIMDA Keuangan.

- e. Fasilitasi dalam penyelesaian kerugian daerah terhadap stakeholder yang terkait dengan kerugian daerah tahun 2020 dengan diselenggarakannya Rapat-rapat Penyelesaian Kerugian Daerah yang dilaksanakan Tim penyelesaian kerugaian daerah dan Sekretraiat Tim penyelesaian kerugian daerah serta SKPD yang terkait dengan kerugian daerah sebanyak 10 stakeholder yaitu 1. Sekretariat Daerah 2. BPKAD 3. Bapenda 4. Inspektorat 5. Dinas PUPRP 6. Sekretariat DPRD 7. Dinas Koperasi dan Perdagangan 8. Dinas Kesehatan (PKM Angsau) 9. DPRKPLH 10. Kecamatan Pelaihari.
- f. Jumlah SKPD yang termonitoring pendapatan dan piutang sesuai ketentuan. Melaksanakan monitoring pendapatan dilakukan dengan melakukan pembinaan dan monitoring terhadap 26 (dua puluh enam) SKPD yang menangani pendapatan daerah.

Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

a. Permasalahan

Masih ada beberapa Bendahara Penerimaan SKPD yang belum memahami Simda Keuangan dikarenakan ada pergantian bendahara penerimaan, input data penerimaan oleh pembantu bendahara penerimaan atau pegawai PTT, sehingga bila ada kesalahan inputan data yang ditemukan oleh Bidang Akuntansi BPKAD akan kesulitan menjelaskan perbedaaan data/kesalahan input data Antara Simda Keuangan dengan Rekening Koran Kas Daerah. Di samping itu kendala yang dihadapi oleh Bendahara Penerimaan dalam penginputan pendapatan adalah pada waktu menginput pendapatan untuk pengurangan piutang.

Upaya Pemecahan Masalah

- Memberikan pembinaan kepada Bendahara Penerimaan tersebut agar bisa memahami inputan data penerimaan pada Simda Keuangan.
- Pemberian penghargaan kepada bendahara penerimaan terbaik yang mengelola pendapatan berdasarkan kriteria penilaian antara lain kepatuhan, ketepatan waktu, tidak mendapat sangsi disiplin, tingkat kehadiran, beban kerja, responsif dan komunikatif.

Rencana Aksi

- Melakukan pendataan terhadap Bendahara Penerimaan yang belum memahami Simda Keuangan;
- Melakukan diskusi dan koordinasi permasalahan input data penerimaan pada Simda Keuangan;
- Memberikan bantuan pendampingan pembelajaran pemahaman Simda Keuangan kepada Bendahara Penerimaan.

Foto-foto hasil kegiatan yang dicapai Kasubbid Akuntansi Pendapatan dan Piutang

1). Dokumen Pendapatan dan Piutang Tahun 2020



1. FGD PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN



2. RAPAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH



3. PEMANTAUAN KERUGIAN DAERAH OLEH BPK RI PERWAKILAN KALIMANTAN SELATAN



4. RAPAT PENILAIAN BENDAHARA PENERIMAAN TERBAIK



5. PENYERAHAN HADIAH BENDAHARA PENERIMAAN TERBAIK



1. REKON PENDAPATAN DAN PIUTANG



2. PENYERAHAN OPINI WTP OLEH BPK RI



5.3). Eselon IV. A1 (Kasubbid Akuntansi Belanja dan Beban)

Untuk mendukung Sasaran strategis No 5 yang menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Penatausahaan Aset diatas dilaksanakan oleh Kasubbid Akuntansi Belanja dan Beban yaitu dengan melaksanakan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam DPA Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah ditandatangani.

Untuk menggambarkan kinerja Kasubbid Akuntansi Belanja dan Beban Tahun 2020 sesuai dengan Program dan Kegiatan serta Perjanjian Kinerja yaitu berupa tabel pencapaian beserta analisisnya dapat diuraikan dibawah ini.

Tabel Pencapaian Program Kegiatan Tahun 2020 Kasubbid Akuntansi Belanja dan Beban

Program/Kegiatan	Output dalam DPA	Target Kinerja	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi			
				Fisik		Keuangan	
				Kinerja	%	Rp	%
Program Peningkatan Penerapan Akuntansi dan Pelaporan. 5. Pengelolaan akuntansi belanja dan beban.	Tersedianya Laporan Rekonsiliasi Triwulanan, Laporan Keuangan Belanja dan Beban, Laporan DAK Fisik dan Laporan DAK Non Fisik	5 Dokumen	Rp. 170.357.620	5 Dokumen	100	Rp. 169.273.600	99,36

Program/Kegiatan	Output dalam DPA	Target Kinerja	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi			
				Fisik		Keuangan	
				Kinerja	%	Rp	%
Program Peningkatan Penerapan Akuntansi dan Pelaporan. 6. Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD, Laporan Keuangan semesteran dan Prognosis realisasi anggaran, serta laporan keuangan akhir tahun.	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Prognosis dan siklus laporan Keuangan Akhir Tahun anggaran berkenaan	4 Dokumen	Rp. 20.263.820	4 Dokumen	100	Rp. 19.357.800	95,53

Tabel Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Kasubbid Akuntansi Belanja & Beban

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1. Melaksanakan Rekonsiliasi belanja dan beban sesuai ketentuan	1. Jumlah SKPD pengelola belanja dan beban yang telah melakukan rekonsiliasi sesuai ketentuan	40 SKPD	40 SKPD	100%
2. Melaksanakan Pembinaan Bendahara	2. Jumlah Bendahara Pengeluaran SKPD yang	40 Bendahara Pengeluaran	40 Bendahara Pengeluaran	100%

Pengeluaran SKPD sesuai ketentuan	terbina dan memahami mekanisme pelaporan keuangan sesuai ketentuan			
3. Melaksanakan Pembinaan terhadap SKPD penerima DAK sesuai ketentuan	3. Jumlah SKPD yang telah dibina dan memahami mekanisme teknis penyaluran DAK Fisik dan Non Fisik sesuai ketentuan	16 SKPD	16 SKPD	100%
4. Melaksanakan monitoring SKPD yang mengelola belanja dan beban sesuai ketentuan	4. Jumlah SKPD yang termonitoring belanja dan beban sesuai ketentuan	40 SKPD	40 SKPD	100%
5. Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Belanja, Beban dan Aset Pemkab sesuai ketentuan	5. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Belanja, Beban dan Aset Pemkab sesuai ketentuan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
6. Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran, DAK Fisik dan DAK Non Fisik atas Realisasi Keuangan Pemkab sesuai ketentuan	6. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran, DAK Fisik dan DAK Non Fisik atas Realisasi Keuangan hasil konsolidasi sesuai ketentuan	5 Dokumen	5 Dokumen	100%

Analisis Pencapaian kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Kasubbid Akuntansi Belanja dan Beban yaitu sebagai berikut :

A. Program Peningkatan Penerapan Akuntansi dan Pelaporan, Kegiatan Pengelolaan akuntansi belanja dan beban. Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Kasubbid Akuntansi Belanja dan Beban dengan Pagu Anggaran Murni sebesar Rp 248.399.940,-, namun pada APBD Perubahan berkurang menjadi Rp 170.357.620,- dikarenakan adanya Refocusing dan sampai akhir tahun telah terealisasi sebesar Rp 169.273.600,- atau dengan capaian sebesar 99,36%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 1.084.020,- atau sebesar 0,64%

Sedangkan target kinerja yaitu 5 Dokumen (Laporan DAK Fisik, Laporan DAK Non Fisik, Laporan Unaudit, Laporan Audited dan Laporan Hasil

Kegiatan) yang ditargetkan telah tercapai seluruhnya 5 Dokumen, sehingga realisasi capaian kinerja fisik tercapai 100%.

- B. Program Peningkatan Penerapan Akuntansi dan Pelaporan, Kegiatan Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD, Laporan Keuangan semesteran dan Prognosis realisasi anggaran, serta laporan keuangan akhir tahun. Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Kasubbid Akuntansi Belanja dan Beban dengan Pagu Anggaran Murni sebesar Rp 24.599.720,-, namun pada APBD Perubahan berkurang menjadi Rp 20.263.820,- dikarenakan adanya Refocusing dan sampai akhir tahun telah terealisasi sebesar Rp 19.357.800,- atau dengan capaian sebesar 95,53%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 906.020,- atau sebesar 4,47%

Sedangkan target kinerja yaitu 4 Dokumen (Lap Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Semesteran dan Laporan Hasil Rekonsiliasi Keuangan) yang ditargetkan telah tercapai seluruhnya 4 Dokumen, sehingga realisasi capaian kinerja fisik tercapai 100%.

- C. Analisis Capaian Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

- 1). Terlaksananya rekonsiliasi keuangan dari triwulan IV TA. 2019 sampai dengan triwulan III TA 2020 sebanyak 4 kegiatan dan rekonsiliasi belanja modal 2 kegiatan terhadap 40 SKPD.
- 2). Terlaksananya pembinaan, monitoring, koordinasi dan konsultasi terkait permintaan data maupun tentang penyusunan laporan keuangan rutin SKPD serta kendalanya kepada 40 Bendahara Pengeluaran.
- 3). Terlaksananya kegiatan Foccus Group Discussion terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik kepada 16 SKPD penerima DAK Fisik dan DAK Non Fisik (BPKAD selaku PPKD), Disnakerind, DPUPRP, Dinas Pendidikan, Distanhorbun, DKPP, DPRKPLH, Dinas Kesehatan, DP2KBP3A, Disdukcapil, Diskopdag).

- 4). Terlaksananya pembinaan, monitoring, koordinasi dan konsultasi terkait permintaan data maupun tentang penyusunan laporan keuangan rutin SKPD serta kendalanya terhadap 40 SKPD.
- 5). Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan Belanja, Beban dan Aset Pemkab sebanyak 4 dokumen yaitu Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Semesteran dan Laporan Hasil Rekonsiliasi Keuangan.
- 6). Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran, DAK Fisik dan DAK Non Fisik atas Realisasi Keuangan sebanyak 5 dokumen yaitu Laporan DAK Fisik, Laporan DAK Non Fisik, Laporan Unaudit, Laporan Audited dan Laporan Hasil Kegiatan.
- 7). Terlaksananya pemilihan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus Barang Terbaik berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 191 Tahun 2019 tentang Penghargaan Kepada Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus Barang Terbaik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

A. Kendala/Permasalahan yang dihadapi

- 1) Laporan disusun setelah mendapatkan tanda tangan pimpinan, mengakibatkan proses penjilidan tidak tetap waktu,
- 2). Masih ada bendahara pengeluaran ketika rekonsiliasi, jadwalnya tidak sesuai waktu yang telah ditentukan,
- 3). Masih banyak bendahara yang belum paham tentang cara penjurnalan asset,
- 4). Kurangnya kerjasama antara PPTK, bendahara pengeluaran dan pengurus barang sehingga menghambat penyusunan LKPD.

B. Rencana Aksi yang akan dilakukan dalam rangka upaya perbaikan

- 1). Melakukan koordiansi dengan pimpinan terkait penandatanganan laporan,

- 2). Mengingatkan kembali bendahara pengeluaran yang dianggap selalu lalai dalam pelaksanaan rekon,
- 3). Dilakukan pembinaan terhadap SKPD terkait langkah-langkah penjurnalan asset,
- 4) Melaksanakan pendekatan kepada PPTK, bendahara pengeluaran dan pengurus barang agar laporan disampaikan tepat waktu agar tidak menghambat penyusunan LKPD.

2. Foto-Foto Kegiatan Kasubbid Belanja dan Beban

- 1). Laporan Bulanan



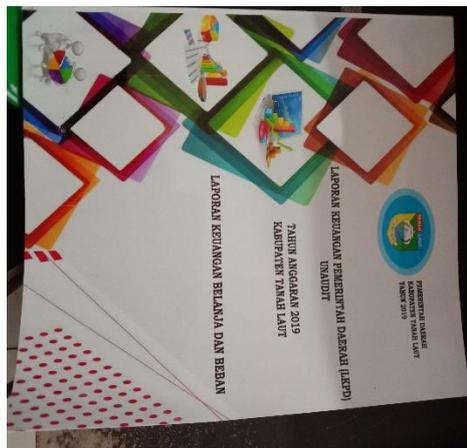
- 2). Laporan Triwulanan



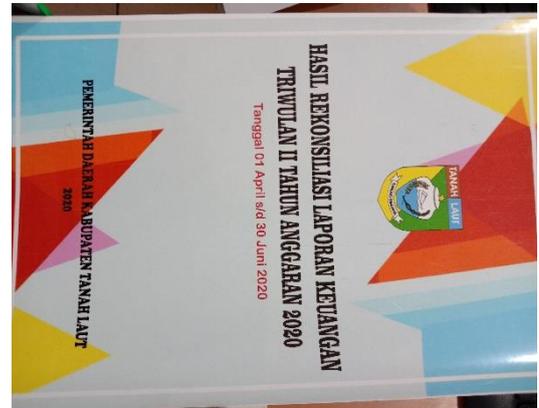
3). Laporan Semesteran



4).Laporan Penyusunan Belanja dan Beban



5) Laporan Hasil Rekonsiliasi Keuangan



6) Laporan DAK Fisik dan DAK Non Fisik



7) Pelaksanaan Rekonsiliasi Keuangan Triwulan





8) Pelaksanaan Rekonsiliasi Belanja Modal



9) Pelaksanaan Focus Group Discussion



10) Pelaksanaan Rapat



6.ESELON III.B (Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset)

2.1.6. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 6

Sasaran Strategis nomor 6 adalah menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset atau Pejabat Eselon III.B sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Pohon Kinerja SKPD yang telah ditandatangani.

Sasaran strategis nomor 6 adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset dengan tabel pencapaian sebagai berikut :

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6
Meningkatnya kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
6	Meningkatnya kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan	6	Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai ketentuan	%	100	100	100	87	100	114,95	89	30	33,70
		7	Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	0	0
		8	Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	150	150
			Rata-rata capaian kinerja				100,00			104,99			61,23

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran strategis Meningkatnya kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan dengan indikator sasaran Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai ketentuan, Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan dan Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan pada tahun 2019 ini capaian kinerjanya melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 104,99% dari tahun 2018 terdapat peningkatan kinerja sebesar 4,99%. Namun pada tahun 2020 ini capaian kinerja mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya kendala pandemi Covid 19, sehingga untuk indikator sasaran strategis no 6 yaitu presentase BMD (Tanah) yang memiliki sertifikat sesuai ketentuan hanya tercapai 30% dari target sebesar 89%, atau capaian sebesar 33,70 hal ini dikarenakan Pihak BPN juga terkendala adanya pandemi covid 19 pada tahun 2020 ini, kemudian indikator sasaran strategis no 7 yaitu Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan tidak tercapai atau 0% dikarenakan pelaksanaan pengajuan permohonan duplikasi BPKB BMD (Kendaraan Bermotor) dari target 4 buah, realisasi 0 buah (tidak dapat realisasi). Pengajuan permohonan duplikasi BPKB kendaraan dinas bermotor tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya Refocusing Anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19. sehingga kedua sasaran Kepala Bidang PPA tersebut tidak tercapai targetnya atau mengalami penurunan kinerja. Namun pada indikator

sasaran strategis no 8 milik Kepala Bidang PPA mengalami kenaikan capaian pada tahun 2020 yaitu sebesar 150%, hal ini dikarenakan dari target BMD sebesar 10 telah tercapai sebesar 15 yang dipelihara, sehingga dari tahun sebelumnya mengalami peningkatan kinerja sebesar 50%. Sehingga secara keseluruhan untuk sasaran strategis no 6 Kepala Bidang PPA pada tahun 2020 capaian kinerjanya mengalami penurunan kinerja sebesar 61,23%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 6 Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset ini dilaksanakan oleh Kasubbid Pengamanan dan Pemeliharaan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2020 dengan penjelasan dibawah ini.

6.1). ESELON IV.A1 (Kasubbid Pengamanan dan Pemeliharaan)

Untuk mendukung Sasaran strategis No 6 yang menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset diatas dilaksanakan oleh Kasubbid Pengamanan dan Pemeliharaan yaitu dengan melaksanakan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam DPA Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah ditandatangani.

Untuk menggambarkan kinerja Kasubbid Pengamanan dan Pemeliharaan Tahun 2020 sesuai dengan Program dan Kegiatan serta Perjanjian Kinerja yaitu berupa tabel pencapaian beserta analisisnya dapat diuraikan dibawah ini.

Tabel Pencapaian Program dan Kegiatan sesuai DPA Tahun Anggaran 2020

Program & Kegiatan	Pagu Anggaran		Realisasi	Capaian
	Murni	Perubahan		
Program peningkatan pemanfaatan dan pengendalian Aset Daerah Kegiatan Peningkatan manajemen asset /	Rp. 1.204.605.000	Rp. 1.265.414.530	Rp. 1.127.729.150	89,12%

barang daerah				
---------------	--	--	--	--

Indikator	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja		Realisasi	Capaian
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
Keluaran	Jumlah penyelesaian penyertifikatan	Jumlah penyelesaian penyertifikatan	1 persil	1 persil	1 persil	100%
Keluaran	Jumlah permohonan penyertifikatan	Jumlah permohonan penyertifikatan	60 permohonan	30 permohonan	10 permohonan	33,33%
Keluaran	Jumlah permohonan pembuatan BPKB duplikat	Jumlah permohonan pembuatan BPKB duplikat	4 permohonan	0 permohonan	0 permohonan	0%
Keluaran	Jumlah pembuatan papan nama kepemilikan TMD	Jumlah pembuatan papan nama kepemilikan TMD	30 buah papan nama kepemilikan TMD	0 buah papan nama kepemilikan TMD	0 buah papan nama kepemilikan TMD	0%
Keluaran	Jumlah pembuatan patok tanda batas TMD	Jumlah pembuatan patok tanda batas TMD	60 buah patok tanda batas TMD	0 buah patok tanda batas TMD	0 buah patok tanda batas TMD	0%
Keluaran	Jumlah pelaksanaan rehab rumah	Jumlah pelaksanaan rehab rumah	1 buah rumah dinas	0 buah rumah dinas	0 buah rumah dinas	0%

	dinas PPKD	dinas PPKD				
Keluara n	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas bermotor PPKD	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas bermotor PPKD	5 buah kendaraan dinas bermotor PPKD	5 buah kendaraan dinas bermotor PPKD	5 buah kendaraan dinas bermotor PPKD	100%
Keluara n	Jumlah buku rekonsiliasi realisasi pemeliharaan BMD	Jumlah buku rekonsiliasi realisasi pemeliharaan BMD	3 buku rekapitulasi realisasi pemeliharaan	3 buku rekapitulasi realisasi pemeliharaan	3 buku rekapitulasi realisasi pemeliharaan	100%
Keluara n	-	Jumlah pengadaan kendaraan dinas bermotor	-	2 buah kendaraan dinas bermotor	2 buah kendaraan dinas bermotor	100%

Tabel Pencapaian Perjanjian Kinerja Target dan Realisasi Tahun Anggaran 2020

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1. Melaksanakan pengajuan permohonan	1. Jumlah BMD (Tanah) yang telah memenuhi	60 persil	10 persil	16,66%

penyertifikatan BMD (tanah) sesuai ketentuan	persyaratan penyertifikatan sesuai ketentuan			
2. Melaksanakan pengajuan permohonan duplikasi BPKB BMD (Kendaraan Bermotor) sesuai ketentuan	2. Jumlah BMD (Kendaraan Bermotor) yang telah memenuhi persyaratan Duplikasi BPKB sesuai ketentuan	4 buah BMD	0 buah	0%
3. Melaksanakan Rekonsiliasi/Verifikasi Pemeliharaan BMD sesuai ketentuan	3. Jumlah SKPD yang melakukan rekonsiliasi/verifikasi pemeliharaan BMD sesuai ketentuan	41 SKPD	41 SKPD	100%
4. Melaksanakan Penelusuran BMD yang Belum Jelas Lokasinya sesuai ketentuan	4. Jumlah BMD yang ditelusuri sesuai ketentuan	30 lokasi penelusuran	7 lokasi	23,33%
5. Melaksanakan Pemeliharaan BMD-PPKD sesuai ketentuan	5. Jumlah BMD-PPKD yang dipelihara sesuai ketentuan	10 buah BMD	15 buah BMD	150%
6. Melaksanakan Penguasaan Fisik BMD-PPKD sesuai ketentuan	6. Jumlah BMD-PPKD yang dikuasai fisiknya sesuai ketentuan	30 buah BMD	0 buah	0%
7. Melaksanakan monitoring BMD yang	7. Jumlah BMD yang dikuasai	50 kali	61 kali	122%

dikuasai sesuai ketentuan	dimonitoring sesuai ketentuan			
---------------------------	-------------------------------	--	--	--

Analisis Pencapaian Program / Kegiatan dan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah dilaksanakan oleh Kasubbid Pengamanan dan Pemeliharaan :

- A. Program peningkatan pemanfaatan dan pengendalian Aset Daerah, Kegiatan Peningkatan manajemen asset / barang daerah Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Kasubbid Pengamanan dan Pemeliharaan dengan Pagu Anggaran Murni sebesar Rp 1.204.605.000,-, namun pada APBD Perubahan bertambah menjadi Rp 1.265.414.530,- dikarenakan adanya pengadaan mobil dan sampai akhir tahun telah terealisasi sebesar Rp 1.127.729.150,- atau dengan capaian sebesar 89,12%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 137.685.380,- atau sebesar 10,88%
- B. Sedangkan capaian target kinerja dan realisasi dapat dijelaskan sbb :
- 1). Terlaksananya pengamanan hukum tanah milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berupa pengajuan permohonan penyertifikatan BMD (Tanah) Milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dari target sebesar 60 permohonan penyertifikatan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2020 namun dikarenakan adanya Refocusing Anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19 target dikurangi menjadi 30 permohonan penyertifikatan, realisasi sebanyak 10 permohonan penyertifikatan yang sudah dimasukkan ke Kantor Pertanahan Kab. Tanah Laut. Permohonan penyertifikatan tersebut meliputi tanah yang berlokasi di :
 - a) Kecamatan Takisung sebanyak 2 lokasi yaitu tanah peruntukkan SMPN 4 Takisung dan SDN Pagatan Besar 1 (Filial)
 - b) Kecamatan Kintap sebanyak 2 lokasi yaitu tanah peruntukkan SMPN 3 Kintap dan SDN Muara Kintap 3

- c) Kecamatan Bati-Bati sebanyak 3 lokasi yaitu tanah peruntukkan SMPN 6 Bati-Bati, SDN Pandahan 1 dan SDN Bentok Darat 3
- d) Kecamatan Jorong sebanyak 2 lokasi yaitu tanah peruntukkan Jalan Lingkungan Ponpes Babussalam (Asrama Perempuan) dan Jalan Lingkungan Ponpes Babussalam (Asrama Laki-laki)
- e) Kecamatan Tambang Ulang sebanyak 1 lokasi yaitu tanah peruntukkan SMPN 2 Tambang Ulang

Dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 pihak Kantor Pertanahan Kab. Tanah Laut menutup semua pendaftaran pembuatan penyertifikatan tanah termasuk tidak dapat menerima 20 permohonan penyertifikatan tanah dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, namun Kantor Pertanahan Kab. Tanah Laut menyelesaikan penyelesaian penyertifikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dari Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 yang berjumlah 278 permohonan. Pada tanggal 19 Juni 2020 Kantor Pertanahan Kab. Tanah Laut telah menyelesaikan penyertifikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebanyak 117 persil tanah dan telah menerbitkan 103 sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Pada tanggal 17 Nopember 2020 Kantor Pertanahan Kab. Tanah Laut kembali menyelesaikan penyertifikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebanyak 161 persil tanah dan telah menerbitkan 148 sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

- 2). Pelaksanaan pengajuan permohonan duplikasi BPKB BMD (Kendaraan Bermotor) dari target 4 buah, realisasi 0 buah (tidak dapat realisasi). Pengajuan permohonan duplikasi BPKB kendaraan dinas bermotor tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya Refocusing Anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19.
- 3). Terlaksananya rekonsiliasi pengamanan dan pemeliharaan BMD yang dilakukan terhadap 41 SKPD dan dilaksanakan sebanyak 5 kali di Tahun Anggaran 2020.

- 4). Terlaksananya Pengamanan Tanah Milik Daerah berupa penelusuran tanah milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang tercatat dineraca aset namun belum jelas lokasinya, dari target 30 lokasi tanah yang belum dijelas lokasinya 7 lokasi tanah sudah ditemukan lokasinya. Tidak tercapainya target dalam penelusuran tanah milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang tercatat dineraca aset namun belum jelas lokasinya dikarenakan pihak ketiga yang tidak dapat membantu karena kondisi Pandemi Covid-19.
- 5). Terlaksananya pemeliharaan BMD-PPKD dari target 10 buah BMD, realisasi pemeliharaan BMD-PPKD berupa bangunan gedung rumah dinas milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebanyak 10 unit rumah dinas dan pemeliharaan BMD-PPKD berupa kendaraan dinas sebanyak 5 unit kendaraan dinas.
- 6). Pelaksanaan Penguasaan Fisik BMD-PPKD / Pengamanan Fisik atas Tanah Milik Daerah berupa Pengadaan Papan Nama Kepemilikan dan Patok Tanda Batas Tanah dari target 30 buah BMD realisasi 0 buah BMD (tidak dapat realisasi). Pelaksanaan Penguasaan Fisik BMD-PPKD / Pengamanan Fisik atas BMD berupa Pengadaan Papan Nama Kepemilikan dan Patok Tanda Batas Tanah tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya Pengurangan Anggaran / Refocusing Anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19.
- 11) Terlaksananya monitoring pengamanan BMD yang tersebar di 11 kecamatan dari target 50 kali realisasi sebanyak 61 kali.
- 12) Pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 telah dilaksanakan pengadaan kendaraan dinas bermotor roda 4 sebanyak 2 buah yaitu 1 buah Jenis Double Cabin dan 1 buah jenis minibus.

Kendala/Permasalahan yang dihadapi

- 1). Kondisi Pandemi Covid-19 yang merebak di Kabupaten Tanah Laut.
- 2). Anggaran terbatas karena adanya Refocusing Anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19.

- 3). Banyaknya jumlah aset yang besar dan lokasi yang menyebar di 11 kecamatan, sehingga memerlukan waktu dan SDM yang lebih.
- 4). Adanya ancaman/tekanan dari pihak ketiga/masyarakat dalam pengamanan aset.
- 5). Kurangnya kerjasama masyarakat dalam melengkapi berkas administrasi pengamanan.

Rencana Aksi yang akan dilakukan dalam rangka upaya perbaikan

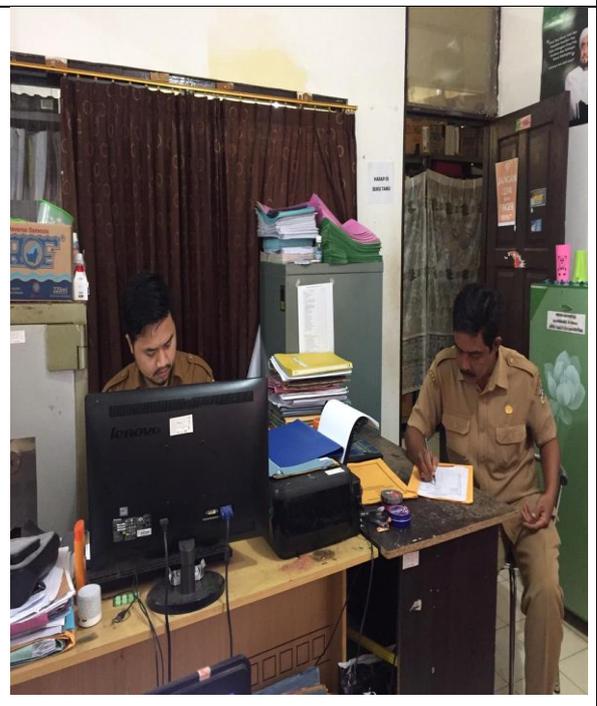
- 1). Kembali mengajukan permohonan penambahan anggaran
- 2). Membuat permohonan penambahan SDM serta meningkatkan kinerja SDM yang sudah ada.
- 3). Membuat permohonan petugas keamanan ke instansi terkait dalam melaksanakan pengamanan aset.
- 4). Melaksanakan pendekatan/sosialisasi kepada pihak ketiga/masyarakat dalam tertib administrasi kelengkapan berkas pengamanan BMD.

Foto-Foto Kegiatan yang dilaksanakan Kasubbid Pengamanan dan Pemeliharaan

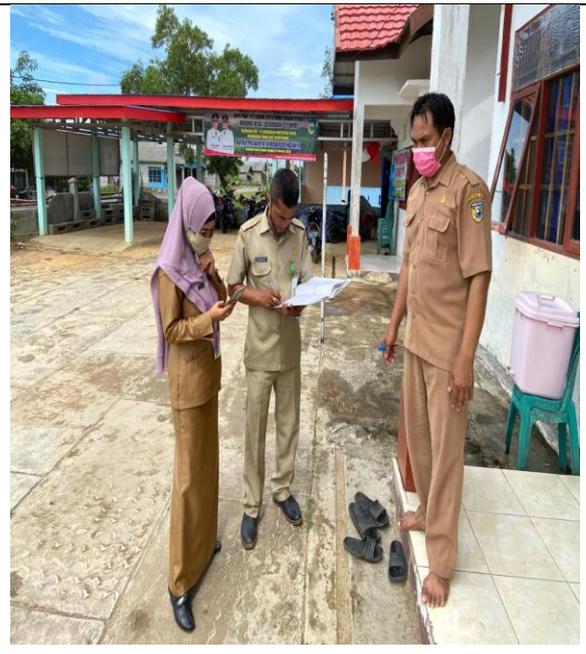
1). Melaksanakan pengajuan permohonan penyertifikatan tanah



2). Melaksanakan rekonsiliasi/verifikasi Pemeliharaan BMD



3). Melaksanakan Penelusuran BMD yang belum jelas lokasinya



4). Melaksanakan Pemeliharaan BMD-PPKD



5). Melaksanakan Monitoring BMD yang dikuasai



6). Melaksanakan Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4



6.ESELON III.B (Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset)

2.1.7. Analisa_Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 7

Sasaran Strategis nomor 7 adalah menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset atau Pejabat Eselon III.B sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Pohon Kinerja SKPD yang telah ditandatangani

Sasaran strategis nomor 7 adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset dengan tabel pencapaian sebagai berikut :

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7
Meningkatnya kualitas penyusunan RKBMD sesuai ketentuan

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
7	Meningkatnya kualitas penyusunan RKBMD sesuai ketentuan	9	Persentase RKBMD SKPD sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Rata-rata capaian kinerja				100.00			100.00			100.00

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran strategis Meningkatnya kualitas penyusunan RKBMD sesuai ketentuan dengan indikator sasaran Persentase RKBMD SKPD sesuai ketentuan yang telah dipelihara sesuai ketentuan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 7 Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset ini dilaksanakan oleh Kasubbid Perencanaan Kebutuhan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2020 dengan penjelasan dibawah ini.

6.2). ESELON IV.A1 (Kasubbid Perencanaan Kebutuhan)

Untuk mendukung Sasaran strategis No 7 yang menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset diatas dilaksanakan oleh Kasubbid Perencanaan Kebutuhan yaitu dengan melaksanakan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam DPA Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah ditandatangani.

Untuk menggambarkan kinerja Kasubbid Perencanaan Kebutuhan Tahun 2020 sesuai dengan Program dan Kegiatan serta Perjanjian Kinerja yaitu berupa tabel pencapaian beserta analisisnya dapat diuraikan dibawah ini.

Tabel Program dan Kegiatan sesuai DPA Tahun Anggaran 2020

Program & Kegiatan	Pagu Anggaran		Realisasi	Capaian
	Murni	Perubahan		
Program peningkatan pemanfaatan dan pengendalian Aset Daerah Kegiatan Perencanaan dan pengadaan asset daerah	Rp 177.607.000	Rp 697.108.500	Rp 686.181.600	98,43%

Indikator	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja		Realisasi	Capaian %
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
Keluaran	Jumlah dokumen buku SSH TA.2021	Jumlah dokumen buku SSH TA.2021	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%
Keluaran	Jumlah dokumen RKBMD TA.2020 Perubahan dan TA.2021	Jumlah dokumen RKBMD TA.2020 Perubahan dan TA.2021	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%
Keluaran	Jumlah dokumen Laporan TW barang persediaan	Jumlah dokumen Laporan TW barang persediaan	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%
Keluaran	Jumlah dokumen Laporan Stock Opname	Jumlah dokumen Laporan Stock Opname	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%
Keluaran	Jumlah dokumen Peraturan Bupati	Jumlah dokumen Peraturan Bupati	2 perbup	2 perbup	2 perbup	100%
Keluaran	'-	Jumlah Unit Mobil Sewa	'-	32 unit	32 unit	100%

Tabel Capaian Perjanjian Kinerja Target dan Realisasi Tahun Anggaran 2020

No	Kinerja Utama	Indikator Utama	Target	Realisasi 2020	Capaian 2020
1.	Melaksanakan penyusunan RKBMD sesuai ketentuan	Jumlah SKPD yang melakukan penyusunan RKBMD sesuai ketentuan	40 SKPD	40 SKPD	100%
2.	Melaksanakan penyusunan Standar Satuan Harga sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Buku SSH sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	100%
3.	Melaksanakan Pembuatan Standar Kebutuhan Barang sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Buku Standar Kebutuhan Barang sesuai ketentuan	40 dokumen	40 dokumen	100%
4.	Melaksanakan Rekonsiliasi/ Verifikasi Barang Pakai Habis sesuai ketentuan	Jumlah SKPD yang direkonsiliasi/ verifikasi Barang Pakai Habis sesuai ketentuan	40 SKPD	40 SKPD	100%
5.	Melaksanakan Penyusunan Beban Persediaan sesuai ketentuan	Jumlah dokumen Beban Persediaan sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	100%
6	Melaksanakan Sosialisasi Penyusunan RKBMD, Penyusunan Beban Persediaan dan Standar Satuan Harga sesuai ketentuan	Jumlah SKPD yang mengikuti Sosialisasi Penyusunan RKBMD, Penyusunan Beban Persediaan dan Standar Satuan Harga sesuai ketentuan (Sosialisasi Perbup Pengelolaan BMD dan Perbup Sewa Rumah Negara)	40 SKPD	40 SKPD	100%
7	Melaksanakan Monitoring Barang Pakai Habis sesuai ketentuan	Jumlah Barang Pakai Habis SKPD yang telah termonitoring sesuai ketentuan	40 SKPD	40 SKPD	100%

Analisis Pencapaian Program/Kegiatan Tahun 2020 yang telah dilaksanakan Kasubbid Perencanaan Kebutuhan:

- A. Program peningkatan pemanfaatan dan pengendalian Aset Daerah, Kegiatan Kegiatan Perencanaan dan pengadaan asset daerah Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Kasubbid Pengamanan dan Pemeliharaan dengan Pagu Anggaran Murni sebesar Rp 177.607.000,-, namun pada APBD Perubahan bertambah menjadi Rp 697.108.500,- dikarenakan adanya belanja sewa mobil dan sampai akhir tahun telah terealisasi sebesar Rp 686.181.600,- atau dengan capaian sebesar 98,43%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 10.926.900,- atau sebesar 1,57%
- B. Sedangkan capaian target kinerja dan realisasi dapat dijelaskan sbb :
- 1). Terlaksananya Program dan Kegiatan Tahun 2020 dengan pagu APBD murni Rp 177.607.000 namun pada APBD Perubahan menjadi sebesar Rp 697.108.500 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 686.181.600 atau capaian sebesar 98,43%.% dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - 2). Tercapainya penyusunan 1 Dokumen Standar Satuan Harga yang berisi Satuan Harga Perubahan 2020 dan Standar Satuan Harga untuk Tahun 2021 dengan diterbitkannya SK Bupati Tanah Laut Nomor : 188.45/483-KUM/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut.
 - 3) Tersusunnya 2 Dokumen RKBMD yaitu 1. RKBMD Tahun 2021 2. RKBMD Perubahan Tahun 2020
 - 4). Tersusunnya 4 Dokumen Laporan Triwulan Barang Persediaan yaitu Laporan Triwulan Barang Persediaan Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV.
 - 5). Tersusunnya 1 Dokumen Laporan Stok Opname se Kabupaten Tanah Laut .
 - 6) Tersusunnya 2 Perbup tentang pengelolaan BMD yaitu 1). Perbup No 9 Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020 tentang Pemanfaatan BMD

- 2).Perbup No 10 Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020 tentang Rumah Negara
- 7). Dalam rangka efisiensi pemeliharaan kendaraan roda 4 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut ,telah dilaksanakan sewa unit kendaraan roda 4 sebanyak 32 Unit yang diperuntukkan bagi Pejabat Eselon II dan Eselon III pada 6 SKPD yaitu Bappeda, Bapenda, BPKAD, Inspektorat, Setda dan Dinas PUPRP. Melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga sesuai Kontrak Nomor :2100091936-01 dan Nomor :2100091937-01 serta Nomor:027/37/SPK/BPKAD/2020 tanggal 2 November 2020

Analisis Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah dilaksanakan Kasubbid Perencanaan Kebutuhan:

- 1). Terlaksananya penyusunan RKBMD Target 40 SKPD dan Tercapai 40 SKPD atau dengan capaian kinerja 100%. Penyusunan RKBMD terdiri dari RKBMD Perubahan Tahun Anggaran 2020 dan RKBMD Tahun Anggaran 2021. RKBMD SKPD yang disampaikan SKPD sebagai dasar dalam penyusunan RKBMD Kabupaten Tanah Laut, dokumen RKBMD SKPD tersebut yang digunakan sebagai syarat pada waktu verifikasi RKA SKPD.
- 2). Tercapainya penyusunan 1 Dokumen Standar Satuan Harga yang berisi Satuan Harga Perubahan 2020 dan Standar Satuan Harga untuk Tahun 2021 dengan diterbitkannya SK Bupati Tanah Laut Nomor : 188.45/483-KUM/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut. Dokumen SSH dipergunakan pada Aplikasi SIPD sebagai dasar SKPD pada waktu melakukan entry RKA Tahun 2021 se Kabupaten Tanah Laut.
- 3). Tercapainya penyusunan 1 Dokumen Buku Standar Kebutuhan Barang yang seharusnya disusun oleh masing-masing SKPD untuk dijadikan 1 Dokumen, namun yang terjadi dilapangan SKPD tidak melaksanakan karena kendala SDM, sehingga BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang menyusun / membuat Dokumen tersebut, hal ini dikarenakan Dokumen

ini SANGAT PENTING dan akan diminta oleh Auditor pada waktu pemeriksaan.

- 4). Rekonsiliasi / verifikasi Barang Pakai Habis yang dilaksanakan dengan mengundang Pengurus Barang se-Kabupaten Tanah Laut berjumlah 40 SKPD sebanyak 4 kali (per-triwulan) yaitu Triwulan IV TA.2019, Triwulan I TA.2020, Triwulan II TA.2020, dan Triwulan III TA.2020. Realisasi Hasil Rekonsiliasi / verifikasi Barang Pakai Habis terhadap 40 SKPD tercapai 100%.
- 5). Tercapainya penyusunan 1 Dokumen Beban Persediaan se Kabupaten Tanah Laut, dokumen ini dibuat sebagai dasar untuk Rekonsiliasi dengan Bidang Akuntansi pada akhir tahun dalam rangka penyusunan LKPD Kabupaten Tanah Laut.
- 6) Terlaksananya Sosialisasi Penyusunan RKBMD, Penyusunan Beban Persediaan dan Standar Satuan Harga kepada 40 SKPD sebagai Pengguna Barang SKPD.
- 7) Telah dilaksanakan monitoring Barang Pakai Habis SKPD terhadap 40 SKPD Pengguna Barang SKPD.

Kendala/Permasalahan yang dihadapi

- 1). Anggaran yang terbatas karena adanya Refocusing Anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19.
- 2). Adanya amanat Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/763/SJ Tanggal 27 Januari 2020 yang mengisyaratkan percepatan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sehingga diperlukan perubahan terhadap SSH Tahun 2021. Karena data SSH awal yang telah siap adalah data untuk keperluan Aplikasi Simda Keuangan, sehingga mesti dilakukan perubahan dengan mengeluarkan unsur PPN dari Standar Satuan Harga Tahun 2021.
- 3). Kurangnya kesadaran pengurus barang dalam menyusun laporan-laporan aset.

Rencana Aksi yang akan dilakukan dalam rangka upaya perbaikan

- 1). Kembali mengajukan permohonan penambahan anggaran.
- 2). Menyusun Tim penyusunan SSH Tahun 2022 dengan lebih awal.
- 3). Meminta Anggota Tim segera mengidentifikasi keperluan penganggaran untuk Tahun 2022 berikut dengan survey harga barang dan jasa sesegera mungkin.
- 4). Menyandingkan kembali Standar Satuan Harga Tahun 2021 dengan Harga terkini, sehingga sebagian data yang terdahulu dapat digunakan dalam penyusunan Tahun 2022.
- 5) Terus melaksanakan pendekatan/sosialisasi kepada pihak SKPD khususnya pengurus barang dalam tertib administrasi dan pelaporan-pelaporan barang persediaan.

Foto-Foto Kegiatan yang dilaksanakan Kasubbid Perencanaan Kebutuhan

- 1). Melaksanakan penyusunan dokumen SSH Tahun 2021



2). Melaksanakan penyusunan RKBMD Tahun 2021



3). Melaksanakan penyusunan RKBMD Perubahan Tahun 2020



4). Melaksanakan penyusunan laporan persediaan dan beban persediaan



5). Melaksanakan penyusunan laporan stock opname tahun 2019



6). Melaksanakan Penyusunan Perbup tentang Pemanfaatan BMD



7). Melaksanakan Penyusunan Perbup tentang Rumah Negara



6.ESELON III.B (Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset)

2.1.8. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 8

Sasaran Strategis nomor 8 adalah menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset atau Pejabat Eselon III.B sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Pohon Kinerja SKPD yang telah ditandatangani

Sasaran strategis nomor 8 adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset dengan tabel pencapaian sebagai berikut :

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8
Meningkatnya kualitas pemanfaatan BMD sesuai ketentuan

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
8	Meningkatnya kualitas pemanfaatan BMD sesuai ketentuan	10	Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Rata-rata capaian kinerja				100.00			100.00			100.00

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran strategis Meningkatnya kualitas pemanfaatan BMD sesuai ketentuan dengan indikator sasaran Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan sesuai ketentuan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 8 Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset ini dilaksanakan oleh Kasubbid Pemanfaatan dan Penggunaan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2019 dengan penjelasan dibawah ini.

6.3). ESELON IV.A1 (Kasubbid Pemanfaatan dan Penggunaan)

Untuk mendukung Sasaran strategis No 8 yang menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset diatas dilaksanakan oleh Kasubbid Pemanfaatan dan Penggunaan yaitu dengan melaksanakan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam DPA Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah ditandatangani.

Untuk menggambarkan kinerja Kasubbid Pemanfaatan dan Penggunaan Tahun 2020 sesuai dengan Program dan Kegiatan serta Perjanjian Kinerja yaitu berupa tabel pencapaian beserta analisisnya dapat diuraikan dibawah ini.

**TABEL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI DPA TARGET DAN REALISASI
TAHUN 2020**

Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)		Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Murni	Perubahan		
Program Peningkatan Pemanfaatan dan Pengendalian Aset Daerah				
Kegiatan : Pengelolaan Pemanfaatan Aset Daerah	286.838.000,-	126.919.000,-	106.420.000,-	83,85

Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		Realisasi	Capaian
Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
Jumlah dokumen rekonsiliasi pemanfaatan dan penggunaan BMD	Jumlah dokumen rekonsiliasi pemanfaatan dan penggunaan BMD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %
Jumlah dokumen monitoring pemanfaatan dan monitoring penggunaan BMD	Jumlah dokumen monitoring pemanfaatan dan monitoring penggunaan BMD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %
Jumlah dokumen pemanfaatan BMD	Jumlah dokumen pemanfaatan BMD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %
Jumlah dokumen penilaian BMD	Jumlah dokumen penilaian BMD	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 %
Jumlah sosialisasi	Jumlah buku sosialisasi	12 kali	48 buku	48 buku	100 %

pemanfaatan dan penggunaan BMD	pemanfaatan dan penggunaan BMD				
Jumlah dokumen laporan hasil kegiatan	Jumlah dokumen laporan hasil kegiatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %

TABEL PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No.	Kinerja Utama	Indikator Utama	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Melaksanakan penilaian dalam rangka pemanfaatan BMD sesuai ketentuan	1. Jumlah BMD yang dilakukan penilaian untuk dimanfaatkan sesuai ketentuan	5 BMD	0 BMD	0 %
2.	Melaksanakan rekonsiliasi/verifikasi pemanfaatan dan penggunaan BMD sesuai ketentuan	2. Jumlah SKPD yang dilakukan rekonsiliasi/verifikasi pemanfaatan dan penggunaan BMD sesuai ketentuan	41 SKPD	41 SKPD	100%
3.	Melaksanakan monitoring BMD yang dimanfaatkan dan digunakan sesuai ketentuan	3. Jumlah BMD yang dimanfaatkan dan digunakan dimonitoring sesuai ketentuan	60 BMD	60 BMD	100%
4.	Melaksanakan sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan BMD sesuai ketentuan	4. Jumlah Kecamatan yang dilakukan sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan BMD sesuai ketentuan	12 kali	12 kali	100%

Analisis Pencapaian Program dan Kegiatan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

- A. Program peningkatan pemanfaatan dan pengendalian Aset Daerah, Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pemanfaatan Aset Daerah Tahun 2020 yang

dilaksanakan oleh Kasubbid Pemanfaatan dan Penggunaan dengan Pagu Anggaran Murni sebesar Rp 286.838.000,-, namun pada APBD Perubahan berkurang menjadi Rp 126.919.000,- dikarenakan adanya refocusing dan sampai akhir tahun telah terealisasi sebesar Rp 106.420.000,- atau dengan capaian sebesar 83,85%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 20.499.000,- atau sebesar 16,15%

B. Sedangkan capaian kinerja target dan realisasi kinerja adalah sbb :

1. Terlaksananya Rekonsiliasi pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian kegiatan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan rekonsiliasi per tanggal 7 s/d 31 Desember 2019 terhadap 41 (empat puluh satu) SKPD yaitu :

a. tanggal 28 Januari 2020 pada 15 (lima belas) SKPD yaitu :

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Sosial, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Sekretariat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

b. tanggal 29 Januari 2020 pada 13 (tiga belas) SKPD yaitu :

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan, Kecamatan Batu Ampar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Tambang Ulang, Kecamatan Bati-Bati dan Kecamatan Kurau.

- c. tanggal 31 Januari 2020 pada 13 (tiga belas) SKPD yaitu :
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Kabupaten, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pendapatan Daerah, Kecamatan Takisung, RSUD H. Boejasin Pelaihari, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kecamatan Bajuin, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Jorong, Kecamatan Kintap dan Kecamatan Bumi Makmur.
2. Pelaksanaan rekonsiliasi triwulan 1 per tanggal 01 Januari s/d 31 Maret 2020 terhadap 41 (empat puluh satu) SKPD yaitu :
 - a. tanggal 21 April 2020 pada 5 (lima) SKPD yaitu : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dan Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - b. tanggal 24 April 2020 pada 5 (lima) SKPD, yaitu : RSUD H. Boejasin Pelaihari, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .
 - c. tanggal 29 April 2020 pada 5 (lima) SKPD, yaitu : Badan Pendapatan Daerah, Kecamatan Jorong, Kecamatan Takisung, Kecamatan Panyipatan dan Kecamatan Kintap.

- d. tanggal 05 Mei 2020 pada 7 (tujuh) SKPD, yaitu : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Dinas Sosial.
 - e. tanggal 11 Mei 2020 pada 7 (tujuh) SKPD, yaitu : Inspektorat Kabupaten, Kecamatan Bajuin, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan Bumi Makmur, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - f. tanggal 14 Mei 2020 pada 6 (enam) SKPD, yaitu : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Kurau, Sekretariat Daerah dan Kecamatan Bati-Bati.
 - g. tanggal 19 Mei 2020 pada 6 (enam) SKPD, yaitu : Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Batu Ampar, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pariwisata, Kecamatan Tambang Ulang dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Pelaksanaan rekonsiliasi triwulan II per tanggal 01 April s/d 30 Juni 2020 terhadap 41 (empat puluh satu) SKPD yaitu :
- a. tanggal 13 Juli 2020 pada 15 (lima belas) SKPD yaitu : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian,

Sekretariat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Dinas Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- b. tanggal 15 Juli 2020 pada 15 (lima belas) SKPD yaitu : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan, Kecamatan Bati-Bati, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan, RSUD H. Boejasin Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Tambang Ulang, Kecamatan Kurau, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
 - c. tanggal 17 Juli 2020 pada 11 (sebelas) SKPD yaitu : Kecamatan Bumi Makmur, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Takisung, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Kecamatan Jorong, Kecamatan Kintap, Kecamatan Bajuin, Inspektorat Kabupaten, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
4. Pelaksanaan rekonsiliasi triwulan III per tanggal 01 Juli s/d 30 September 2019 terhadap 41 (empat puluh satu) SKPD yaitu :
- a. tanggal 12 Oktober 2020 pada 15 (lima belas) SKPD yaitu : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Komunikasi dan

Informatika, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Sosial, Sekretariat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Pariwisata, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- b. tanggal 15 Oktober 2020 pada 15 (lima belas) SKPD yaitu :
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, RSUD H. Boejasin Pelaihari, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Kurau, Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Tambang Ulang dan Kecamatan Batu Ampar.
 - c. tanggal 20 Oktober 2020 pada 11 (sebelas) SKPD yaitu :
Kecamatan Bumi Makmur, Kecamatan Takisung, Kecamatan Kintap, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kecamatan Jorong, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Bajuin, Inspektorat Kabupaten dan Badan Pendapatan Daerah.
5. Pelaksanaan rekonsiliasi triwulan IV per tanggal 01 Oktober s/d 04 Desember 2020 terhadap 41 (empat puluh satu) SKPD yaitu :
- a. tanggal 07 Desember 2020 pada 15 (lima belas) SKPD yaitu :
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas

Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Sosial, Sekretariat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Pariwisata, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- b. tanggal 10 Desember 2020 pada 15 (lima belas) SKPD yaitu : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, RSUD H. Boejasin Pelaihari, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Kurau, Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Tambang Ulang dan Kecamatan Batu Ampar.
- c. tanggal 14 Desember 2020 pada 11 (sebelas) SKPD yaitu : Badan Pendapatan Daerah, Kecamatan Jorong, Kecamatan Takisung, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Kintap, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kecamatan Bumi Makmur, Kecamatan Bajuin, Inspektorat Kabupaten, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2. Monitoring Pemanfaatan dan Penggunaan Barang Milik Daerah.

Hasil Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Terbentuknya Tim Monitoring Pelaksanaan Pemanfaatan dan Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/84-KUM/2020 tanggal 2 Januari 2020, dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah selama 12 bulan.

Tugas Tim adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah.
 - b. melaksanakan kegiatan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah.
 - c. membuat laporan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah.
 - d. menyampaikan laporan hasil kegiatan pada Bupati Tanah Laut melalui Kepala Badan.
2. Terlaksananya monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah di 11 (sebelas) Kecamatan dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut :
 1. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 16 Januari 2020 ke Kecamatan Jorong.
 2. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 23 Januari 2020 ke Kecamatan Batu Ampar.
 3. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 04 Pebruari 2020 ke Kecamatan Bajuin.
 4. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 5 Pebruari 2020 ke Kecamatan Kurau.
 5. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 7 Pebruari 2020 ke Kecamatan Takisung.

6. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 18 Pebruari 2020 ke Kecamatan Kintap.
7. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 19 Pebruari 2020 ke Kecamatan Jorong.
8. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 20 Pebruari 2020 ke Kecamatan Bumi Makmur.
9. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 11 Maret 2020 ke Kec. Panyipatan.
10. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 12 Maret 2020 ke Kec. Kintap.
11. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 18 Maret 2020 ke Kecamatan Bumi Makmur.
12. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 19 Maret 2020 ke Kecamatan Bumi Makmur.
13. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 23 Maret 2020 ke Kecamatan Bumi Makmur.
14. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 24 Maret 2020 ke Kecamatan Bati-Bati.
15. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 26 Maret 2020 ke Kecamatan Tambang Ulang.
16. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal tanggal 12 Mei 2020 ke

Kec. Jorong.

17. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 15 Mei 2020 ke Kecamatan Takisung.
18. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 27 Mei ke Kec. Kurau.
19. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 3 Juni 2020 ke Kec. Panyipatan.
20. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 4 Juni 2020 ke Kec. Batu Ampar.
21. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 9 Juni 2020 ke Kec. Bumi Makmur
22. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 10 Juni 2020 ke Kec. Takisung.
23. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 11 Juni 2020 ke Kec. Jorong.
24. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 18 Juni 2020 ke Kec. Tambang Ulang.
25. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 16 Juni 2020 ke Kec. Takisung.
26. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 17 Juni 2020 ke Kec. Kintap.
27. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 24 Juni 2020 ke Kecamatan Panyipatan.
28. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 25 Juni 2020 ke Kec. Bati-Bati.
29. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 22 Juni 2020 ke Kec. Bati-Bati.
30. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 30 Juni 2020 ke Kec. Kurau.
31. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan

- barang milik daerah pada tanggal 01 Juli 2020 ke Kec. Batu Ampar.
32. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 02 Juli 2020 ke Kec. Bajuin.
 33. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 8 Juli 2020 ke Kec. Tambang Ulang.
 34. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 9 Juli 2020 ke Kecamatan Bumi Makmur.
 35. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 16 Juli 2020 ke Kec. Kintap.
 36. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 21 Juli 2020 ke Kecamatan Kurau.
 37. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 28 Juli 2020 ke Kec. Bati-Bati.
 38. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 30 Juli 2020 ke Kecamatan Jorong.
 39. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 4 Agustus 2020 ke Kec. Kintap.
 40. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 5 Agustus 2020 ke Kec. Tambang Ulang.
 41. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 24 Agustus 2020 ke Kecamatan Kurau.
 42. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 16 September 2020 ke Kec. Panyipatan.
 43. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 17 September 2020 ke Kec. Bumi Makmur.

44. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 18 September 2020 ke Kec. Bati-Bati.
45. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 05 Oktober 2020 ke Kecamatan Tambang Ulang.
46. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 8 Oktober 2020 ke Kecamatan Panyipatan.
47. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 9 Oktober 2020 ke Kecamatan Takisung.
48. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal pada tanggal 13 Oktober 2020 ke Kecamatan Jorong.
49. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 27 Oktober 2020 ke Kecamatan Bati-Bati.
50. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 4 Nopember 2020 ke Kecamatan Jorong.
51. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 5 Nopember 2020 ke Kecamatan Bumi Makmur.
52. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 6 Nopember 2020 ke Kecamatan Panyipatan
53. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 9 Nopember 2020 ke Kecamatan Kurau.
54. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 10 Nopember 2020 ke Kecamatan

Kintap.

55. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 11 Nopember 2020 ke Kecamatan Bati-Bati.
56. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 12 Nopember 2020 ke Kecamatan Takisung.
57. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 13 Nopember 2020 ke Kecamatan Tambang Ulang.
58. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 16 Nopember 2020 ke Kecamatan Bajuin.
59. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 26 Nopember 2020 ke Kecamatan Kurau.
60. Melakukan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada tanggal 15 Desember 2020 ke Kec. Bajuin.

3. Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2020.

Untuk tahun anggaran 2020 terdapat barang milik daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain, diantaranya adalah :

A. Pinjam Pakai

1. 1 (satu) unit kendaraan dinas roda 4 (empat) yaitu DA. 954 L oleh Komando Distrik Militer 1009/Pelaihari.
2. 1 (satu) unit bangunan rumah dinas oleh Komando Distrik Militer 1009/Pelaihari.
3. Tanah seluas 1 ha oleh Komando Distrik Militer 1009/Pelaihari
4. 1 (satu) unit kendaraan dinas roda 4 (empat) yaitu DA. 139 LB oleh Kejaksaan Negeri Tanah Laut.

5. 1 (satu) unit kendaraan dinas roda 4 (empat) yaitu DA. 942 L oleh Kepolisian Resort Tanah Laut.
6. 1 (satu) unit kendaraan dinas roda 4 (empat) yaitu DA. 4 LA oleh Komando Distrik Militer 1009/Pelaihari.
7. 1 (satu) unit kendaraan dinas roda 4 (empat) yaitu DA. 947 oleh Batalyon Infanteri 623/Bhakti Wira Utama Kompi Senapan C.

B. Sewa

1. 1 (satu) unit Bangunan Gedung Pabrik Semi Permanen oleh PT. Gede Langgeng Makmur Banjarmasin.
2. 1 (satu) unit rumah dinas oleh Khairandi.
3. 1 (satu) unit rumah dinas oleh Agus Muslim.
4. Tanah seluas $\pm 28.845 \text{ m}^2$ oleh petani an. Supian.
5. Tanah seluas $\pm 95.353 \text{ m}^2$ oleh petani an. Bahrian.
6. Tanah seluas $\pm 111.157 \text{ m}^2$ oleh Kelompok Tani Kartika.
7. 1 (satu) unit rumah dinas oleh Rahmadianor.
8. 1 (satu) unit rumah dinas oleh Rahmad Hidayat.
9. 1 (satu) unit rumah dinas oleh Rahman Aziddin.
10. Tanah seluas $\pm 53.071 \text{ m}^2$ oleh Suryanti.
11. Tanah seluas $\pm 1.050 \text{ m}^2$ oleh petani an. Selamat Riyadi.
12. 1 (satu) unit Bangunan Gudang Tertutup Permanen oleh PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Banjarmasin.
13. 1 (satu) unit rumah dinas oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut.
14. Sebagian aula milik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kab. Tanah Laut oleh Koperasi Pegawai Negeri Tuntung Pandang Kab. Tanah Laut.

5. Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah.

Sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan dan informasi kepada Satuan Kerja

Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kab. Tanah Laut mengenai pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan terkait pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah di Kab. Tanah Laut, sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah dilaksanakan dengan cara penyebaran informasi melalui pembuatan buku sosialisasi sebanyak 48 buah buku yang disebar ke 41 Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kab. Tanah Laut.

KENDALA/PERMASALAHAN :

Pada dasarnya semua output kinerja sudah tercapai sesuai target yang direncanakan. Namun terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya keterkaitan dengan pihak lainnya dan juga yang mengalami perubahan target kinerja.

Kegiatan dimaksud adalah :

1. **Penilaian pemanfaatan BMD oleh Tim Penilai dari KPKNL Banjarmasin.**
2. Pemerintah Kab. Tanah Laut telah mengajukan permohonan penilaian pemanfaatan barang milik daerah berupa sewa sebanyak 2 kali permohonan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin.

Namun berdasarkan surat dari Kepala KPKNL Banjarmasin nomor S-1983/WKN.12/KNL.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 perihal Permohonan penilaian BMD 2020 disampaikan bahwa pihak KPKNL Banjarmasin tidak bisa melakukan penilaian dikarenakan KPKNL Banjarmasin sedang melaksanakan penyelesaian reval BMN 2020 dengan target penyelesaian sampai dengan akhir Desember 2020. Dan saat ini seluruh Penilai Pemerintah pada KPKNL Banjarmasin fokus penyelesaian

perbaikan kualitas laporan penilaian kembali BMN. Oleh karena itu kegiatan penilaian barang milik daerah tidak tercapai, yaitu dengan nilai capaian 0%.

3. Direncanakan kegiatan sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah dilaksanakan dengan cara pemberian materi secara langsung kepada peserta sosialisasi dengan sasaran Peserta yaitu aparat desa di 11 Kecamatan serta Pengguna Barang dan Pengurus barang di tingkat Kabupaten. Namun dengan adanya refocusing anggaran serta adanya pandemic Covid-19 maka kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Namun sosialisasi tetap dapat dilakukan dengan cara penyebaran informasi melalui penyerahan buku sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan BMD yang dapat dijadikan pedoman dan rujukan dalam pelaksanaannya.
4. Pemanfaatan BMD memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan PAD serta meningkatkan fasilitas publik. Namun faktanya banyak asset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang belum mampu menghasilkan keuntungan bagi daerah, dengan pengertian bahwa pemanfaatan asset belum optimal serta rendahnya fungsi manfaat asset.

RENCANA AKSI :

1. Melakukan inventarisasi pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah lanjutan untuk lebih mengoptimalkan keakuratan data terkait pemanfaatan dan penggunaan BMD di Kab. Tanah Laut.
2. Melakukan sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan BMD secara intensif dengan sasaran kegiatan langsung ke SKPD di lingkup Pemerintah Kab. Tanah Laut .
3. Melakukan pembenahan administrasi pemanfaatan dan penggunaan BMD agar sesuai dengan ketentuan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kab. Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

4. Pembahasan dan Penyusunan Peraturan tentang penilaian BMD yang dimanfaatkan.
5. Pembentukan tim penilai pemanfaatan BMD tingkat Kabupaten.
6. Peningkatan pengawasan terhadap BMD yang dimanfaatkan dengan melibatkan Instansi terkait.
7. Mendorong pemanfaatan dan penggunaan BMD yang dapat menghasilkan keuntungan bagi daerah atau yang mendatangkan PAD.

FOTO – FOTO KEGIATAN

1. Rekonsiliasi Pemanfaatan dan Penggunaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2020



Rekonsiliasi Pemanfaatan dan Penggunaan BMD dengan DPRKPLH Kab. Tanah Laut



Rekonsiliasi Pemanfaatan dan Penggunaan BMD dengan Disdukcapil Kab. Tanah Laut



Rekonsiliasi Pemanfaatan dan Penggunaan BMD dengan Kesbangpol Kab. Tanah Laut

2. Foto Kegiatan Monitoring Pemanfaatan dan Monitoring Penggunaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 202



Monitoring pemanfaatan tanah milik Pemkab di Gunung Kayangan Desa Ambungan

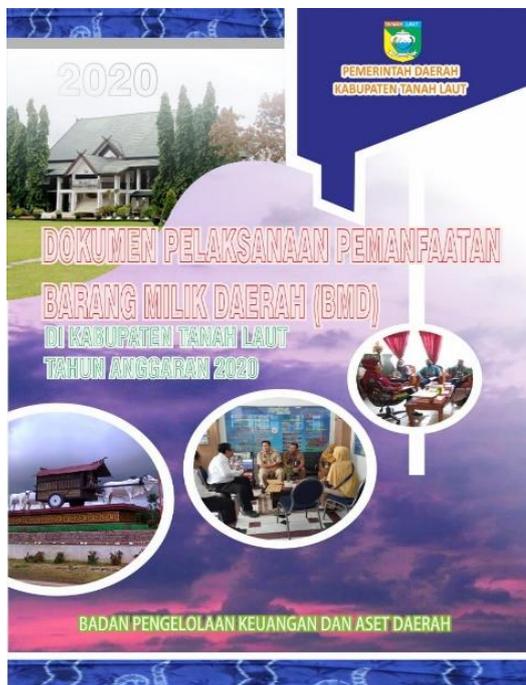


Monitoring pemanfaatan tanah milik Pemkab di Jalan Hutan Kota Kec. Pelaihari



Monitoring pemanfaatan peralatan dan mesin oleh Poktan di Desa Bumi Harapan Kec. Bumi

3. Foto Kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan dan Penggunaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2020



7.ESELON III.B (Kepala Bidang Penatausahaan Aset)

2.1.9. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 9

Sasaran Strategis nomor 9 adalah menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Penatausahaan Aset atau Pejabat Eselon III.B sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Pohon Kinerja SKPD yang telah ditandatangani

Sasaran strategis nomor 9 adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Penatausahaan Aset dengan tabel pencapaian sebagai berikut :

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9
Meningkatnya kualitas Inventarisasi BMD sesuai ketentuan

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
9	Meningkatnya kualitas Inventarisasi BMD sesuai ketentuan	11	Persentase BMD yang dicatat dengan akurat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja							100.00			100.00			100.00

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran strategis Meningkatkan kualitas Inventarisasi BMD sesuai ketentuan dengan indikator sasaran Persentase BMD yang dicatat dengan akurat sesuai ketentuan capaian kerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 9 Kepala Bidang Penatausahaan Aset ini dilaksanakan oleh Kasubbid Inventarisasi dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2020 dengan penjelasan dibawah ini.

7.1). ESELON IV.A1 (Kasubbid Inventarisasi)

Untuk mendukung Sasaran strategis No 9 yang menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Penatausahaan Aset diatas dilaksanakan oleh Kasubbid Inventarisasi yaitu dengan melaksanakan Program dan Kegiatan yang tercantum

dalam DPA Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah ditandatangani.

Untuk menggambarkan kinerja Kasubbid Inventarisasi Tahun 2020 sesuai dengan Program dan Kegiatan serta Perjanjian Kinerja yaitu berupa tabel pencapaian beserta analisisnya dapat diuraikan dibawah ini.

TABEL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI DPA TAHUN ANGGARAN 2020

Program & Kegiatan	Pagu Anggaran		Realisasi	Capaian
	Murni	Perubahan		
Program Peningkatan Penertiban Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah. Kegiatan Penyusunan Tabulasi Data Aset Tetap	Rp. 465.300.000,-	Rp. 278.949.000,-	Rp. 273.414.400,-	98,02 %

Indikator	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja		Realisasi	Capaian
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
Keluaran	Jumlah Dokumen Tabulasi Data Aset Tetap dan Pelaksanaan Monev BMD, dan Penilaian Aset untuk Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Tabulasi Data Aset Tetap dan Pelaksanaan Monev BMD, dan Penilaian Aset untuk Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah	21 Dokumen Laporan Aset dan 25 Dokumen Laporan Penilaian (84 Buku Laporan Aset dan 75 Buku Laporan Penilaian)	21 Dokumen Laporan Aset (21 Buku Laporan Aset)	21 Dokumen Laporan Aset (21 Buku Laporan Aset)	100%

TABEL PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1. Melaksanakan Updating Data BMD pada KIB SKPD sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen KIB SKPD yang terupdate sesuai ketentuan	21 Dokumen	21 Dokumen	100 %
2. Melaksanakan Rekonsiliasi/Verifikasi Belanja Modal SKPD sesuai ketentuan	Jumlah Belanja Modal SKPD yang telah direkonsiliasi/verifikasi dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan	40 SKPD (4 Kegiatan)	40 SKPD (4 Kegiatan)	100 %
3. Melaksanakan Penilaian BMD SKPD guna pencatatan dalam Neraca sesuai ketentuan	Jumlah BMD SKPD yang sudah dinilai dan dicatat dalam neraca sesuai ketentuan	25 Persil	-	0
4. Melaksanakan Sensus BMD dan Tindaklanjuti Hasil Sensus BMD sesuai ketentuan	Jumlah BMD SKPD yang telah disensus dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-
5. Melaksanakan Monitoring Belanja Modal SKPD sesuai ketentuan	Jumlah Belanja Modal SKPD yang telah Termonitoring sesuai ketentuan	40 SKPD (12 Kegiatan)	40 SKPD (12 Kegiatan)	100 %
6. Melaksanakan Sosialisasi Inventarisasi BMD SKPD sesuai ketentuan	Jumlah SKPD yang telah tersosialisasi dan menerapkan Inventarisasi BMD sesuai ketentuan	-	-	-
7. Melaksanakan FGD / Pembinaan SKPD dalam rangka Pengelolaan BMD	Jumlah SKPD yang mengikuti FGD/Pembinaan dan menerapkan Pengelolaan	40 SKPD (1 Kegiatan)	40 SKPD (1 Kegiatan)	100 %

sesuai ketentuan	BMD sesuai Ketentuan			
------------------	----------------------	--	--	--

Analisa pencapaian Program dan Kegiatan serta Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah dilaksanakan Kasubbid Inventarisasi adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya Updating Data BMD pada KIB SKPD sesuai dengan ketentuan dengan Target Kinerja fisik 100 %, dalam bentuk 21 (dua puluh satu) dokumen Laporan Aset yang terdiri dari 12 Buku Laporan KIB A, KIB B, KIB C, KIB D, KIB E, dan KIB F (Unaudit dan Audited) per 31 Desember 2019, 2 Buku Rekap Mutasi Barang Milik Daerah (Unaudit dan Audited) per 31 Desember 2019, 2 Buku Induk Inventaris Kabupaten Intrakombtabel dan Ekstrakombtabel per 31 Desember 2019, 2 Buku Laporan Barang Milik Daerah Semester I dan Semester II per 31 Desember 2020, 1 Buku Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Aset Daerah Tahun 2020, 2 Buku Laporan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Semester I dan II Tahun Anggaran 2020.
2. Terlaksananya Rekonsiliasi/Verifikasi Belanja Modal 40 SKPD per triwulan (4 kegiatan rekon) sesuai ketentuan dengan Target Kinerja Fisik 100 %, Belanja Modal SKPD yang telah telah disampaikan /dilaporkan sesuai hasil rekon.
3. Pelaksanaan Kegiatan Penilaian BMD SKPD guna Pencatatan Neraca Aset Daerah sesuai ketentuan tidak terlaksana, hal ini disebabkan karena adanya Refocusing Anggaran untuk Percepatan Penanganan wabah Covid 19.
4. Terlaksananya Monitoring Belanja Modal ke 40 SKPD yang ada di Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan ketentuan , dengan Target Kinerja fisik 100 %.
5. Terlaksananya 1 kegiatan FGD / Pembinaan SKPD dalam rangka Penerapan Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan, yang

diikuti oleh 40 SKPD se Kabupaten Tanah Laut, dengan Target Kinerja 100 %.

Dengan demikian pencapaian Program Peningkatan Penertiban Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah, Kegiatan Penyusunan Tabulasi Data Aset Tetap dengan pagu anggaran APBD Murni sebesar Rp. Rp. 465.300.000,- Namun pada APBD Perubahan terjadi adanya refocusing berkurang menjadi Rp 278.949.000,- dan sampai akhir tahun telah terealisasi sebesar Rp 273.414.400,- atau dengan capaian sebesar 98,02%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 5.534.600,- atau sebesar 1,98%.

Kendala yang dihadapi :

1. Pandemi Covid 19 melanda Kabupaten Tanah Laut, akibatnya banyak anggaran dialihkan untuk Belanja Tak terduga , sehingga terjadi Refocusing Anggaran. Anggaran menjadi terbatas karena banyak direfocusing untuk Percepatan Penanganan Pandemi Covid 19 . Hal ini yang menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD untuk Pencatatan Neraca Aset Daerah.
 2. Kurangnya kerjasama antara PPTK, bendahara pengeluaran dan pengurus barang sehingga menghambat penyusunan LKPD
- A. Rencana Aksi yang akan dilakukan dalam rangka upaya peningkatan :
1. Mengusulkan kembali Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD agar BMD SKPD yang belum dinilai bisa dilakukan penilaian
 2. Meningkatkan Kinerja SDM Pengurus Barang agar lebih tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya dalam Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah .
 3. Pemberian penghargaan kepada pengurus barang SKPD terbaik yang mengelola barang milik daerah (BMD) SKPD.

4. Melaksanakan pendekatan kepada PPTK, bendahara pengeluaran dan pengurus barang agar laporan disampaikan tepat waktu agar tidak menghambat penyusunan LKPD.

Foto-foto kegiatan Kasubbid Inventarisasi

1. Dokumen KIB SKPD yang terupdate sesuai ketentuan (Laporan BMD Subbid Inventarisasi)



2. Rekonsiliasi/verifikasi dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan



3. Monitoring SKPD





5. FGD Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengoperasian SIMDA-BMD



2.1.10. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 10

Sasaran Strategis nomor 10 adalah menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Penatausahaan Aset atau Pejabat Eselon III.B sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Pohon Kinerja SKPD yang telah ditandatangani.

7. ESELON III.B (Kepala Bidang Penatausahaan Aset)

Sasaran strategis nomor 10 adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Penatausahaan Aset dengan tabel pencapaian sebagai berikut :

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10
Meningkatnya kualitas Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
10	Meningkatnya kualitas Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	12	Persentase Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	108,80	108,80	100	2700	2700
			Rata-rata capaian kinerja				100,00			108,80			2700,00

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran strategis Meningkatnya kualitas Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan dengan indikator sasaran Persentase Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan pada tahun 2020 capaian kinerjanya melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 2700% mengalami peningkatan lebih dari 1000% dari tahun 2019.. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 10 Kepala Bidang Penatausahaan Aset ini telah dilaksanakan oleh Kasubbid Pemindahtanganan, Pemusnahan dan

Penghapusan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2020 dengan penjelasan dibawah ini.

7.2). ESELON IV.A1 (Kasubbid Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan)

Untuk mendukung Sasaran strategis No 10 yang menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Penatausahaan Aset diatas dilaksanakan oleh Kasubbid Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan yaitu dengan melaksanakan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam DPA Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah ditandatangani.

Untuk menggambarkan kinerja Kasubbid Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Tahun 2020 sesuai dengan Program dan Kegiatan serta Perjanjian Kinerja yaitu berupa tabel pencapaian beserta analisisnya dapat diuraikan dibawah ini.

Tabel Pencapaian Program dan Kegiatan sesuai DPA Tahun Anggaran 2020

Program/Kegiatan	Target	Pagu Anggaran	Realisasi			
			Fisik	(%)	Keuangan	(%)
Program Peningkatan Penertiban Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah Kegiatan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan	4 Dokumen (4 buku data aset)	59.096.000	4 Dok (4 buku data aset)	100	46.739.900	79,09

Tabel Pencapaian Perjanjian Kinerja Kasubbid P3 tahun 2020

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1. Melaksanakan lelang umum BMD SKPD sesuai ketentuan	1. Jumlah BMD SKPD yang telah dilelang sesuai ketentuan	'1 Kegiatan	0	0%
2. Melaksanakan pemindahtanganan BMD SKPD sesuai ketentuan	2. Jumlah BMD SKPD yang telah dipindahtangankan sesuai ketentuan	1 Dokumen BMD	27 Dokumen BMD	2700%
3. Melaksanakan Pemusnahan BMD SKPD sesuai ketentuan	3. Jumlah BMD SKPD yang telah dimusnahkan sesuai ketentuan	5 Kegiatan Pemusnahan	21 Dokumen	100%
4. Melaksanakan Penelusuran BMD yang Belum Jelas Lokasinya sesuai ketentuan	4. Jumlah BMD yang ditelusuri sesuai ketentuan	12 Dokumen BMD	30 Dokumen BMD	250%
5. Melaksanakan Sosialisasi Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD SKPD sesuai ketentuan	5. Jumlah SKPD yang telah tersosialisasi dan menerapkan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	'1 Kegiatan	3 Kegiatan	300%
6. Melaksanakan	6. Jumlah Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

Penyusunan Laporan Hasil Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD SKPD sesuai ketentuan	Laporan Hasil Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD SKPD sesuai ketentuan			
7. Melaksanakan monitoring dalam rangka Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD SKPD sesuai ketentuan	7. Jumlah SKPD yang termonitoring dalam rangka Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300%
8. Melaksanakan FGD/Pembinaan SKPD dlm rangka Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	8. Jumlah SKPD yg mengikuti FGD/Pembinaan dlm rangka Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	'1 Kegiatan	'1 Kegiatan	100%

Analisis Pencapaian Program dan Kegiatan Tahun 2020

A. Program Peningkatan Penertiban Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah, Kegiatan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Kasubbid Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan dengan Pagu Anggaran Murni sebesar Rp 132.310.000,-, namun pada APBD Perubahan berkurang menjadi Rp 59.096.000,- dikarenakan adanya pengadaan mobil dan sampai akhir tahun telah terealisasi sebesar Rp 46.739.900,- atau dengan capaian sebesar 79,09%,

sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 12.356.100,- atau sebesar 20,91%.

B. Sedangkan capaian target kinerja dan realisasi dapat dijelaskan sbb :

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa Penghapusan dapat disebabkan karena :

1. Penyerahan barang milik daerah;
2. Pengalihan Status Penggunaan barang milik daerah;
3. Pemindahtanganan atas barang milik daerah;
4. Putusan Pengadilan yang berkuatan hukum tetap;
5. Menjalankan ketentuan perundang-undangan;
6. Pemusnahan dan;
7. Sebab Lain.

Tahun Anggaran 2020 telah dilakukan kegiatan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan sesuai dengan ketentuan, dengan hasil 4 Dokumen dengan penjelasan sebagai berikut :

- I. Dokumen hibah keluar sebanyak 15 (lima belas) berkas dengan rincian sebagai berikut;
 1. Bakeuda Prop Kalsel/Peralatan samsat keliling
 2. Ponpes ubudiyah bati-bati/bongkaran bangunan pasar lama
 3. Yayasan nurul adzulam/bongkaran bangunan kantor kecamatan takisung
 4. Desa Tambang Ulang/Tanah
 5. Desa sungai Pinang/Sumur Bor
 6. SLBN 2 Pelaihari Prop Kalsel/Tanah
 7. Langgar Al ihsan/bongkaran menara air
 8. Yayasan Sria Bersaudara/Tanah & bangunan
 9. Majelis Asmaul husna/Bongkaran Rumdin setda

10. Masjid Darul Mahabbah/Bongkaran pustu liangganggu
 11. Pongpes Annajah Cindai alus putra/Bongkaran puskesmas angsau
 12. Desa raden/Tanah
 13. Langgar Miftahul Jannah/bongkaran SD Tungkaran
 14. BPK Miftahul jannah/Kendaraan R3
 15. Maasjid raudatul aflah/Bongkaran SMPN 6 Pelaihari
- II. Dokumen Hibah masuk sebanyak 16 (enam belas) berkas dengan rincian sebagai berikut:
1. Dari Kementerian PUPR/Jaringan air minum
 2. Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Peralatan mesin & software
 3. Dari Masyarakat desa Sungai Rasau (Ahmadi)/Tanah
 4. Dari Masyarakat desa Asam Jaya (Askarik)/Tanah
 5. Dari PT.CPKA/Tanah
 6. Dari Masyarakat desa Bentok kampung (Mulkawi)/Tanah
 7. Dari PT.Arutmin Indonesia/Tanah
 8. Dari Dinas LH Propinsi Kalsel/Dump Truck
 9. Dari Masyarakat desa Padang Luas (Mislah rezeki)/Tanah
 10. Dari Masyarakat desa Tabanio (Muhammad)/Tanah
 11. Dari Kementerian Perhubungan/Speed boad
 12. Dari Kementerian Pertanian/ Peralatan mesin & software
 13. Dari Masyarakat desa handil birayang bawah (Mawardi)/Tanah
 14. Dari Masyarakat desa bawah layung (Bambang Sriawan)/Tanah
 15. Dari Masyarakat desa Bungkok (Umi masitoh dll)/Tanah
 16. Dari KPU /Thermogun
- III. Dokumen pemusnahan sebanyak 21 (dua puluh satu) kegiatan pada 11 SKPD sebagai berikut;
- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Kecamatan Takisung | 7. Kecamatan Batu Ampar |
| 2. Diskopdag | 8. DPRKPLH |
| 3. Dinas Pariwisata 2x | 9. Dinas Pendidikan 5x |
| 4. Sekretariat DPRD | 10. Setda 5x |

5. Distanhorbun

11. Disnakerind

6. Dinkes 2x

IV. Dokumen penghapusan barang milik daerah Kab. Tanah Laut dengan menerbitkan sebanyak 30 (tiga puluh) Surat Keputusan dengan rincian sebagai berikut :

- Sebanyak 2 (dua) Surat Keputusan Bupati Tanah Laut selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD tentang Penghapusan BMD Kab. Tanah Laut dari Daftar Barang Pengelola Barang dan ;
- 28 (dua puluh delapan) Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Tanah Laut selaku Pengelola Barang tentang Penghapusan BMD Kab. Tanah Laut dari Daftar Barang Pengguna Barang.

Dari 28 (dua puluh delapan) Surat Keputusan penghapusan BMD, karena disebabkan :

1. Karena Pemindahtanganan (Hibah keluar) : 10 SK.
2. Karena Pemusnahan : 16 SK.
3. Karena Sebab Lain : 2 SK.

Analisis Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Realisasi perjanjian kinerja Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan aset daerah secara umum mengalami kenaikan dari target awal karena adanya usulan SKPD yang tidak bisa di prediksi dengan rincian sebagai berikut;

1. Pada lelang BMD SKPD tidak dilaksanakan yang semula sudah dijadwalkan oleh KPKNL untuk penilaian objek lelang pada bulan Maret 2020 berdasar surat nomor S-271/WKN.12/KNL.03/2020 tanggal 28 Februari 2020 tetapi karena adanya pandemi covid 19 jadwal penilaian di tunda sampai waktu yang tidak di tentukan dan adanya kebijakan refocusing anggaran yang belum terealisasi sehingga anggaran lelang BMD di refocusing.

2. Pemindahtanganan BMD mengalami kenaikan 2.600% dari target awal di karenakan adanya hibah masuk dan hibah hasil bongkaran bangunan yang tidak bisa di prediksi.
3. Pada Pemusnahan BMD ada kenaikan 320 % dari target awal dikarenakan adanya usul pemusnahan SKPD yang telah dilaksanakan pembongkaran bangunannya pada anggaran perubahan, sehingga harus segera di buatkan Berita Acara Pemusnahannya.
4. Pada Penghapusan BMD mengalami kenaikan 150% dari target awal dikarenakan adanya kenaikan Pemusnahan BMD pada beberapa SKPD pada anggaran perubahan.
5. Pada sosialisasi Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD mengalami kenaikan 200% dikarenakan adanya beberapa SKPD meminta tambahan waktu sosialisasi.
6. Pada dokumen laporan hasil Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD tercapai 100%
7. Pada SKPD yang termonitoring dalam rangka Pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD mengalami kenaikan 200% dikarenakan adanya beberapa SKPD yang memerlukan monitoring
8. Pada SKPD yang mengikuti FGD Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD tercapai 100%..

Gambaran visual dokumentasi kegiatan selama tahun 2020 dapat dilihat pada daftar lampiran.

Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Adapun permasalahan yang dihadapi ada beberapa sebab :

1. Pembiayaan

Tahun Anggaran 2020 belum tersedianya dana untuk penilai publik sehingga kegiatan penilaian hanya dengan penilai pemerintah (KPKNL);

2. Kebijakan

Adanya kebijakan dari pemerintah pusat untuk refocusing APBD dan adanya pandemi covid 19, sehingga anggaran untuk lelang BMD yang semula dianggarkan tidak bisa terealisasi, ketergantungan dengan KPKNL untuk penilaian BMD yang akan dilelang, perjalanan dinas dibatasi dan skala prioritas, sehingga serapan anggaran Subbid Pemindahtangan, Pemusnahan dan Penghapusan sangat rendah;

3. Kurangnya Jumlah dan Kualitas SDM aparatur

Dalam pelaksanaan kegiatan diperlukan jumlah dan kualitas SDM aparatur yang memadai, dimana pada Sub Bidang Pemindahtangan, Pemusnahan dan Penghapusan hanya terdapat 1 (satu) Kasubbid dan 1 (satu) staf dari PTT, sehingga sulit untuk pembagian tugas;

4. Ketergantungan dengan pihak lain

Pada kegiatan pemindahtangan, pemusnahan dan penghapusan selalu tergantung kepada pemohon, sehingga sulit membuat target yang harus direncanakan, sehingga memerlukan kemampuan memprediksi kegiatan yang akan datang;

5. Belum Adanya Penilai Internal

Belum adanya penilai internal jadi kendala dalam kegiatan penilaian karena harus menganggarkan kembali untuk penilai eksternal seperti KPKNL sebagai penilai pemerintah dan anggaran untuk penilai publik.

Upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya :

1. Efisiensi dana yang ada untuk kegiatan semaksimal mungkin, dan menganggarkannya kembali ditahun yang akan datang;
2. Memaksimalkan SDM yang ada serta memanfaatkan SDM subbid lain dalam Bidang Penatausahaan Aset yang longgar dalam kegiataanya dalam bentuk kerjasama dalam Tim;
3. Bekerjasama dengan Bidang lain untuk bisa membuat target dalam kegiatan terutama subbid perencanaan dan kebutuhan barang, dimana RKBMD yang disampaikan SKPD dapat dijadikan referensi kegiatan;

4. Melaporkan dengan pimpinan dan berupaya untuk bisa dianggarkan untuk pendidikan / pelatihan penilai bmd bagi aparatur.

RENCANA AKSI

1. Menyiapkan data dan format pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
2. Menyiapkan Data SDM aparatur untuk mengikuti Diklat Penilai BMD;
3. Menyiapkan perangkat lunak untuk lelang on line (E-Auction);

**DOKUMENTASI KEGIATAN KASUBBID PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN
DAN PENGHAPUSAN BIDANG PENATAUSAHAAN ASET BPKAD KAB. TANAH
LAUT TAHUN ANGGARAN 2020.**

1. KEGIATAN PEMINDAHTANGANAN (HIBAH) :

**HIBAH PERALATAN MOBIL SAMSAT KELILING KEPADA PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (BAKEUDA)**



**HIBAH TANAH KEPADA PEMERINTAH DESA TAMBANG ULANG KECAMATAN
TAMBANG ULANG**



**HIBAH SUMUR BOR KEPADA PEMERINTAH DESA SUNGAI PINANG KECAMATAN
TAMBANG ULANG**



**HIBAH BONGKARAN PASAR LAMA KEPADA PON-PES UBUDIYAH
KECAMATAN
BATI-BATI**



HIBAH HASIL BONGKARAN KANTOR KEC.TAKISUNG KEPADA YAYASAN NURUL ADZULAM KECAMATAN TAKISUNG



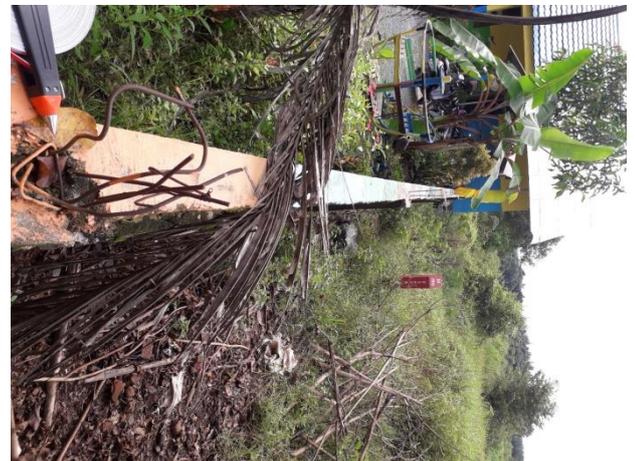
HIBAH TANAH KEPADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (SLBN 2 PELAIHARI)



HIBAH HASIL BONGKARAN MENARA AIR KEPADA LANGGAR AL IHSAN KELURAHAN ANGSAU



HIBAH TANAH KEPADA YAYASAN SRIA BERSAUDARA (TK BAITURRAHMAN) DESA AMBUNGAN KECAMATAN PELAIHARI



**HIBAH HASIL BONGKARAN RUMDIN SETDA DAN KETUA DPRD KEPADA MAJELIS
ASMAUL HUSNA WA DZIKIR ADDHIYA'UL MUSTHOFAWY DESA ATU-ATU
KECAMATAN PELAIHARI**



HIBAH HASIL BONGKARAN PUSTU LIANG ANGGANG KEPADA MASJID DARUL MAHABBAH KECAMATAN BATI-BATI



HIBAH HASIL BONGKARAN PUSKESMAS ANGSAU KEPADA PON-PES ANNAJAH CINDAI ALUS PUTRA BINGKULU KECAMATAN TAMBANG ULANG



HIBAH TANAH KEPADA PEMERINTAH DESA RADEN KECAMATAN KURAU



HIBAH HASIL BONGKARAN SD TUNGKARAN KEPADA LANGGAR MIFTAHUL JANNAH TUNGKARAN KECAMATAN PELAIHARI



HIBAH HASIL BONGKARAN SMP 6 KEPADA MASJID RAUDATUL AFLAH PANGGUNG BARU KECAMATAN PELAIHARI



HIBAH KENDARAAN R3 KEPADA BARISAN PEMADAM KEBAKARAN (BPK) MIFTAHUL JANNAH KOMPLEK DUA MAS PUTRA ANGSAU KECAMATAN PELAIHARI



2. KEGIATAN PEMUSNAHAN
PEMUSNAHAN / PEMBONGKARAN BANGUNAN KANTOR KECAMATAN
TAKISUNG (KECAMATAN TAKISUNG)



PEMUSNAHAN /PEMBONGKARAN PASAR LAMA (DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
PERDAGANGAN)



PEMUSNAHAN /PEMBONGKARAN BANGUNAN GUDANG (DINAS PARIWISATA)



PEMUSNAHAN /PEMBONGKARAN MENARA AIR (SEKRETARIAT DPRD)



PEMUSNAHAN /PEMBONGKARAN PUSTU LIANG ANGGANG (DINAS KESEHATAN)



PEMUSNAHAN /PEMBONGKARAN RUMAH DINAS SEKRETARIS DAERAH (SEKRETARIAT DAERAH)



PEMUSNAHAN /PEMBONGKARAN JEMBATAN KHUSUS (DINAS PARIWISATA)



PEMUSNAHAN /PEMBONGKARAN RUMAH DINAS KETUA DPRD (SEKRETARIAT DAERAH)





PEMUSNAHAN /PEMBONGKARAN SDN TUNGKARAN (DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN)



PEMUSNAHAN DENGAN CARA DIHANCURKAN DAN DI TIMBUN UNTUK PERALATAN DAN MESIN

DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN



KECAMATAN BATU AMPAR



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**



SEKRETARIAT DAERAH



8.ESELON III.A (SEKRETARIS)

2.1.11. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 11

Sasaran Strategis nomor 11 adalah menjadi tanggungjawab Sekretaris BPKAD Kabupaten Tanah Laut atau Pejabat Eselon III.A sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Pohon Kinerja SKPD yang telah ditandatangani.

Sasaran strategis Nomor 11 ini adalah Perjanjian Kinerja Sekretaris BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 11
Meningkatnya kualitas pemenuhan sarpras perkantoran

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019(%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020(%)
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
11	Meningkatnya kualitas pemenuhan sarpras perkantoran	13	Persentase kinerja sarpras yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Rata-rata capaian kinerja				100.00			100.00			100.00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Meningkatkan kualitas pemenuhan sarpras perkantoran dengan indikator sasaran Persentase kinerja sarpras yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 11 Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2020.

8.ESELON III.A (SEKRETARIS)

2.1.12. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 12

Sasaran Strategis nomor 12 adalah menjadi tanggungjawab Sekretaris BPKAD Kabupaten Tanah Laut atau Pejabat Eselon III.A sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Pohon Kinerja SKPD yang telah ditandatangani

Sasaran strategis Nomor 12 ini adalah Perjanjian Kinerja Sekretaris BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian kinerja seperti pada table sebagai berikut :

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 12

Meningkatnya pemberian pelayanan administrasi kepegawaian SKPD

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
12	Meningkatnya pemberian pelayanan administrasi kepegawaian SKPD	14	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yg terpenuhi dan terpelihara dgn baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Rata-rata capaian kinerja				100.00			100.00			100.00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Meningkatkan pemberian pelayanan administrasi kepegawaian SKPD dengan indikator sasaran Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yg terpenuhi dan terpelihara dgn baik capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 12 Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2020 dengan penjelasan dibawah ini.

8.1). ESELON IV.A1 (Kasubbag Umum dan Kepegawaian)

Untuk mendukung Sasaran Strategis No 11 dan Sasaran Strategis No 12 yang menjadi tanggungjawab Sekretaris diatas dilaksanakan oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian yaitu dengan melaksanakan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam DPA Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah ditandatangani.

Pengelolaan administrasi perkantoran merupakan kegiatan rutin pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut, meliputi pelayanan surat masuk dan surat keluar, pelayanan sarana dan prasarana, pelayanan administrasi kepegawaian sebanyak 46 PNS dan 19 PTT dan semua terlayani dengan baik 100%.

Untuk menggambarkan kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2020 sesuai dengan Program dan Kegiatan serta Perjanjian Kinerja yaitu berupa tabel pencapaian beserta analisisnya dapat diuraikan dibawah ini.

Pencapaian Program dan Kegiatan Tahun 2020 Kasubbag Umum & Kepegawaian

No	Program/ Kegiatan	Output dalam DPA	Target Kinerja	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi				
					Fisik		Keuangan		
					Kinerja	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1	Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Jumlah Jenis Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	3 Jenis	703.119.206	3 Jenis	100%	612.922.924	87,17%	
2	Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan	Jumlah Jenis Jasa, Bahan, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	10 Jenis	321.180.668	10 Jenis	100%	265.996.447	82,82%	

	perkantoran								
3	Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Jumlah Pegawai Tidak Tetap	19 PTTI	439.356.000	19 PT T	100 %	437.424.006	99,56 %	

No	Program/Kegiatan	Output dalam DPA	Target Kinerja	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi				
					Fisik		Keuangan		
					Kinerja	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia								
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Jenis Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	9 Jenis	285.785.750	9 Jenis	100 %	274.328.500	95,99%	
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Jenis Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	6 Jenis	108.860.000	6 Jenis	100 %	75.585.950	69,43%	
3	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Jumlah Unit Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	1 Unit Gedung	52.500.000	1 Unit Gedung	100 %	37.596.700	71,61%	
4	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Teknis	5 ASN	0,00	5 ASN	0%	0,00	0%	
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	Jumlah Stel Pakaian Dinas beserta	50 Stell	56.250.000	50 Stell	100 %	56.100.000	99,73%	

	Perengkapannya	Perengkapannya						
--	----------------	----------------	--	--	--	--	--	--

No	Program/Kegiatan	Output dalam DPA	Target Kinerja	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi			
					Fisik		Keuangan	
					Kinerja	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD							
1	Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	Jumlah Event Pameran	2 Event	24.994.700	0 Event	0%	0,00	0%

Tabel Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1. Melaksanakan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran SKPD	1. Jumlah Administrasi Perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	4 Jenis Pelayanan	4 Jenis Pelayanan	100%
2. Melaksanakan pemenuhan dan peningkatan pelayanan sarpras dan kualitas SDM SKPD	2. Jumlah Sarpras dan SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	46 ASN, 19 PTT, 33 Kend. Dinas Operasional	46 ASN, 19 PTT, 33 Kend. Dinas Operasional	100%
3. Melaksanakan penyebaran informasi pembangunan SKPD	3. Jumlah fasilitasi Kegiatan Pameran Pembangunan	2 Event Pameran	0 Event Pameran	0%

**Analisis Pencapaian Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan
Kasubbag Umum dan Kepegawaian :**

- A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian dengan Pagu Anggaran Murni sebesar Rp 1.094.278.369,-, namun pada APBD Perubahan berkurang menjadi Rp 703.119.206,- dikarenakan adanya refocusing dan sampai akhir tahun telah terealisasi sebesar Rp 612.922.924,- atau dengan capaian sebesar 87,17%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 90.196.282,- atau sebesar 12,83%, sedangkan target kinerja 3 jenis telah terealisasi 100% sehingga pagu yang tersedia digunakan sesuai kebutuhan saja dan tidak berusaha untuk dihabiskan.
- B. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian dengan Pagu Anggaran Murni sebesar Rp 740.170.000,-, namun pada APBD Perubahan berkurang menjadi Rp 321.180.668,- dikarenakan adanya refocusing dan sampai akhir tahun telah terealisasi sebesar Rp 265.996.447,- atau dengan capaian sebesar 82,82%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 55.184.221,- atau sebesar 17,18%. sedangkan target kinerja 10 jenis telah terealisasi 100% sehingga pagu yang tersedia digunakan sesuai kebutuhan saja dan tidak berusaha untuk dihabiskan.
- C. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian dengan Pagu Anggaran Murni sebesar Rp 439.356.000,-, namun pada APBD Perubahan tetap menjadi Rp 439.356.000,- dan sampai akhir tahun telah terealisasi sebesar Rp 437.424.006,- atau dengan capaian sebesar 99,56%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 1.931.994,- atau sebesar 0,44%. sedangkan target kinerja

membayar 19 PTT telah terealisasi 100% sehingga pagu yang tersedia digunakan sesuai kebutuhan saja dan tidak berusaha untuk dihabiskan.

- D. Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian dengan Pagu Anggaran Murni sebesar Rp 200 000 000,-, namun pada APBD Perubahan bertambah tetap menjadi Rp 285.785.750,- dan sampai akhir tahun telah terealisasi sebesar Rp 274.328.500,- atau dengan capaian sebesar 95,99%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 11.457.250,- atau sebesar 4,01%. sedangkan target kinerja 9 jenis telah terealisasi 100% sehingga pagu yang tersedia digunakan sesuai kebutuhan saja dan tidak berusaha untuk dihabiskan.
- E. Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian dengan Pagu Anggaran Murni sebesar Rp 200.000.000,-, namun pada APBD Perubahan berkurang menjadi Rp 108.860.000,- dan sampai akhir tahun telah terealisasi sebesar Rp 75.585.950,- atau dengan capaian sebesar 69,43%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 33.274.050,- atau sebesar 30,87%. sedangkan target kinerja 6 jenis telah terealisasi 100% sehingga pagu yang tersedia digunakan sesuai kebutuhan saja dan tidak berusaha untuk dihabiskan.
- F. Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia,, Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian dengan Pagu Anggaran Murni sebesar Rp 56.250.000,-, namun pada APBD Perubahan tetap menjadi Rp 56.250.000,- dan sampai akhir tahun telah terealisasi sebesar Rp 56.100.000,- atau dengan capaian sebesar 99,73%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 1.931.994,- atau sebesar 0,27%. sedangkan target kinerja 50 stell telah terealisasi 100%

sehingga pagu yang tersedia digunakan sesuai kebutuhan saja dan tidak berusaha untuk dihabiskan.

- G. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD, Kegiatan Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian dengan Pagu Anggaran Murni sebesar Rp 24.994.700,-, namun pada APBD Perubahan berkurang menjadi Rp 20.000.000,- dan sampai akhir tahun tidak terealisasi atau dengan capaian 0%, kegiatan Pameran Pembangunan tidak dilaksanakan dikarenakan masih adanya pandemi Covid 19. sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 20.000.000,- atau sebesar 100%.

Analisis Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah dilaksanakan Kasubbag Umum dan Kepegawaian :

Sedangkan Perjanjian Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kinerja Utama 1) Melaksanakan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran SKPD dengan target 4 jenis pelayanan (Surat menyurat, Sarpras perkantoran, kepegawaian dan) tercapai 100%. Kemudian 2). Melaksanakan pemenuhan dan peningkatan pelayanan sarpras dan kualitas SDM SKPD dengan target 46 ASN, 19 PTT, 33 Kend. Dinas Operasional tercapai 100%. Selanjutnya adalah 3). Melaksanakan penyebarluasan informasi pembangunan SKPD dengan target 2 kali event pameran yaitu pameran anggrek dan pameran pembangunan tidak dapat terealisasi karena masih adanya Pandemi Covid 19 sehingga realisasi 0%.. Sehingga dengan demikian pernyataan sasaran strategis nomor 15 Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut juga telah terpenuhi 100%.

Telah mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan Penghargaan Pengurus Barang Terbaik pada Bulan Desember 2020 berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 191 Tahun 2019 tentang Penghargaan Kepada Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus Barang Terbaik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Foto-foto Kegiatan Kasubbag Umum dan Perlengkapan

1. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran



RAK BESI





(Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran)

AC SPLIT





(Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

LKj BPKAD TAHUN 2020

PC ASUS



(Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran)

PRINTER BROTHER DCP T310

LKj BPKAD TAHUN 2020









(Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran)

LAPTOP ACER SWIFT



(Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran)

BROTHER MFC T710



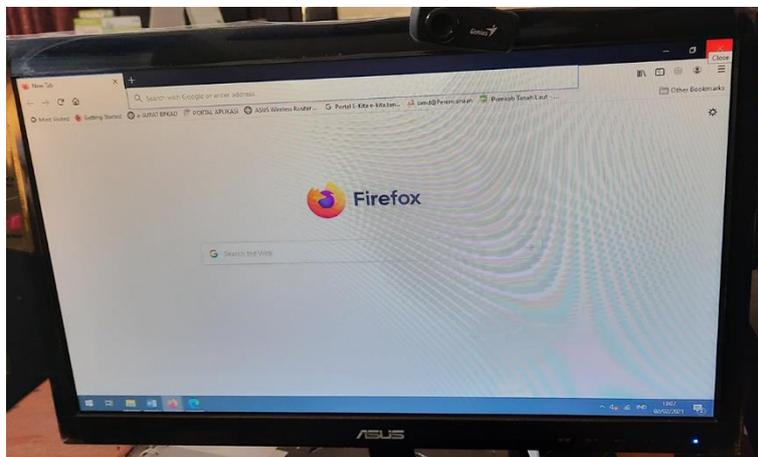
(Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran)

HAND DRYER



(Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran)

PC ASUS EXPERT I7



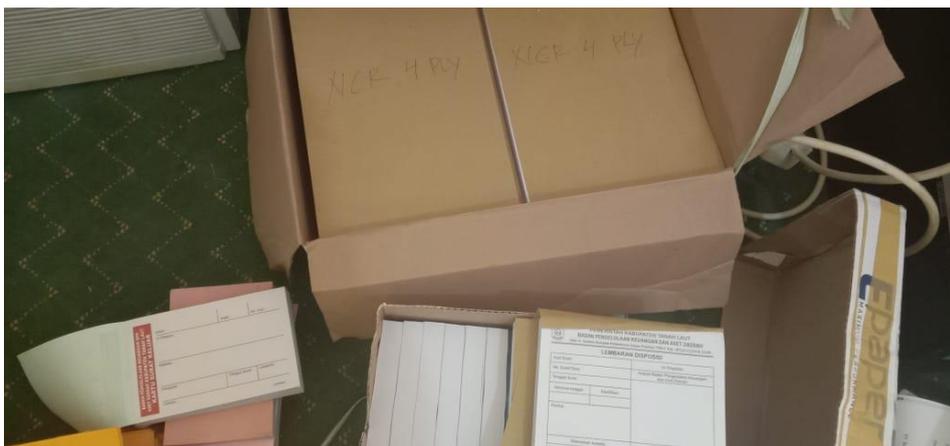
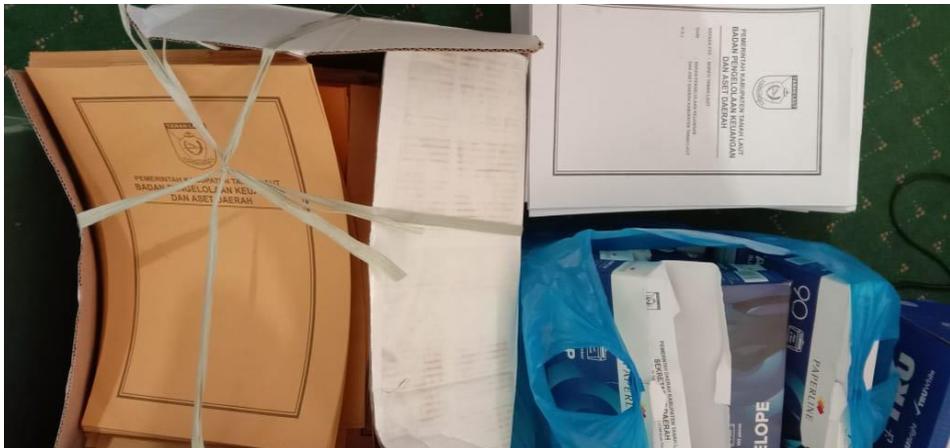
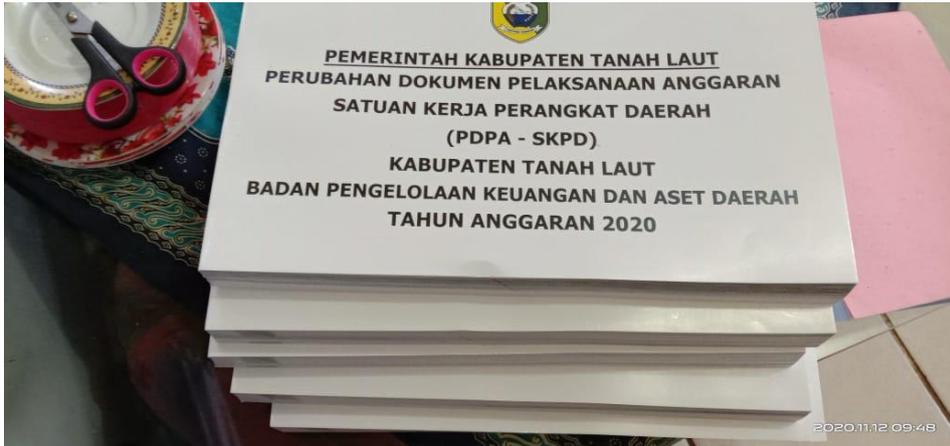
(Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran)

SEMPROTAN RUMPUT



(Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran)

2. Kegiatan Penyediaan Jasa bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran





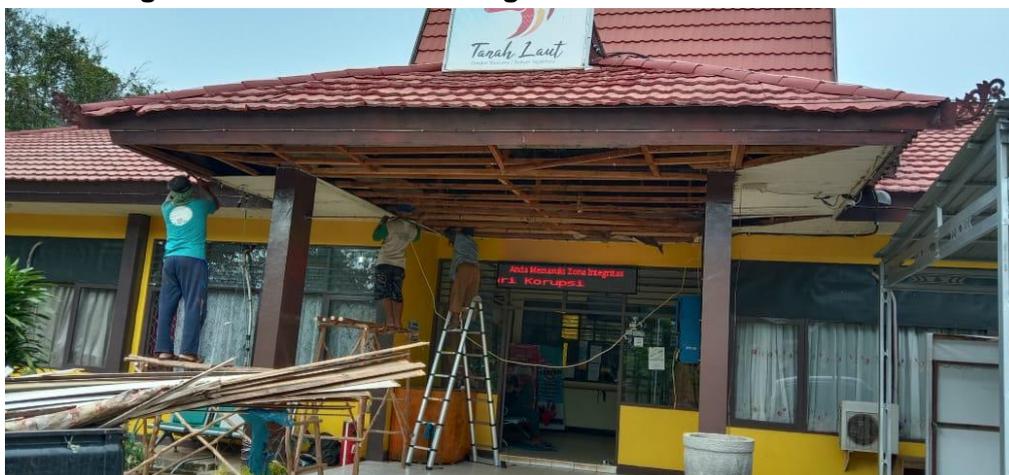


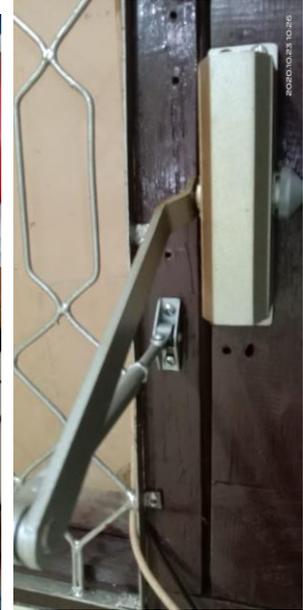
3. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

LKj BPKAD TAHUN 2020



4. Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor





METERAN LISTRIK



(kegiatan : Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor)

**5. Foto Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Pengadaan pakaian PDH Khaki**



Pengadaan Pakaian Sasirangan



8.ESELON III.A (SEKRETARIS)

LKj BPKAD TAHUN 2020

2.1.13 Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 13

Sasaran Strategis nomor 13 adalah menjadi tanggungjawab Sekretaris BPKAD Kabupaten Tanah Laut atau Pejabat Eselon III.A sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Pohon Kinerja SKPD yang telah ditandatangani.

Sasaran strategis Nomor 13 ini adalah Perjanjian Kinerja Sekretaris BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian kinerja seperti pada table sebagai berikut :

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 13
Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja SKPD

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
13	Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja SKPD	15	Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Rata-rata capaian kinerja				100.00			100.00			100.00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Meningkatkan kualitas perencanaan dan kinerja SKPD dengan indikator sasaran Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 13 Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasubbag Perencanaan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2020 dengan penjelasan dibawah ini.

8.2). ESELON IV.A1 (Kasubbag Perencanaan)

Untuk mendukung Sasaran Strategis No 13 yang menjadi tanggungjawab Sekretaris diatas dilaksanakan oleh Kasubbag Perencanaan yaitu dengan melaksanakan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam DPA Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah ditandatangani.

Untuk menggambarkan kinerja Kasubbag Perencanaan Tahun 2020 sesuai dengan Program dan Kegiatan serta Perjanjian Kinerja yaitu berupa tabel pencapaian beserta analisisnya dapat diuraikan dibawah ini.

Tabel Pencapaian Program dan Kegiatan Kasubbag Perencanaan Tahun 2020

No	Program/ Kegiatan	Output dalam DPA	Target Kinerja	Anggara n 2020 (Rp)	Realisasi				
					Fisik		Keuangan		
					Kinerja	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<i>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD</i>								
1	Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Kinerja SKPD	5 dok	3.996.200	5 dok	100%	3.936.400	98,50%	
2	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Kinerja SKPD	4 dok	4.492.000	4 dok	100%	4.395.700	97,86%	

Tabel Pencapaian Perjanjian Kinerja Kasubbag Perencanaan Tahun 2020

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1 Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan SKPD sesuai ketentuan	1. Jumlah dokumen perencanaan SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100%
2 Melaksanakan penyusunan dokumen pelaporan kinerja SKPD sesuai ketentuan	2. Jumlah dokumen pelaporan kinerja SKPD	3 dokumen	3 dokumen	100%
3 Melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan dan kinerja SKPD	3. Jumlah dokumen Laporan Monitoring & Evaluasi perencanaan kinerja SKPD	4 dokumen	6 dokumen	150%
4 Melaksanakan penyusunan SAKIP SKPD	4. Jumlah dokumen SAKIP SKPD	8 dokumen	9 dokumen	112,5%
5 Melaksanakan penyusunan dokumen SKM SKPD	5. Jumlah dokumen SKM SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%

Analisis Pencapaian Program dan kegiatan Tahun 2020 yang telah dilaksanakan Kasubbag Perencanaan:

Analisis pencapaian Program dan Kegiatan tahun 2020 Kasubbag Perencanaan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 2020 Program Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD dengan kegiatan Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD yaitu telah melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) sebanyak 2 dokumen dan penyusunan Laporan Kinerja SKPD sebanyak 3 dokumen dengan rincian yaitu : 1). Dokumen Renja Tahun 2021 BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Keputusan

Kepala BPKAD Kabupaten Tanah laut Nomor 050.13/18/BPKAD/2020 tanggal 24 Juli 2020 2). Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2020 BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan surat Keputusan Kepala BPKAD Kabupaten Tanah laut Nomor 050.13/22/BPKAD/2020 tanggal 9 September 2020 3). Dokumen Laporan Kinerja (LAKIP) Tahun 2019 4). Dokumen Laporan LKPJ Tahun 2019 5). Dokumen Laporan LPPD tahun 2019. Dengan pagu dana sebesar Rp 3.996.200,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 3.936.400,- atau capaian keuangan sebesar 98,50%%,sedangkan capaian target kinerja tercapai 100%.

2. Kegiatan Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD tahun 2020 dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan.
3. Kasubbag Perencanaan dalam menjalankan tugasnya mendapat dukungan penuh baik dari Pimpinan SKPD, atasan langsung dan seluruh Pejabat Struktural /PPTK dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut.

Analisis Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah dilaksanakan Kasubbag Perencanaan

Sedangkan analisis pencapaian Perjanjian Kinerja Kasubbag Perencanaan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1). Kinerja Utama Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan SKPD sesuai ketentuan dengan indikator kinerja Jumlah dokumen perencanaan SKPD dengan target 2 dokumen yaitu (dokumen Renja Tahun 2021 dan dokumen Renja Perubahan Tahun 2020) telah tercapai 100% Sehingga dengan demikian pernyataan sasaran strategis nomor 13 Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut juga telah terpenuhi 100%.

2) Kinerja Utama Melaksanakan penyusunan dokumen pelaporan kinerja SKPD sesuai ketentuan dengan indikator kinerja Jumlah dokumen pelaporan kinerja SKPD dengan target 3 dokumen yaitu (dokumen Laporan LAKIP tahun 2019, dokumen Laporan LKPJ dan dokumen Laporan LPPD Tahun 2019) telah tercapai 100%.

3). Kinerja Utama Melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan dan kinerja SKPD dengan indicator kinerja Jumlah dokumen Laporan Monitoring & Evaluasi perencanaan kinerja SKPD dengan target 4 dokumen, namun terealisasi sebanyak 6 dokumen yaitu (Laporan Monev Triwulan I, II, III, IV, Laporan Semester 1 dan Laporan Semester 2 Tahun 2020) sehingga telah tercapai sebesar 150%.

4). Kinerja Utama Melaksanakan penyusunan SAKIP SKPD dengan indikator kinerja Jumlah dokumen SAKIP SKPD dengan target 8 dokumen, namun terealisasi sebesar 9 dokumen yaitu (1.Renstra 2018-2023 2. Renja Tahun 2019 3. Renja Tahun 2020 4. Perjanjian Kinerja tahun 2019 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 6. LAKIP tahun 2019 7. IKU SKPD 8. Pohon Kinerja SKPD 9. Rencana Aksi Tahun 2019). Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Inspektorat maka pada tahun 2020 BPKAD kabupaten Tanah Laut telah mendapatkan Nilai SAKIP SKPD sebesar 88,43 atau kategori A dari target nilai 67, sehingga capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 131,98%

5). Kinerja Utama Melaksanakan penyusunan dokumen SKM SKPD dengan indicator kinerja Jumlah dokumen SKM SKPD dengan target 1 dokumen telah terealisasi 100% dengan terbitnya dokumen Laporan SKM Tahun 2020 dengan ditetapkannya SK Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut Nomor : 800/17/BPKAD/2020 tanggal 29 Juni 2020.

Sehingga dengan demikian pernyataan sasaran strategis nomor 13 dan pernyataan sasaran strategis nomor 15 Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut yang dilaksanakan oleh Kasubbag Perencanaan telah terpenuhi 100%.

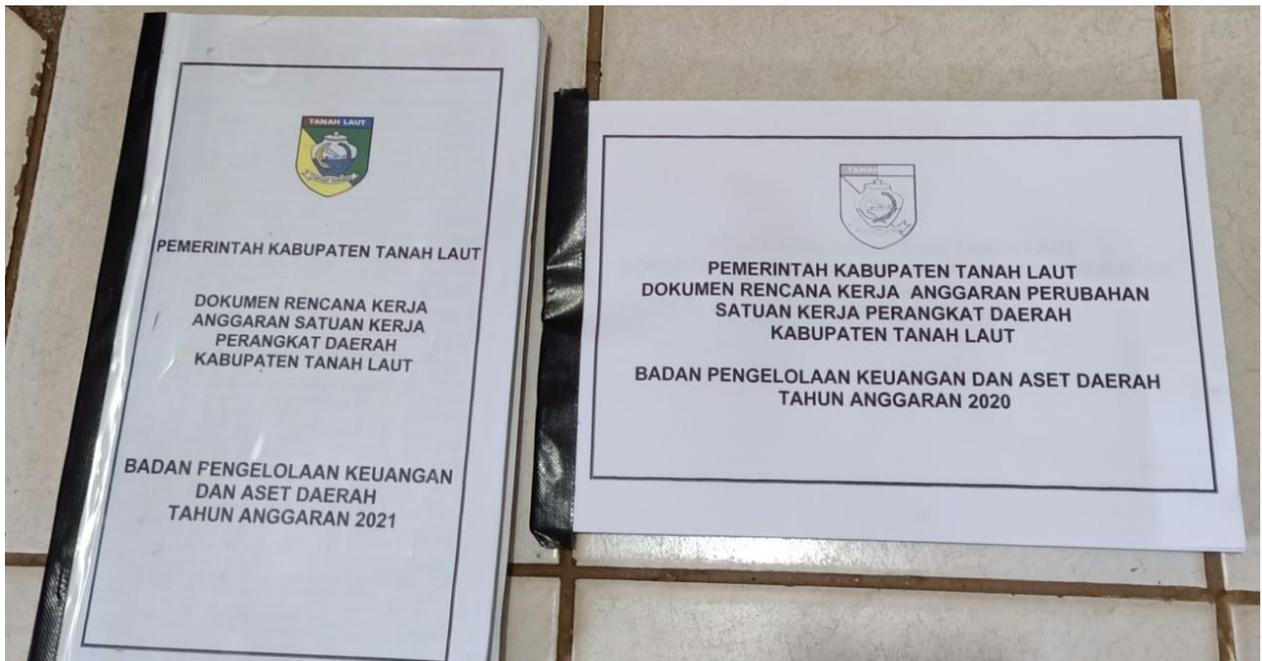
Foto-Foto Hasil kegiatan Kasubbag Perencanaan Tahun 2020

- 1. Kegiatan Penyusunan perencanaan dan Kinerja SKPD tahun 2020
sebanyak 5 dokumen**
 - a. Dua (2 dokumen) Perencanaan**

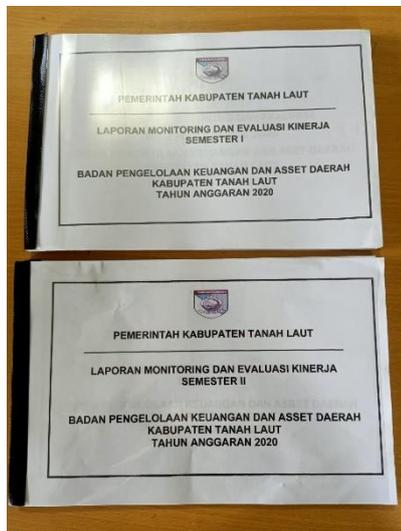
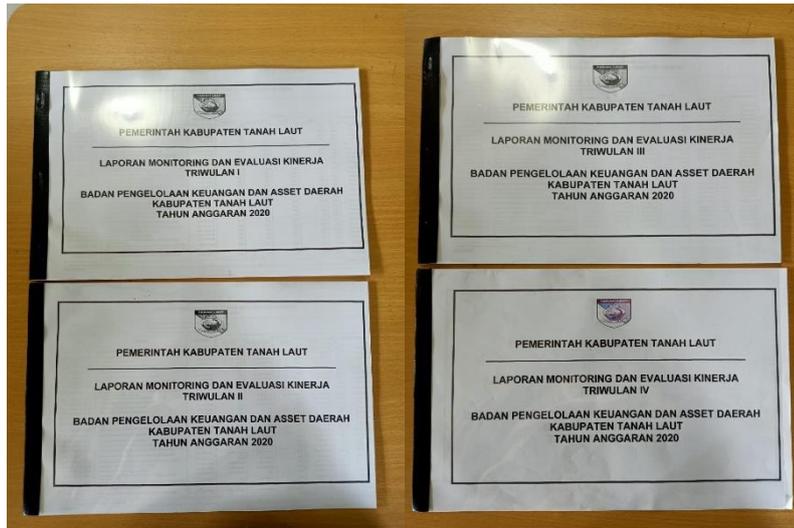


b. Tiga (3 dokumen) Laporan Kinerja SKPD

- 1. RKA Tahun 2021 2. RKA Perubahan Tahun 2020**



3. Laporan Monev Tahun 2020



2. Kegiatan Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD Tahun 2020 sebanyak 4 dokumen



8.ESELON III.A (SEKRETARIS)

2.1.14 Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 14

Sasaran Strategis nomor 14 adalah menjadi tanggungjawab Sekretaris BPKAD Kabupaten Tanah Laut atau Pejabat Eselon III.A sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Pohon Kinerja SKPD yang telah ditandatangani.

Sasaran strategis Nomor 14 ini adalah Perjanjian Kinerja Sekretaris BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian kinerja seperti pada table sebagai berikut :

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 14
Meningkatnya kualitas Laporan keuangan & Kinerja Keuangan SKPD

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
14	Meningkatnya kualitas Laporan keuangan & Kinerja Keuangan SKPD	16	Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Rata-rata capaian kinerja				100.00			100.00			100.00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Meningkatkan kualitas Laporan keuangan & Kinerja Keuangan SKPD dengan indikator sasaran Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuancapaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 14 Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasubbag Keuangan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2020 dengan penjelasan dibawah ini.

8.3). ESELON IV.A (Kasubbag Keuangan)

LKj BPKAD TAHUN 2020

Untuk mendukung Sasaran Strategis No 14 yang menjadi tanggungjawab Sekretaris diatas dilaksanakan oleh Kasubbag Keuangan yaitu dengan melaksanakan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam DPA Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah ditandatangani.

Untuk menggambarkan kinerja Kasubbag Keuangan Tahun 2020 sesuai dengan Program dan Kegiatan serta Perjanjian Kinerja yaitu berupa tabel pencapaian beserta analisisnya dapat diuraikan dibawah ini.

Tabel Pencapaian Program dan Kegiatan Tahun 2020 Kasubbag Keuangan

No	Program/Kegiatan	Output dalam DPA	Target Kinerja	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi				
					Fisik		Keuangan		
					Kinerja	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD								
1	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	4 dok	31.136.260	4 dok	100%	22.869.800	73,45%	

Tabel Pencapaian Perjanjian Kinerja Kasubbag Keuangan Tahun 2020

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan SKPD (Bulanan, Triwulanan, Semesteran, dan Laporan Keuangan Akhir Tahun)	1. Jumlah dokumen Laporan Keuangan SKPD	4 dokumen	4 dokumen	100%
2. Melaksanakan pelayanan	2. Jumlah dokumen	75 dokumen	84 dokumen	112%

administrasi keuangan SKPD	administrasi keuangan SKPD yang akuntabel			
----------------------------	---	--	--	--

Analisis Pencapaian Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan :

1. Pada tahun 2020 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD dengan kegiatan Penyusunan laporan keuangan yaitu telah melaksanakan kegiatan dalam rangka pelayanan administrasi keuangan atau dalam rangka pelayanan penatausahaan keuangan dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut yaitu pelayanan administrasi keuangan GU (BL), BTL LS, Gaji/Tunjangan, IWP, BPJS, JKK dan JKM, dengan target pada Perjanjian Kinerja sebanyak 75 dokumen dan telah terealisasi sebanyak 84 dokumen atau capaian sebesar 112%. Dengan pagu anggaran pada DPA Murni Tahun 2020 sebesar Rp 64.000.000,-, kemudian pada DPA Perubahan tahun 2020 berkurang sebesar Rp 31.136.260,- dan realisasi sebesar Rp 22.869.800,- atau capaian sebesar 73,45%%.
2. Sedangkan realisasi kinerja SKPD yaitu telah melaksanakan kegiatan dalam rangka penyusunan 4 (empat) jenis dokumen laporan keuangan (1. laporan keuangan akhir tahun, 2. laporan bulanan kinerja keuangan, 3. laporan keuangan semesteran prognosis dan 4. laporan keuangan bulanan Bendahara Pengeluaran). Sehingga secara pencapaian dokumen telah terealisasi 4 dokumen dengan capaian 100%.
3. Sehingga dengan demikian capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang menjadi tanggungjawab Kasubbag Keuangan telah melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi keuangan dengan lancar selama 12 bulan dan dapat menutup buku akhir tahun pada tanggal 23 Desember 2020 serta kegiatan dapat menyelesaikan 4 dokumen laporan keuangan tepat waktu atau dengan capaian kinerja 100%
4. Telah mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan Penghargaan Bendahara Pengeluaran Terbaik Kategori II pada

Bulan Desember 2020 berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 191 Tahun 2019 tentang Penghargaan Kepada Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus Barang Terbaik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Analisis Pencapaian Perjanjian Kinerja Kasubbag Keuangan yang telah dilaksanakan

Sedangkan analisis pencapaian Perjanjian Kinerja Kasubbag Keuangan dapat dijelaskan yaitu sebagai berikut ;

- 1). Kinerja Utama Melaksanakan penyusunan laporan keuangan SKPD (Bulanan, Triwulanan, Semesteran, dan Laporan Keuangan Akhir Tahun) dengan indicator kinerja Jumlah dokumen Laporan Keuangan SKPD dengan target 4 dokumen telah tercapai 100%
- 2). Kinerja Utama Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan SKPD dengan indicator kinerja Jumlah dokumen administrasi keuangan SKPD yang akuntabel dengan target 75 dokumen terealisasi 84 dokumen atau capaian sebesar 112%. Sehingga dengan demikian pernyataan sasaran strategis nomor 14 Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut telah terpenuhi 100%.

Foto-Foto kegiatan Kasubbag Keuangan



8.ESELON III.A (SEKRETARIS)

LKj BPKAD TAHUN 2020

2.1.15 Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 15

Sasaran Strategis nomor 15 adalah menjadi tanggungjawab Sekretaris BPKAD Kabupaten Tanah Laut atau Pejabat Eselon III.A sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Pohon Kinerja SKPD yang telah ditandatangani.

Sasaran strategis Nomor 15 ini adalah Perjanjian Kinerja Sekretaris BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian kinerja seperti pada table sebagai berikut :

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 15
Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
15	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	17	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	%	64,15	64,74	100,92	66	74,98	113,61	67	88,43	131,99
			Rata-rata capaian kinerja				100,92			113,61			131,99

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan indikator sasaran Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah capaian kinerjanya melebihi target yang telah ditetapkan. Rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2018 adalah penilaian LAKIP Tahun 2017 sebesar 100,92 dan tahun 2019 adalah penilaian LAKIP Tahun 2018 adalah sebesar 113,61, sedangkan Rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2020 adalah penilaian LAKIP Tahun 2019 sebesar 131,99 mengalami kenaikan sebesar 18,38%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 15 Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasubbag Perencanaan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2020 .

8.2). ESELON IV.A1 (Kasubbag Perencanaan)

Untuk mendukung Sasaran Strategis No 15 yang menjadi tanggungjawab Sekretaris diatas dilaksanakan oleh Kasubbag Perencanaan yaitu dengan melaksanakan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam DPA Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah ditandatangani.

Dalam rangka mendukung sasaran strategis Sekretaris BPKAD Kabupaten Tanah Laut nomor 15 ini dilaksanakan dengan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD dengan Kegiatan Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD dan Kegiatan Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja serta Perjanjian Kinerja Kasubbag Keuangan yang telah dijelaskan diatas.

Pada tahun 2020 dilaksanakan Reviu SAKIP Tahun 2019 BPKAD Kabupaten Tanah Laut terhadap 9 dokumen SAKIP BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2019 dan telah mendapatkan Nilai A (88,43) dari target nilai 67, sehingga dengan demikian capaian kinerja BPKAD Kab. Tanah Laut mengalami peningkatan kinerja.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Rencana Kinerja merupakan kegiatan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi dilingkungan Pemerintahan serta merupakan wacana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Rencana Kinerja tahunan yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang sudah ditentukan.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi yang lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Sesuai pilihan prioritas rencana kinerja tahunan BPKAD Kabupaten Tanah Laut ini merupakan alat yang bermanfaat untuk mengecek apakah Instansi dapat melaksanakan tugas yang telah dibebankan dan mengukur besar pencapaian target – target yang ditetapkan.

Rencana-rencana yang telah ditetapkan selanjutnya diaplikasikan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya dalam bentuk Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA-SKPD). Berkaitan dengan pelaksanaan anggaran tentunya haruslah dipertanggungjawabkan pelaksanaannya, sehingga akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan aspek keuangan seperti penganggaran, penatausahaan/pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. ANGGARAN DAN REALISASI APBD BPKAD 2020

Khusus untuk SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut sendiri ringkasan realisasi belanja APBD pada Tahun Anggaran 2019 dan 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Penggabungan Belanja Tidak Langsung (BTL) BPKAD Kabupaten Tanah Laut sebagai SKPD dan PPKD tahun 2019 dan tahun 2020

Belanja tidak langsung untuk SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bansos, Belanja Tidak Terduga dan Transfer. .Alokasi anggaran belanja tidak langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 adalah sebesar Rp ` 601.376.344.701,78 realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 369.353.026.750,47,- atau 61,41% .Alokasi anggaran belanja tidak langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 adalah sebesar Rp 292.095.573.655,- realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 278.916.414.107,- atau 95,49%, sehingga pada tahun 2020 terdapat penurunan realisasi belanja sebesar 34,07%. Sedangkan Belanja tidak langsung untuk SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja

Bansos, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan lainnya serta Belanja Tidak Terduga, dengan penjelasan masing-masing rincian sebagai berikut :

Belanja Tidak Langsung BPKAD sebagai SKPD tahun 2020 dan tahun 2019

Belanja tidak langsung untuk SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 yang terdiri dari Belanja Pegawai. Alokasi anggaran belanja tidak langsung adalah sebesar Rp 27.071.142.216,92,- dengan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 23.420.397.664,- atau 86,51 %. Sedangkan Belanja tidak langsung untuk SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 yang terdiri dari Belanja Pegawai. Alokasi anggaran belanja tidak langsung adalah sebesar Rp 18.918.457.671 ,- dengan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 15.913.574.847,- atau 84,11 %. Sehingga terdapat peningkatan realisasi pada tahun 2020 dari sisi belanja BTL dari tahun 2019.

Belanja Tidak Langsung BPKAD sebagai PPKD tahun 2020 dan tahun 2019

Belanja tidak Langsung BPKAD sebagai PPKD Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 terdiri dari Belanja Hibah, Belanja Bansos, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan lainnya serta Belanja Tidak Terduga. Alokasi anggaran belanja tidak langsung PPKD kabupaten Tanah Laut adalah sebesar Rp 574.305.202.484,86- dan realisasi belanja tidak langsung adalah sebesar Rp 345.932.629.086,47,- atau 60,23% dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Belanja Hibah anggaran Rp 18.657.170.000,- terealisasi sebesar Rp 16.198.386.935,- atau 86,82%.
- 2) Belanja Bantuan Sosial anggaran Rp 9.497.500.000,- terealisasi sebesar Rp 5.296.225.000,- atau 55,76%.
- 3) Belanja tidak Terduga anggaran sebesar Rp 305.353.328.384,86,- terealisasi sebesar Rp 84.356.731.883,- atau 27,63%.

- 4) Belanja Transfer anggaran sebesar Rp 240.797.204.100,- terealisasi sebesar Rp 240.081.285.268,47,- atau 99,70%.

Belanja tidak Langsung BPKAD sebagai PPKD Kabupaten Tanah Laut tahun 2019 terdiri dari Belanja Hibah, Belanja Bansos, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan lainnya serta Belanja Tidak Terduga. Alokasi anggaran belanja tidak langsung PPKD kabupaten Tanah Laut adalah sebesar Rp 273.177.115.984- dan realisasi belanja tidak langsung adalah sebesar Rp 263.002.839.260,- atau 96,28% dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Belanja Hibah anggaran Rp 18.277.500.000,- terealisasi sebesar Rp 16.150.537.750,- atau 88,36%.
- 2) Belanja Bantuan Sosial anggaran Rp 10.023.213.000,- terealisasi sebesar Rp 6.914.163.000,- atau 68,98%.
- 3) Belanja tidak Terduga anggaran sebesar Rp 4.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp 12.992.672,- atau 0,32%.
- 4) Belanja Transfer anggaran sebesar Rp.240.876.402.984,- terealisasi sebesar Rp. 239.925.145.838,- atau 99,61%

B. Khusus untuk Belanja Langsung (BL) BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 dan tahun 2019

Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Alokasi anggaran belanja langsung BPKAD Tahun 2020 adalah sebesar Rp 5.905.690.934,- dengan realisasi belanja langsung sebesar Rp 5.295.148.577,- atau 89,66%. Sedangkan Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Alokasi anggaran belanja langsung BPKAD Tahun 2019 adalah sebesar Rp 6.717.863.645,- dengan realisasi belanja langsung sebesar Rp 5.478.507.961 , -atau 81,55%. Sehingga dengan demikian terdapat peningkatan realisasi dari sisi Belanja Langsung pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019.

C. Penggabungan Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL) BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 dan tahun 2019

Sedangkan jumlah total Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL) BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 alokasi anggaran belanja total adalah sebesar Rp 32.976.833.150,92,- dengan realisasi belanja total adalah sebesar Rp 28.715.546.241,- atau 87,08 %. Sedangkan jumlah total Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL) BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2019 alokasi anggaran belanja total adalah sebesar Rp 25.636.321.316,- dengan realisasi belanja total adalah sebesar Rp 21.392.082.808,- atau 83,44 %. Sehingga dengan demikian terdapat peningkatan realisasi dari sisi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019.

Penerimaan Pembiayaan Daerah BPKAD sebagai PPKD

Penerimaan pembiayaan daerah yang dikelola BPKAD kabupaten Tanah Laut merupakan SILPA Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 922.160.938.434,34 dengan realisasi sebesar Rp 922.160.938.434,atau 100,00 %

Pengeluaran Pembiayaan Daerah BPKAD sebagai PPKD

Pengeluaran pembiayaan daerah yang dikelola BPKAD kabupaten Tanah Laut merupakan penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pemberian Pinjaman Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 10.000.000.000,00 atau 100,00 %

2. ANGGARAN DAN REALISASI MENURUT SASARAN DAN PROGRAM

Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2020 pada umumnya sudah tercapai dan sesuai dengan target pencapaian kinerja secara keseluruhan, tidak memaksakan menghabiskan

anggaran karena disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dalam suatu kegiatan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu SKPD yang melaksanakan kewenangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah tidak melaksanakan tugas tugas yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang sebagian besar telah ditetapkan dalam SPM oleh masing-masing Kementerian, namun demikian dalam aspek pengelolaan keuangan dan aset dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2020 pagu anggaran murni adalah sebesar Rp 7.317.889.669,-setelah perubahan adalah sebesar Rp 5.905.690.934,- dengan realisasi pada akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp 5.295.148.577,-.

Jumlah tingkat capaian kinerja belanja langsung SKPDBadan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Tanah Laut sampai akhir Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar 89,66 %.

Kondisi sarana dan prasarana yang ada pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut untuk saat ini cukup memadai baik dari jumlah dan SDM aparatur maupun sarana dan prasarana lainnya seperti kendaraan dinas/operasional serta peralatan dan perlengkapan kantor lainnya yang dapat menunjang kelancaran tugas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Tanah Laut.

Adapun ringkasan anggaran dan realisasi APBD Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun anggaran 2020 berdasarkan Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan yang terdiri dari 8 Program dan 25 Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL REALISASI RENCANA KERJA SESUAI SASARAN STRATEGIS TAHUN 2020
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM			PROGRAM TERKAIT DENGAN SASARAN Y/T	NO	KEGIATAN			TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	CAPAIAN (%)	KEGIATAN TERKAIT DENGAN SASARAN Y/T	ANGGARAN MURNI (RP)		ANGGARAN PERUBAHAN (RP)		REALISASI (RP.)		CAPAIA N (%)
						URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM			URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN					TERKAIT	TIDAK/TERKAIT	TERKAIT	TIDAK/TERKAIT	TERKAIT	TERKAIT	TERKAIT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.Opini BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	100%																			
2	Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah	2.Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	(83) BAIK	(93) SANGAT BAIK	112,05 %																			
3.	Meningkatnya kualitas penganggaran keuangan sesuai ketentuan	3.Persentase SKPD yang menyampaikan perencanaan penganggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%	Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	Ya	1	Penyusunan raperda dan raperbup tentang APBD dan Perubahan APBD	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Dokumen	12 DOK	11 DOK	91,06%	Ya	646,520,000.00	Terkait	385,135,300.00	Terkait	279,436,900.00	72,56	

4.	Meningkatnya kualitas pemberian pelayanan kepada stakeholder dalam Penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	4.Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	100%	100%	100%					2	Peningkatan Administrasi Penatausahaan Keuangan Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen pemberian SP2D, Peraturan Bupati, SK, Bupati, SE, Bupati, SKPP, Laporan DAU Gaji, Taperum, IWP BPJS Kesehatan dan Laporan IWP Taspen, JKK, JKM Taspen serta Terlaksananya pembinaan terhadap penatausahaan keuangan	9 DOK	9 DOK	100%	Ya	188,299,540.00	Terkait	155,214,540.00	Terkait	138,559,000.00	89,27
										3	Peningkatan Administrasi Pembiayaan Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen administrasi Dana Hibah, Bantuan Sosial, Dana Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga serta Investasi Jangka Pendek dan	1 DOK	1 DOK	100%	Ya	345,853,840.00	Terkait	199,746,720.00	Terkait	164,093,000.00	82,15

													Jangka Panjang											
5.	Meningkatnya kualitas pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan Pemkab sesuai ketentuan	5.Persentase pelaporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	Program peningkatan penerapan akuntansi dan pelaporan	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	Ya	4	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Dokumen LKPD yg akuntabel dan dapat diterima oleh Publik	8 DOK	8 DOK	100%	Ya	218,639,800.00	Terkait	137,340,300.00	Terkait	129,776,100.00	94,49	
										5	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, laporan keuangan semesteran & prognosis realisasi anggaran serta laporan keuangan akhir tahun	Seluruh SKPD yg menjadi entitas akuntansi pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun 2020	Jumlah dokumen pengelolaan akuntansi belanja dan beban	4 DOK	4 DOK	100%	Ya	24,599,720.00	Terkait	20,263,820.00	Terkait	19,357,800.00	95,53	
										6	Pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Seluruh SKPD yg menjadi entitas akuntansi pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun 2020	Jumlah Dokumen SIKD berdasarkan akuntansi berbasis Akrual	2 DOK	2 DOK	100%	Ya	238,149,700.00	Terkait	228,305,520.00	Terkait	209,956,900.00	91,96	
										7	Pengelolaan akuntansi pendapatan dan piutang	Seluruh SKPD yg menjadi Entitas Akuntansi Pendapatan dan Piutang TA 2020	Jumlah dokumen	3 DOK	3 DOK	100%	Ya	195,299,860.00	Terkait	155,164,000.00	Terkait	153,053,800.00	98,64	

										8	Pengelolaan akuntansi belanja dan beban	Seluruh SKPD yg menjadi Entitas Akuntansi Belanja dan Beban TA 2020	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Prognosis	5 DOK	5 DOK	100%	Ya	248,399,940.00	Terkait	170,357,620.00	Terkait	169,273,600.00	99,36
6.	Meningkatnya kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan	6.Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai ketentuan	89%	30%	33,70%	Program peningkatan pemanfaatan dan pengendalian Aset Daerah	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	Ya	9	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	BMD Kab. Tanah Laut	Jumlah penyelesaian penyertifikatan, Jumlah permohonan pembelian BPKB duplikat, Jumlah pembelian papan nama kepemilikan TMD, Jumlah pembelian patok tanda batas TMD, Jumlah pelaksanaan rehab rumah dinas PPKD, Jumlah pembelian kendaraan dinas bermotor PPKD, Jumlah buku rekonsiliasi realisasi pembelian haraan BMD	1 persil, 10 permohonan penyertifikatan, 3 buah kendaraan dinas bermotor PPKD	1 persil, 10 permohonan penyertifikatan, 3 buah kendaraan dinas bermotor PPKD	100%	Ya	1,204,605,000.00	Terkait	1,265,414,530.00	Terkait	1,127,729,150.00	89,12

		7.Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan	100%	0%	0%																	
		8.Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan	100%	150%	150%																	
7.	Meningkatnya kualitas penyusunan RKBMD sesuai ketentuan	9.Persentase RKBMD SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%				10	Perencanaan dan pengadaan aset daerah,	40 SKPD se Kabupaten Tanah laut	Jumlah Dokumen Buku Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021, Jumlah Dokumen Laporan Triwulan Barang Persediaan, Jumlah Dokumen Laporan Stock Opname Tahun 2019, Jumlah Dokumen Peraturan Bupati	1 Dokumen Standar satuan harga, 2 dok laporan triwulan, 1 dok stok opname	100%	Ya	177,607,000.00	Terkait	697,108,500.00	Terkait	686,181,600.00	98,43	

9.	Meningkatkan kualitas Inventaris i BMD sesuai ketentuan	11.Persentase BMD yang dicatat dengan akurat	100%	100%	100%	Program Peningkatan Penertiban Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	Ya	12	Penyusunan tabulasi data aset tetap	Pengelola Barang Pemerintah Kab. Tanah Laut	Terlaksananya Penyusunan Tabulasi Data Aset Tetap, Penghapusan BMD, Penjualan BMD, dan Pelaksanaan Monev BMD	21 Dokumen Laporan Aset dan 25 Dokumen Laporan Penilaian (84 Buku Laporan Aset dan 75 Buku Laporan Penilaian)	21 Dokumen Laporan Aset dan 25 Dokumen Laporan Penilaian (84 Buku Laporan Aset dan 75 Buku Laporan Penilaian)	100%	Ya	465,300,000.00	Terkait	278,949,000.00	Terkait	273,414,400.00	98,02
10.	Meningkatkan kualitas Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	12.Persentase Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	100%	2700%	2700%					13	Pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan aset daerah	Pengelola Barang Pemerintah Kab. Tanah Laut	Terlaksananya Pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan aset daerah	4 DOK	4 DOK	100%	Ya	132,310,000.00	Terkait	59,096,000.00	Terkait	46,739,900.00	79,09
11	Meningkatkan kualitas pemenuhan sarpras perkantoran	13.Persentase kinerja sarpras yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik	100%	100%	100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Baik	Ya	14	Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah jenis rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi	3 Jenis (Makanan & Minuman Rapat, Makanan & Minuman Tamu, Perjalanan Dinas)	3 Jenis (Makanan & Minuman Rapat, Makanan & Minuman Tamu, Perjalanan Dinas)	100%	Ya	1,094,278,369.00	Terkait	703,119,206.00	Terkait	612,922,924.00	87,17
12	Meningkatkan pemberian pelayanan administrasi kepegawaian SKPD	14.Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yg terpenuhi dan terpelihara dgn baik	100%	100%	100%					15	Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Jenis Jasa, Bahan, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	10 Jenis (ATK, Alat Listrik dan Elektronik, Kebersihan dan Bahan Pembersih, Telepon, Listrik, Surat Kabar, Intenet, Paket/Pengiriman, Cetak, Penggandaan)	10 Jenis (ATK, Alat Listrik dan Elektronik, Kebersihan dan Bahan Pembersih, Telepon, Listrik, Surat Kabar, Intenet, Paket/Pengiriman, Cetak, Penggandaan)	100%	Ya	740,170,000.00	Terkait	321,180,668.00	Terkait	265,996,447.00	82,82

									16	Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Pegawai Tidak Tetap	19 PTT 12 Bulan)	19 PTT 12 Bulan)	100%	Ya	439,356,000.00	Terkait	439,356,000.00	Terkait	437,424,006.00	99,56
					Program Pemanfaatan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Nilai IKM	Baik	Ya	17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Jenis Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	9 Jenis (Spanduk/Dekorasi/Baliho, Kelengkapan Komputer, Peralatan & Perlengkapan Jaringan Komputer, Alat Penyimpanan, Alat Perengkapan Kantor, Alat Pendingin, Alat Dapur, Personal Komputer, Kursi Kerja Pejabat)	9 Jenis (Spanduk/Dekorasi/Baliho, Kelengkapan Komputer, Peralatan & Perlengkapan Jaringan Komputer, Alat Penyimpanan, Perengkapan Kantor, Alat Pendingin, Alat Dapur, Personal Komputer, Kursi Kerja Pejabat)	100%	Ya	200,000,000.00	Terkait	285,785,750.00	Terkait	274,328,500.00	95,99
									18	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Jenis Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	6 Jenis (BBM/Gas, Jasa Service, Penggantian Suku Cadang, BBM/Gas dan Pelumas, STNK, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin)	6 Jenis (BBM/Gas, Jasa Service, Penggantian Suku Cadang, BBM/Gas dan Pelumas, STNK, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin)	100%	Ya	200,000,000.00	Terkait	108,860,000.00	Terkait	75,585,950.00	69,43
									19	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Unit Rehabilitasi Seding/Berat Gedung Kantor	1 Unit (Gedung Kantor BPKAD)	1 Unit (Gedung Kantor BPKAD)	100%	Ya	92,930,000.00	Terkait	52,500,000.00	Terkait	37,596,700.00	71,61

									20	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Teknis	0	0	0%	Ya	25,000,000.00	Terkait	0.00	Terkait	0.00	0.00	
									21	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Stel Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	50 Stel	50 Stel	100%	Ya	56,250,000.00	Terkait	56,250,000.00	Terkait	56,100,000.00	99,73	
						Penyebarnya	Nilai IKM	Baik	Ya	22	Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan dan Pelayanan SKPD	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Event Pameran	2 Event	0	0%	Ya	24,994,700.00	Terkait	20,000,000.00	Terkait	0.00	0.00
13	Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja SKPD	15.Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan	100%	100%	100%	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	Baik	Ya	23	Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Kinerja SKPD	5 DOK	5 DOK	100%	Ya	3,996,200.00	Terkait	3,996,200.00	Terkait	3,936,400.00	98,50
14	Meningkatnya kualitas Laporan keuangan & Kinerja Keuangan SKPD	16.Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%					23	Penyusunan laporan keuangan	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	4 DOK	4 DOK	100%	Ya	64,000,000.00	Terkait	31,136,260.00	Terkait	22,869,800.00	73,45
15	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	17.Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	67 (BAIK)	88,43 (SANGAT BAIK)	131,99 %					25	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Dokumen evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD	4 DOK	4 DOK	100%	Ya	4,492,000.00	Terkait	4,492,000.00	Terkait	4,395,700.00	97,86
Jumlah total Anggaran																		7,317,889,669.00		5,905,690,934.00		5,295,148,577.00	89.66

Adapun ringkasan anggaran dan realisasi APBD Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun anggaran 2020 berdasarkan Program dan Kegiatan yang terdiri dari 8 Program dan 25 Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

RINGKASAN ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2020

Program	Kegiatan	Alokasi Dana (RP)	Realisasi Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja (%)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	703.119,206	612.922,924	87,17
	2. Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	321.180.668	265.996.447	82,82
	3. Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	439.356.000	437.424.006,00	99,56
Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	285.785.750	274.328.500	95,99
	2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	108.860.000	75.585.950	69,43
	3. Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	52.500.000	37.596.700	71,61
	4. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	0	0	0
	5. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	56.250.000	56.100.000	99,73
Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD	1. Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	20.000.000,00	0,00	0
Program Perencanaan, Pengendalian dan	1. Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	3.996.200,00	3.936.400,00	98,50

Evaluasi Kinerja SKPD	2. Penyusunan laporan keuangan	31.136.260,00	22.869.800,00	73,45
	3. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	4.492.000,00	4.395.700,00	97,86
Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Perubahan APBD.	385.135.300,00	279.436.900,00	72,56
	2. Peningkatan Administrasi Penatausahaan Keuangan Daerah.	155.214.540,00	138.559.000,00	89,27
	3. Peningkatan Administari Pembiayaan Daerah.	199.746.720,00	164.093.000,00	82,15
Program peningkatan penerapan akuntansi dan pelaporan	1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	137.340.300,00	129.776.100,00	94,49
	2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	228.305.520,00	209.956.900,00	91,96
	H. Penyusunan Lap. Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Lap. Keuangan Semesteran & Prognosis realisasi Anggaran, serta lapkeu akhir tahun	20.263.820,00	19.357.800,00	95,53
	I. Pengelolaan akuntansi pendapatan dan piutang.	155.164.000,00	153.053.800,00	98,64
	5. Pengelolaan			

	akuntansi belanja dan beban.	170.357.620,00	169.273.600,00	99,36
Program peningkatan pemanfaatan dan pengendalian Aset Daerah	1. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	1.265.414.530	1.127.729.150	89,12
	2. Perencanaan dan pengadaan asset daerah	697.108.500	686.181.600	98,43
	3. Pengelolaan pemanfaatan asset daerah	126.919.000	106.420.000	83,85
Program Peningkatan Penertiban Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah	1. Penyusunan tabulasi data aset tetap.	278.949.000	273.414.400	98,02
	2. Pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan asset daerah	59.096.000	46.739.900	79,09

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BPKAD Kabupaten Tanah Laut memiliki jumlah pagu anggaran murni adalah sebesar Rp 7.317.889.669,-setelah perubahan adalah sebesar Rp 5.905.690.934,-, dengan realisasi pada akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp 5.295.148.577,-. Jumlah tingkat capaian kinerja belanja langsung SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sampai akhir Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar 89,66 %, sehingga BPKAD melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 610.542.357,- atau sebesar 10,34% dengan capaian kinerja fisik sebesar 100%.

Adapun ringkasan anggaran dan realisasi menurut sasaran dan program Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

3. PERBANDINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019 DAN 2020

Untuk menggambarkan pencapaian realisasi belanja Program dan Kegiatan BPKAD Kabupaten Tanah Laut serta membandingkannya selama 2 (dua) tahun yaitu tahun 2019 dan tahun 2020 dan untuk mengetahui pengukuran terhadap pencapaian peningkatan atau penurunan dari tahun sebelumnya.

Tabel perbandingan realisasi capaian sasaran strategis Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan Tahun 2020

Berikut ini disajikan realisasi pencapaian sasaran strategis BPKAD Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dibandingkan realisasi pencapaian sasaran tahun 2020 dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Selain perbandingan realisasi pencapaian sasaran seperti yang telah dibahas sebelumnya dapat dilihat baik peningkatan maupun penurunan dalam realisasi pencapaian sasaran BPKAD Kabupaten Tanah Laut. Gambaran tentang target dan realisasi pencapaian sasaran strategis dan realisasi pendanaan BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini :

TABEL PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018 , 2019 DAN 2020
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN %	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN %	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN %
1	Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan secara tertib, akuntabel dan transparan.	1. Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%
		2. Meningkatkan kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah	2. Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Nilai Indeks	82	87	106,10%	82	90	109,76%	83	93	112,05%
		3. Meningkatkan kualitas penganggaran keuangan sesuai ketentuan	3. Persentase SKPD yang menyampaikan perencanaan penganggaran sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
		4. Meningkatkan kualitas pemberian pelayanan kepada stakeholder dalam Penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	4. Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
		5. Meningkatkan kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemkab sesuai ketentuan	5. Persentase pelaporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
2	Meningkatkan kinerja pengelolaan dan Penatausahaan aset Daerah secara tertib.	6. Meningkatkan kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan	6. Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai ketentuan	%	100	100	100%	87	100	114,95%	89	30	33,70%
			7. Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	0	0%
			8. Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	150	150%
		7. Meningkatkan kualitas penyusunan RKBMD sesuai ketentuan	9. Persentase RKBMD SKPD sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
	8. Meningkatkan kualitas pemanfaatan BMD sesuai ketentuan	10. Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	
	9. Meningkatkan kualitas Inventarisasi BMD sesuai ketentuan	11. Persentase BMD yang dicatat dengan akurat	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	
	10. Meningkatkan kualitas Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	12. Persentase Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	108,80	108,80%	100	2700	2700%	
3	Terwujudnya tata kelola Administrasi yang tertib, efektif dan efisien	11. Meningkatkan kualitas pemenuhan sarpras perkantoran	13. Persentase kinerja sarpras yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
		12. Meningkatkan pemberian pelayanan administrasi kepegawaian SKPD	14. Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yg terpenuhi dan terpelihara dgn baik	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
		13. Meningkatkan kualitas perencanaan dan kinerja SKPD	15. Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
		14. Meningkatkan kualitas Laporan keuangan & Kinerja Keuangan SKPD	16. Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
		15. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	17. Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai	64,15	64,74	100,92%	66	74,98	113,61%	67	88,43	131,99%

**TABEL PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TAHUN 2020
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	SARGIS	IK SARGIS	IKU/ BUKAN IKU	TARG ET KINER JA 2019 IKU/ BUKA N IKU	TARGET KINERJA 2020 IKU/ BUKAN IKU	REALI SA SI TAH UN 201 9	REALI SA SI TAH UN 202 0	NO	PROGRAM			NO	KEGIATAN			TARG ET KINER JA OUTP UT 2019	TARG ET KINER JA OUTP UT 2020	REA LISA SI OUT PUT TAH UN 201 9	REAL ISASI FISIK % THN 2019	REALI SASI OUTP UT TAH UN 2020	REALI SASI FISIK % THN 2020	ANGGAR AN TAHUN 2019(RP.)	REALISASI KEUANGAN TAHUN 2019	REALISA SI KEU % TAHUN 2019	ANGGARAN TAHUN 2020 (RP.)	REALISA SI KEUANG AN TAHUN 2020	REALI SA SI KEU % TAH UN 202 0
									URAI AN PROGR AM	SASARA N PROGR AM	INDI KAT OR SASA RAN PRO GRA M		URAI AN KEGIAT AN	SASARA N KEGIAT AN	INDIK ATOR SASA RAN KEGIA TAN (OUTP UT)												
1	2	3	4	6	6	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	18	21	22	21	22	26	27	28	26	27	28
1.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.Opini BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah	1.Opini BPK RI atas laporan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP																				
2	Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah	2.Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan pengelola keuangan dan aset daerah	2.Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan pengelola keuangan dan aset daerah	82	83	90	93																				

3.	Meningkatnya kualitas pengan ggaran keuangan sesuai ketentuan		3. Persentase SKPD yang menyampaikan perencanaan anggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	1.	Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	1	Penyusunan raperda dan raperbup tentang APBD dan Perubahan APBD	Pemerintah Kabupaten Tanah	Terlaksananya penyusunan dokumen APBD dan Perubahan APBD	12 Dokumen	12 Dokumen	10 Dokumen	81,91%	11 Dokumen	91,06%	#####	282,571,560.00	54.56	385,135,300.00	279,436,900.00	72,56
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada stakeholder dalam Penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan		4. Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%					2	Peningkatan Administrasi Penatausahaan Keuangan Daerah	Pengelola administrasi penatausahaan keuangan daerah	Terlaksananya proses tindak lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan, Terasilitasi penerbitan SP2D, Tersusunnya perbup, SK. Dan SE. Bupati, Lap. TPG, TP, DAU Gaji, BPJS, Taperum Terlaksananya pembi naan terha	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	9 Dokumen	100%	#####	152,507,750.00	80.79	155,214,540.00	138,559,000.00	89,27

5.	Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemkab sesuai ketentuan	Ya	5. Persentase pelaporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	2	Program peningkatan penerapan akuntansi dan pelaporan	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	4	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Perda & Perbup ttg Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dgn SAP	Terlaksananya penyusunan pertanggungjawaban Lap. Keuangan Pemda Kab. Tala yg accountable & dpt diterima oleh publik	11 Dokumen	8 Dokumen	11 Dokumen	100%	8 Dokumen	100%	#####	189,703,900.00	87.90	137,340,300.00	129,776,100.00	94,49
												5	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, Laporan keuangan semesteran & Prognosis realisasi anggaran, serta laporan keuangan akhir tahun	40 SKPD yg menjadi Entitas akuntansi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Bulan, Triwulan, Semesteran dan Prognosis	1 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	100%	4 Dokumen	100%	#####	17,942,700.00	95.08	20,263,820.00	19,357,800.00	95,53

												7	Pengelolaan akuntansi pendapatan dan piutang	Pemerintah Kabupaten Tanah	Terlaksanaan Pengelolaan Akuntansi Pendapatan dan Piutang	2 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	100%	3 dokumen	100%	#####	177,643,085.00	91.72	155,164,000.00	153,053,800.00	98,64
												8	Pengelolaan akuntansi belanja dan beban	Pemerintah Kabupaten Tanah	Terlaksanaan Pengelolaan Akuntansi Belanja dan Beban	1 dokumen	5 dokumen	1 dokumen	100%	5 dokumen	100%	#####	207,022,400.00	95.51	170,357,620.00	169,273,600.00	99,36
6.	Meningkatnya kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan	Ya	6.Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai ketentuan	87%	89%	100%	30%	3	Program peningkatan pemanfaatan dan pengendalian Aset Daerah	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	9	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	BMD Kab. Tanah Laut	Terlaksanaan pengaman thd BMD, Terlaksanaan monitoring pemanfaatan & pemeliharaan BMD, Terlaksanaan penelusuran tanah milik Daerah yang belum tercatat di	100 pemohon sertifikat, 3 bk dok. Penelitan, 40 bh, panma, 3 bk rekpr pempl. 3 dok. (laporan)	1 persil, 10 permohonan penyertifikatan, 3 buah kendaraan dinas bermotor PPKD	100 pemohon sertifikat, 3 bk dok. Penelitan, 40 bh, panma, 3 bk rekpr pempl. 3 dok. (laporan)	100%	1 persil, 10 permohonan penyertifikatan, 3 buah kendaraan dinas bermotor PPKD	100%	#####	542,614,689.00	82.03	1,265,414,530.00	1,127,729,150.00	89,12

7.	Meningkatnya kualitas penyusunan RKBMD sesuai ketentuan	Ya	9.Persentase RKBMD SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%				10	Perencanaan dan Pengadaan aset daerah	40 SKPD se Kabupaten Tanah laut	Terlaksananya Penyusunan Buku SSH Brg/Jasa keperluan Pemerintah Kab. Tala	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	100%	##### #	125,623,418.00	97.02	697,108,500.00	686,181,600.00	98,43	
8.	Meningkatnya kualitas pemanfaatan BMD sesuai ketentuan	Ya	10.Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%				11	Pengelolaan pemanfaatan aset daerah	SKPD se Kabupaten Tanah Laut	Terlaksananya rekonsiliasi pemanfaatan & pengunaan BMD, dan terlaksananya monitoring pemanfaatan & pengunaan BMD	3 dokumen	5 dokumen	3 dokumen	100%	5 dokumen	100%	##### #	115,524,200.00	77.83	126,919,000.00	106,420,000.00	83,85	
9.	Meningkatnya kualitas Inventarisasi BMD sesuai ketentuan		11.Persentase BMD yang dicatat dengan akurat	100%	100%	100%	100%	4	Program Peningkatan Penertiban Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	12	Penyusunan tabulasi data aset tetap	Pengelola Barang Pemerintah Kab. Tanah Laut	Terlaksananya Penyusunan Tabulasi Data Aset Tetap, Penghapusan BMD, Penjualan BMD,	34 dokumen	21 dokumen	34 dokumen	100%	21 dokumen	100%	##### #	433,187,400.00	88.98	278,949,000.00	273,414,400.00	98,02

											20	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Teknis	11 ASN	0	8 ASN	75%	0	0%	55,000,000.00	21,850,000.00	39.73	0.00	0.00	0.00	
											21	Pengadaan Pakai an Dinas Beserta Perlengkapannya	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Stel Pakai an Dinas beserta Perlengkapannya	0	50 stell	0	0%	50 stell	100%	-	-		56,250,000.00	56,100,000.00	99.73	
							7	Penyeb arluasan Informasi Pemba ngunan dan Pelayanan SKPD	Nilai IKM	Baik	22	Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Event Pameran	2 event	2 event	2 event	100%	0	0%	24,983,000.00	24,983,000.00	100.00	20,000,000.00	0.00	0.00	
13	Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja SKPD	Ya	15.Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	8	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	Baik	23	Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Kinerja SKPD	4 dokumen	5 dokumen	4 dokumen	100%	5 dokumen	100%	7,453,800.00	7,453,800.00	100.00	3,996,200.00	3,936,400.00	98.50
14	Meningkatnya kualitas Laporan keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD	Ya	16.Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%					24	Penyusunan laporan keuangan	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	100%	5,200,000.00	2,825,000.00	54.33	31,136,260.00	22,869,800.00	73.45

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dari tahun 2018 dan tahun 2019, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuan BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang telah ditetapkan pada masa Renstra SKPD Tahun 2018-2023, yaitu telah dicapai target akuntabel / dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, yaitu terbukti dengan telah diraihnya opini WTP dari auditor BPK RI selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut, hal ini dikarenakan adanya dukungan dan komitmen dari atasan langsung dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut untuk bersama-sama dalam meningkatkan kinerja pelayanan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Tanah Laut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 yang merupakan tahun kedua Renstra 2018-2023, sehingga dengan demikian tujuan BPKAD yaitu

1. Meningkatkan kinerja Pengelolaan keuangan secara tertib, akuntabel & transparan.
2. Meningkatkan kinerja pengelolaan dan penatausahaan aset daerah secara tertib.
3. Terwujudnya tata kelola administrasi yg tertib, efektif dan efisien, sudah tercapai dengan diraihinya predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) selama 7 Tahun berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Laporan Kinerja (LKj) ini memuat perencanaan dan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditentukan serta telah dilaksanakan secara akuntabel, tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab.

Dapat disimpulkan bahwa dari 15 indikator kinerja sasaran strategis yang ditargetkan hampir semuanya dapat dilaksanakan dan tercapai target kinerjanya, pada tahun 2020 dibandingkan pada tahun 2018 dan 2019 antara lain sebagai berikut:

- 1). Sasaran Strategis Nomor 1 Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan indikator sasaran nomor 1 Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan. Rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2020 sebesar

100%, dan pada Tahun 2018 dan 2019 juga mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 100%. Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018 untuk yang keenam kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak 8 temuan dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 5 temuan, bukti surat Nomor : 12.B/LHP/XIX.BJM/05/2019 tanggal 20 Mei 2018 dan Nomor : 12.C/LHP/XIX.BJM/05/2019 tanggal 20 Mei 2019, sehingga dengan demikian tercapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

- Sedangkan pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapat Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019 untuk yang ketujuh kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak 10 temuan dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 6 temuan, bukti surat Nomor : 7.B/LHP/XIX.BJM/06/2020 tanggal 12 Juni 2020 dan bukti surat Nomor : 7.C/LHP/XIX.BJM/06/2020 tanggal 12 Juni 2020, sehingga dengan demikian tercapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%. bahwa Opini WTP yang didapatkan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 terdapat peningkatan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Tujuan BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang tercantum dalam Renstra BPKAD Tahun 2018-2023, bahwa cita-cita BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam Renstra BPKAD Tahun 2018-2023 dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel, tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab pada tahun 2020 telah berhasil dilaksanakan 100%.

2). Sasaran Strategis Nomor 2 Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan untuk mendukung Indikator Kinerja Utama BPKAD maka sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 selama 7 (tujuh) tahun dilaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan SKPD

khususnya terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan pengelolaan asset daerah terhadap 4 bidang pelayanan yaitu pelayanan penerbitan SP2D, pelayanan Bansos, hibah dan bantuan keuangan lainnya, pelayanan pengelolaan asset daerah dan pelayanan pada bidang Akuntansi. Jumlah responden sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang dari Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui survei kepada masyarakat yang menjadi konsumen dari 4 bidang pelayanan tersebut, dengan jumlah responden adalah 150 (seratus lima puluh) orang. Kegiatan pengumpulan data telah dilaksanakan dalam periode minggu terakhir bulan April sampai dengan minggu keempat bulan Juni. Dari hasil survey tersebut didapat nilai indeks dengan hasil 87 dari target 82 pada tahun 2018 atau capaian 106,10%, kemudian pada tahun 2019 didapat nilai indeks dengan hasil 90 dari target 82 atau capaian sebesar 109,76%, sedangkan pada tahun 2020 didapat nilai indeks dengan hasil 93 dari target 83 atau capaian sebesar 112,05%, sehingga dengan demikian terdapat peningkatan trend kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan pencapaian nilai hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut berada dalam mutu pelayanan SANGAT BAIK, sehingga dengan demikian realisasi telah melampaui target yang ditetapkan. atau terdapat peningkatan sebesar 3,66 % dari tahun 2019. Dengan demikian bahwa dengan adanya hasil survey kepuasan masyarakat yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut berada dalam mutu pelayanan sangat baik. Dokumen Laporan SKM Tahun 2020 dengan ditetapkannya SK Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut Nomor : 800/17/BPKAD/2020 tanggal 29 Juni 2020.

Untuk mendukung sasaran nomor 2 dan IKU BPKAD ini dilaksanakan dan menjadi Perjanjian Kinerja, Program dan kegiatan serta tanggungjawab Bagian Sekretariat.

- 3). Sasaran Strategis Nomor 3 Meningkatnya kualitas penganggaran keuangan sesuai ketentuan dengan indikator sasaran Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan 100%. Penyampaian penetapan APBD dan APBD Perubahan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa batas waktu penyampaian penetapan APBD dan APBD Perubahan yaitu paling lambat pada tanggal 31 Desember.

Pada tahun 2018 penetapan APBD Tahun 2018 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2018 Nomor 6 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017, dan untuk penetapan APBD Perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2018 Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 24 Oktober 2018 sehingga dengan demikian penetapan APBD dan APBD Perubahan tepat waktu 100%.

Sedangkan pada tahun 2019 penetapan APBD Tahun 2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2019 Nomor 9 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018, dan untuk penetapan APBD Perubahan tahun 2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2019 Nomor 10 Tahun 2019 tanggal 27 Agustus 2019 sehingga dengan demikian penetapan APBD dan APBD Perubahan tepat waktu 100%.

Pada tahun 2020 penetapan APBD Tahun 2020 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2020 Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019, dan untuk penetapan APBD Perubahan tahun 2020 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2020 Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 9 Oktober 2020 sehingga dengan demikian penetapan APBD dan APBD Perubahan tepat waktu 100%.

Sasaran nomor 3 ini adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan dan indikator sasaran nomor 3 ini dilaksanakan oleh Kasubbid Anggaran sesuai Perjanjian Kinerja serta Program Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan daerah dan Kegiatan Penyusunan raperda dan raperbup tentang APBD dan Perubahan APBD tahun 2019.

- 4). Sasaran Strategis Nomor 4 Meningkatnya kualitas pemberian pelayanan kepada stakeholder dalam Penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan dengan indikator sasaran Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan yang merupakan perjanjian kinerja Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100 %. Untuk mendukung sasaran strategis Kepala Bidang Pembiayaan nomor 4 ini Indikator sasaran dilaksanakan oleh Kasubbid Perbendaharaan dan Verifikasi dan Kasubbid Pembiayaan dengan pencapaian Perjanjian Kinerja tahun 2020 dan pencapaian Program dan Kegiatan sesuai DPA Tahun 2020. Penyerapan anggaran belanja daerah tahun anggaran 2018 pagu anggaran sebesar Rp 1.588.171.203.597,00,- dengan realisasi sebesar Rp 1.350.553.289.307,60 ,- atau capaian sebesar 85,04%. Penyerapan anggaran belanja daerah tahun anggaran 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.746.968.360.693,50,- dengan realisasi belanja sebesar Rp 1.515.185.842.727,95,- atau 86,74%. Anggaran belanja daerah (BTL dan BL) Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp 2.041.948.857.213,36 dengan realisasi sebesar Rp 1.508.835.025.639,47 atau 73,89%. terdapat penurunan kinerja realisasi belanja sebesar 12,85% hal ini disebabkan adanya kebijakan refocusing keuangan daerah dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid 19, namun secara kinerja rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini setiap tahunnya mencapai target yang telah ditetapkan.
- 5). Sasaran Strategis Nomor 5 Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemkab sesuai ketentuan dengan indikator sasaran Persentase pelaporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan adalah perjanjian kinerja Kepala Bidang Akunatnsi capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100 %. Untuk mendukung sasaran strategis Kepala

Bidang Akuntansi nomor 5 Indikator sasaran ini dilaksanakan oleh 3 (tiga) Kasubbid yaitu Kasubbid Pengelolaan Kas, Kasubbid Akuntansi Belanja dan Beban dan Kasubbid Akuntansi Pendapatan dan Piutang dengan pencapaian Perjanjian Kinerja tahun 2020 dan pencapaian Program dan Kegiatan sesuai DPA Tahun 2020.

Pada tahun 2014 Laporan Keuangan SKPD berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual), sehingga capaian kinerja hanya mencapai 50%, karena Laporan Keuangan SKPD belum sepenuhnya berbasis akrual.

Mulai tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos Ekuitas Dana pada Neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual) dan pada tahun 2015 direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai akuntansi berbasis akrual. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2015 dibuat berdasarkan Laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, adapun yang membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2015 ini adalah sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yaitu BPKAD Kabupaten Tanah Laut. Demikian juga pada tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 serta tahun 2020 Laporan Keuangan SKPD berbasis akrual telah disampaikan oleh seluruh SKPD dan telah di Audit oleh BPK – RI dan telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berbasis akrual. Dengan demikian bahwa pelaporan keuangan SKPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berbasis AkruaI dapat dijamin terpenuhi 100%.

- 6). Sasaran Strategis Nomor 6 Meningkatkan kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan dengan indikator sasaran Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai ketentuan, Persentase BMD (Kendaraan bermotor)

yang memiliki BPKB sesuai ketentuan dan Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan pada tahun 2019 ini capaian kinerjanya melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 104,99% dari tahun 2018 terdapat peningkatan kinerja sebesar 4,99%. Namun pada tahun 2020 ini capaian kinerja mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya kendala pandemi Covid 19, sehingga untuk indikator sasaran strategis no 6 yaitu presentase BMD (Tanah) yang memiliki sertifikat sesuai ketentuan hanya tercapai 30% dari target sebesar 89%, atau capaian sebesar 33,70 hal ini dikarenakan Pihak BPN juga terkendala adanya pandemi covid 19 pada tahun 2020 ini, kemudian indikator sasaran strategis no 7 yaitu Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan tidak tercapai atau 0% dikarenakan pelaksanaan pengajuan permohonan duplikasi BPKB BMD (Kendaraan Bermotor) dari target 4 buah, realisasi 0 buah (tidak dapat realisasi). Pengajuan permohonan duplikasi BPKB kendaraan dinas bermotor tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya Refocusing Anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19. sehingga kedua sasaran Kepala Bidang PPA tersebut tidak tercapai targetnya atau mengalami penurunan kinerja. Namun pada indikator sasaran strategis no 8 milik Kepala Bidang PPA mengalami kenaikan capaian pada tahun 2020 yaitu sebesar 150%, hal ini dikarenakan dari target BMD sebesar 10 telah tercapai sebesar 15 yang dipelihara, sehingga dari tahun sebelumnya mengalami peningkatan kinerja sebesar 50%. Sehingga secara keseluruhan untuk sasaran strategis no 6 Kepala Bidang PPA pada tahun 2020 capaian kinerjanya mengalami penurunan kinerja sebesar 61,23%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 6 Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset ini dilaksanakan oleh Kasubbid Pengamanan dan Pemeliharaan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2020

Terlaksananya pengamanan hukum tanah milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berupa pengajuan permohonan penyertifikatan BMD (Tanah) Milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dari target sebesar 60 permohonan

penyertifikatan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2020 namun dikarenakan adanya Refocusing Anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19 target dikurangi menjadi 30 permohonan penyertifikatan, realisasi sebanyak 10 permohonan penyertifikatan yang sudah dimasukkan ke Kantor Pertanahan Kab. Tanah Laut. Permohonan penyertifikatan tersebut meliputi tanah yang berlokasi di :

- a). Kecamatan Takisung sebanyak 2 lokasi yaitu tanah peruntukkan SMPN 4 Takisung dan SDN Pagatan Besar 1 (Filial)
- b). Kecamatan Kintap sebanyak 2 lokasi yaitu tanah peruntukkan SMPN 3 Kintap dan SDN Muara Kintap 3
- c). Kecamatan Bati-Bati sebanyak 3 lokasi yaitu tanah peruntukkan SMPN 6 Bati-Bati, SDN Pandahan 1 dan SDN Bentok Darat 3
- d). Kecamatan Jorong sebanyak 2 lokasi yaitu tanah peruntukkan Jalan Lingkungan Ponpes Babussalam (Asrama Perempuan) dan Jalan Lingkungan Ponpes Babussalam (Asrama Laki-laki)
- e). Kecamatan Tambang Ulang sebanyak 1 lokasi yaitu tanah peruntukkan SMPN 2 Tambang Ulang

Dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 pihak Kantor Pertanahan Kab. Tanah Laut menutup semua pendaftaran pembuatan penyertifikatan tanah termasuk tidak dapat menerima 20 permohonan penyertifikatan tanah dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, namun Kantor Pertanahan Kab. Tanah Laut menyelesaikan penyelesaian penyertifikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dari Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 yang berjumlah 278 permohonan. Pada tanggal 19 Juni 2020 Kantor Pertanahan Kab. Tanah Laut telah menyelesaikan penyertifikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebanyak 117 persil tanah dan telah menerbitkan 103 sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Pada tanggal 17 Nopember 2020 Kantor Pertanahan Kab. Tanah Laut kembali menyelesaikan penyertifikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebanyak 161 persil tanah dan telah menerbitkan 148 sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Pelaksanaan pengajuan permohonan duplikasi BPKB BMD (Kendaraan Bermotor) dari target 4 buah, realisasi 0 buah (tidak dapat realisasi). Pengajuan permohonan duplikasi BPKB kendaraan dinas bermotor tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya Refocusing Anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19.

Terlaksananya rekonsiliasi pengamanan dan pemeliharaan BMD yang dilakukan terhadap 41 SKPD dan dilaksanakan sebanyak 5 kali di Tahun Anggaran 2020.

Terlaksananya Pengamanan Tanah Milik Daerah berupa penelusuran tanah milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang tercatat dineraca aset namun belum jelas lokasinya, dari target 30 lokasi tanah yang belum dijelas lokasinya 7 lokasi tanah sudah ditemukan lokasinya. Tidak tercapainya target dalam penelusuran tanah milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang tercatat dineraca aset namun belum jelas lokasinya dikarenakan pihak ketiga yang tidak dapat membantu karena kondisi Pandemi Covid-19.

Terlaksananya pemeliharaan BMD-PPKD dari target 10 buah BMD, realisasi pemeliharaan BMD-PPKD berupa bangunan gedung rumah dinas milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebanyak 10 unit rumah dinas dan pemeliharaan BMD-PPKD berupa kendaraan dinas sebanyak 5 unit kendaraan dinas.

Pelaksanaan Penguasaan Fisik BMD-PPKD / Pengamanan Fisik atas Tanah Milik Daerah berupa Pengadaan Papan Nama Kepemilikan dan Patok Tanda Batas Tanah dari target 30 buah BMD realisasi 0 buah BMD (tidak dapat realisasi). Pelaksanaan Penguasaan Fisik BMD-PPKD / Pengamanan Fisik atas BMD berupa Pengadaan Papan Nama Kepemilikan dan Patok Tanda Batas Tanah tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya Pengurangan Anggaran / Refocusing Anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19.

Terlaksananya monitoring pengamanan BMD yang tersebar di 11 kecamatan dari target 50 kali realisasi sebanyak 61 kali.

Pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 telah dilaksanakan pengadaan kendaraan dinas bermotor roda 4 sebanyak 2 buah yaitu 1 buah Jenis Double Cabin dan 1 buah jenis minibus.

- 7). Sasaran Strategis Nomor 7 Meningkatnya kualitas penyusunan RKBMD sesuai ketentuan dengan indikator sasaran Persentase RKBMD SKPD sesuai ketentuan adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 7 Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset ini dilaksanakan oleh Kasubbid Perencanaan Kebutuhan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2020.

Tersusunnya 1 Dokumen Standar Satuan Harga yang berisi Satuan Harga Perubahan 2020 dan Standar Satuan Harga untuk Tahun 2021 dengan diterbitkannya SK Bupati Tanah Laut Nomor : 188.45/483-KUM/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut.

Tersusunnya 2 Dokumen RKBMD yaitu 1. RKBMD Tahun 2021 2. RKBMD Perubahan Tahun 2020

Tersusunnya 4 Dokumen Laporan Triwulan Barang Persediaan yaitu Laporan Triwulan Barang Persediaan Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV.

Tersusunnya 1 Dokumen Laporan Stok Opname se Kabupaten Tanah Laut .

Tersusunnya 2 Perbup tentang pengelolaan BMD yaitu 1). Perbup No 9 Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020 tentang Pemanfaatan BMD 2). Perbup No 10 Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020 tentang Rumah Negara

Dalam rangka efisiensi pemeliharaan kendaraan roda 4 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut ,telah dilaksanakan sewa unit kendaraan roda 4 sebanyak 32 Unit yang diperuntukkan bagi Pejabat Eselon II dan Eselon III pada 6 SKPD yaitu Bappeda, Bapenda, BPKAD, Inspektorat, Setda dan Dinas PUPRP. Melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga sesuai

Kontrak Nomor :2100091936-01 dan Nomor :2100091937-01 serta Nomor:027/37/SPK/BPKAD/2020 tanggal 2 November 2020.

Terlaksananya penyusunan RKBMD Target 40 SKPD dan Tercapai 40 SKPD atau dengan capaian kinerja 100%. Penyusunan RKBMD terdiri dari RKBMD Perubahan Tahun Anggaran 2020 dan RKBMD Tahun Anggaran 2021. RKBMD SKPD yang disampaikan SKPD sebagai dasar dalam penyusunan RKBMD Kabupaten Tanah Laut, dokumen RKBMD SKPD tersebut yang digunakan sebagai syarat pada waktu verifikasi RKA SKPD.

Tercapainya penyusunan 1 Dokumen Standar Satuan Harga yang berisi Satuan Harga Perubahan 2020 dan Standar Satuan Harga untuk Tahun 2021 dengan diterbitkannya SK Bupati Tanah Laut Nomor : 188.45/483-KUM/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut. Dokumen SSH dipergunakan pada Aplikasi SIPD sebagai dasar SKPD pada waktu melakukan entry RKA Tahun 2021 se Kabupaten Tanah Laut.

Tercapainya penyusunan 1 Dokumen Buku Standar Kebutuhan Barang yang seharusnya disusun oleh masing-masing SKPD untuk dijadikan 1 Dokumen, namun yang terjadi dilapangan SKPD tidak melaksanakan karena kendala SDM, sehingga BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang menyusun / membuat Dokumen tersebut, hal ini dikarenakan Dokumen ini SANGAT PENTING dan akan diminta oleh Auditor pada waktu pemeriksaan.

Rekonsiliasi / verifikasi Barang Pakai Habis yang dilaksanakan dengan mengundang Pengurus Barang se-Kabupaten Tanah Laut berjumlah 40 SKPD sebanyak 4 kali (per-triwulan) yaitu Triwulan IV TA.2019, Triwulan I TA.2020, Triwulan II TA.2020, dan Triwulan III TA.2020. Realisasi Hasil Rekonsiliasi / verifikasi Barang Pakai Habis terhadap 40 SKPD tercapai 100%.

Tercapainya penyusunan 1 Dokumen Beban Persediaan se Kabupaten Tanah Laut, dokumen ini dibuat sebagai dasar untuk Rekonsiliasi dengan Bidang Akuntansi pada akhir tahun dalam rangka penyusunan LKPD Kabupaten Tanah Laut.

Terlaksananya Sosialisasi Penyusunan RKBMD, Penyusunan Beban Persediaan dan Standar Satuan Harga kepada 40 SKPD sebagai Pengguna Barang SKPD.

Telah dilaksanakan monitoring Barang Pakai Habis SKPD terhadap 40 SKPD Pengguna Barang SKPD.

8). Sasaran Strategis Nomor 8 Meningkatnya kualitas pemanfaatan BMD sesuai ketentuan dengan indikator sasaran Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 8 Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset ini dilaksanakan oleh Kasubbid Pemanfaatan dan Penggunaan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2020.

A. Terlaksananya Rekonsiliasi pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah sebanyak 5 (lima) kali. dengan rincian kegiatan sebagai berikut.

- 1). Pelaksanaan rekonsiliasi per tanggal 7 s/d 31 Desember 2019 terhadap 41 (empat puluh satu) SKPD.
- 2). Pelaksanaan rekonsiliasi triwulan I per tanggal 01 Januari s/d 31 Maret 2020 terhadap 41 (empat puluh satu) SKPD
- 3). Pelaksanaan rekonsiliasi triwulan II per tanggal 01 April s/d 30 Juni 2020 terhadap 41 (empat puluh satu) SKPD.
- 4). Pelaksanaan rekonsiliasi triwulan III per tanggal 01 Juli s/d 30 September 2019 terhadap 41 (empat puluh satu) SKPD yaitu :
- 5). Pelaksanaan rekonsiliasi triwulan IV per tanggal 01 Oktober s/d 04 Desember 2020 terhadap 41 (empat puluh satu) SKPD.

B. Monitoring Pemanfaatan dan Penggunaan Barang Milik Daerah.

Hasil Kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1). Terbentuknya Tim Monitoring Pelaksanaan Pemanfaatan dan Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/84-KUM/2020 tanggal 2 Januari 2020, dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah selama 12 bulan.
- 2).Terlaksananya monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah di 11 (sebelas) Kecamatan.

C. Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2020.

Untuk tahun anggaran 2020 terdapat barang milik daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain, diantaranya adalah :

A. Pinjam Pakai

- 1). 1 (satu) unit kendaraan dinas roda 4 (empat) yaitu DA. 954 L oleh Komando Distrik Militer 1009/Pelaihari.
- 2). 1 (satu) unit bangunan rumah dinas oleh Komando Distrik Militer 1009/Pelaihari.
- 3). Tanah seluas 1 ha oleh Komando Distrik Militer 1009/Pelaihari
- 4). 1 (satu) unit kendaraan dinas roda 4 (empat) yaitu DA. 139 LB oleh Kejaksaan Negeri Tanah Laut.
- 5). 1 (satu) unit kendaraan dinas roda 4 (empat) yaitu DA. 942 L oleh Kepolisian Resort Tanah Laut.
- 6). 1 (satu) unit kendaraan dinas roda 4 (empat) yaitu DA. 4 LA oleh Komando Distrik Militer 1009/Pelaihari.
- 7). 1 (satu) unit kendaraan dinas roda 4 (empat) yaitu DA. 947 oleh Batalyon Infanteri 623/Bhakti Wira Utama Kompi Senapan C.

B. Sewa

- 1). 1 (satu) unit Bangunan Gedung Pabrik Semi Permanen oleh PT. Gede Langgeng Makmur Banjarmasin.

- 2). 1 (satu) unit rumah dinas oleh Khairandi.
- 3). 1 (satu) unit rumah dinas oleh Agus Muslim.
- 4). Tanah seluas $\pm 28.845 \text{ m}^2$ oleh petani an. Supian.
- 5). Tanah seluas $\pm 95.353 \text{ m}^2$ oleh petani an. Bahrian.
- 6). Tanah seluas $\pm 111.157 \text{ m}^2$ oleh Kelompok Tani Kartika.
- 7). 1 (satu) unit rumah dinas oleh Rahmadianor.
- 8). 1 (satu) unit rumah dinas oleh Rahmad Hidayat.
- 9). 1 (satu) unit rumah dinas oleh Rahman Aziddin.
- 10). Tanah seluas $\pm 53.071 \text{ m}^2$ oleh Suryanti.
- 11). Tanah seluas $\pm 1.050 \text{ m}^2$ oleh petani an. Selamat Riyadi.
- 12). 1 (satu) unit Bangunan Gudang Tertutup Permanen oleh PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Banjarmasin.
- 13). 1 (satu) unit rumah dinas oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut.
- 14). Sebagian aula milik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kab. Tanah Laut oleh Koperasi Pegawai Negeri Tuntung Pandang Kab. Tanah Laut.

D. Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah.

Sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan dan informasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kab. Tanah Laut mengenai pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan terkait pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah di Kab. Tanah Laut , sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah dilaksanakan dengan cara penyebaran informasi melalui pembuatan buku sosialisasi sebanyak

48 buah buku yang disebarkan ke 41 Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kab. Tanah Laut.

- 9). Sasaran Strategis Nomor 9 Meningkatnya kualitas Inventarisasi BMD sesuai ketentuan dengan indikator sasaran Persentase BMD yang dicatat dengan akurat sesuai ketentuan adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Penatausahaan Aset capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 9 Kepala Bidang Penatausahaan Aset ini dilaksanakan oleh Kasubbid Inventarisasi dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2020.

Terlaksananya Updating Data BMD pada KIB SKPD sesuai dengan ketentuan dengan Target Kinerja fisik 100 %, dalam bentuk 21 (dua puluh satu) dokumen Laporan Aset yang terdiri dari 12 Buku Laporan KIB A, KIB B, KIB C, KIB D, KIB E, dan KIB F (Unaudit dan Audited) per 31 Desember 2019, 2 Buku Rekap Mutasi Barang Milik Daerah (Unaudit dan Audited) per 31 Desember 2019, 2 Buku Induk Inventaris Kabupaten Intrakombitabel dan Ekstrakombitabel per 31 Desember 2019, 2 Buku Laporan Barang Milik Daerah Semester I dan Semester II per 31 Desember 2020, 1 Buku Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Aset Daerah Tahun 2020, 2 Buku Laporan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Semester I dan II Tahun Anggaran 2020.

Terlaksananya Rekonsiliasi/Verifikasi Belanja Modal 40 SKPD per triwulan (4 kegiatan rekon) sesuai ketentuan dengan Target Kinerja Fisik 100 %, Belanja Modal SKPD yang telah telah disampaikan /dilaporkan sesuai hasil rekon.

Pelaksanaan Kegiatan Penilaian BMD SKPD guna Pencatatan Neraca Aset Daerah sesuai ketentuan tidak terlaksana, hal ini disebabkan karena adanya Refocusing Anggaran untuk Percepatan Penanganan wabah Covid 19.

Terlaksananya Monitoring Belanja Modal ke 40 SKPD yang ada di Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan ketentuan , dengan Target Kinerja fisik 100 %.

Terlaksananya 1 kegiatan FGD / Pembinaan SKPD dalam rangka Penerapan Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan, yang diikuti oleh 40 SKPD se Kabupaten Tanah Laut, dengan Target Kinerja 100 %.

- 10). Sasaran Strategis Nomor 10 Meningkatnya kualitas Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan dengan indikator sasaran Persentase Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Penatausahaan Aset capaian kinerjanya melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 2700%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 10 Kepala Bidang Penatausahaan Aset ini dilaksanakan oleh Kasubbid Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2020.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa Penghapusan dapat disebabkan karena :

- 1). Penyerahan barang milik daerah;
- 2). Pengalihan Status Penggunaan barang milik daerah;
- 3). Pemindahtanganan atas barang milik daerah;
- 4). Putusan Pengadilan yang berkuatan hukum tetap;
- 5). Menjalankan ketentuan perundang-undangan;
- 6). Pemusnahan dan;
- 7). Sebab Lain.

Tahun Anggaran 2020 telah dilakukan kegiatan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan sesuai dengan ketentuan, dengan hasil 4 Dokumen dengan penjelasan sebagai berikut :

Dokumen hibah keluar sebanyak 15 (lima belas) berkas dengan rincian sebagai berikut;

- 1). Bakeuda Prop Kalsel/Peralatan samsat keliling
- 2). Ponpes ubudiyah bati-bati/bongkaran bangunan pasar lama
- 3).Yayasan nurul adzulam/bongkaran bangunan kantor kecamatan takisung
- 4). Desa Tambang Ulang/Tanah
- 5). Desa sungai Pinang/Sumur Bor
- 6). SLBN 2 Pelaihari Prop Kalsel/Tanah
- 7). Langgar Al ihsan/bongkaran menara air
- 8). Yayasan Sria Bersaudara/Tanah & bangunan
- 9). Majelis Asmaul husna/Bongkaran Rumdin setda
- 10). Masjid Darul Mahabbah/Bongkaran pustu liangganggang
- 11). Ponpes Annajah Cindai alus putra/Bongkaran puskesmas angsau
- 12). Desa raden/Tanah
- 13). Langgar Miftahul Jannah/bongkaran SD Tungkaran
- 14). BPK Miftahul jannah/Kendaraan R3
- 15). Masjid Raudatul Aflah/Bongkaran SMPN 6 Pelaihari

Dokumen Hibah masuk sebanyak 16 (enam belas) berkas dengan rincian sebagai berikut:

- 1). Dari Kementerian PUPR/Jaringan air minum
- 2). Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Peralatan mesin & software
- 3). Dari Masyarakat desa Sungai Rasau (Ahmadi)/Tanah
- 4). Dari Masyarakat desa Asam Jaya (Askarik)/Tanah
- 5). Dari PT.CPKA/Tanah
- 6). Dari Masyarakat desa Bentok kampung (Mulkawi)/Tanah
- 7). Dari PT.Arutmin Indonesia/Tanah
- 8). Dari Dinas LH Propinsi Kalsel/Dump Truck
- 9). Dari Masyarakat desa Padang Luas (Mislah rezeki)/Tanah
- 10). Dari Masyarakat desa Tabanio (Muhammad)/Tanah

- 11). Dari Kementerian Perhubungan/Speed boad
- 12). Dari Kementerian Pertanian/ Peralatan mesin & software
- 13). Dari Masyarakat desa handil birayang bawah (Mawardi)/Tanah
- 14). Dari Masyarakat desa bawah layung (Bambang Sriawan)/Tanah
- 15). Dari Masyarakat desa Bungkok (Umi masitoh dll)/Tanah
- 16). Dari KPU /Thermogun

Dokumen pemusnahan sebanyak 21 (dua puluh satu) kegiatan pada 11 SKPD sebagai berikut;

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1). Kecamatan Takisung | 7). Kecamatan Batu Ampar |
| 2). Diskopdag | 8). DPRKPLH |
| 3). Dinas Pariwisata 2x | 9). Dinas Pendidikan 5x |
| 4). Sekretariat DPRD | 10). Setda 5x |
| 5). Distanhorbun | 11). Disnakerind |
| 6). Dinkes 2x | |

Dokumen penghapusan barang milik daerah Kab. Tanah Laut dengan menerbitkan sebanyak 30 (tiga puluh) Surat Keputusan dengan rincian sebagai berikut :

- Sebanyak 2 (dua) Surat Keputusan Bupati Tanah Laut selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD tentang Penghapusan BMD Kab. Tanah Laut dari Daftar Barang Pengelola Barang dan ;
- 28 (dua puluh delapan) Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Tanah Laut selaku Pengelola Barang tentang Penghapusan BMD Kab. Tanah Laut dari Daftar Barang Pengguna Barang.

Dari 28 (dua puluh delapan) Surat Keputusan penghapusan BMD, karena disebabkan :

- | | |
|--|----------|
| 1). Karena Pemindahtanganan (Hibah keluar) | : 10 SK. |
| 2). Karena Pemusnahan | : 16 SK. |
| 3). Karena Sebab Lain | : 2 SK. |

Realisasi perjanjian kinerja Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan aset daerah secara umum mengalami kenaikan dari target

awal karena adanya usulan SKPD yang tidak bisa di prediksi dengan rincian sebagai berikut;

- 1). Pada lelang BMD SKPD tidak dilaksanakan yang semula sudah dijadwalkan oleh KPKNL untuk penilaian objek lelang pada bulan Maret 2020 berdasar surat nomor S-271/WKN.12/KNL.03/2020 tanggal 28 Februari 2020 tetapi karena adanya pandemi covid 19 jadwal penilaian di tunda sampai waktu yang tidak di tentukan dan adanya kebijakan refocusing anggaran yang belum terealisasi sehingga anggaran lelang BMD di refocusing.
- 2). Pemindahtanganan BMD mengalami kenaikan 2.600% dari target awal di karenakan adanya hibah masuk dan hibah hasil bongkaran bangunan yang tidak bisa di prediksi.
- 3). Pada Pemusnahan BMD ada kenaikan 320 % dari target awal dikarenakan adanya usul pemusnahan SKPD yang telah dilaksanakan pembongkaran bangunannya pada anggaran perubahan, sehingga harus segera di buatkan Berita Acara Pemusnahannya.
- 4). Pada Penghapusan BMD mengalami kenaikan 150% dari target awal dikarenakan adanya kenaikan Pemusnahan BMD pada beberapa SKPD pada anggaran perubahan.
- 5). Pada sosialisasi Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD mengalami kenaikan 200% dikarenakan adanya beberapa SKPD meminta tambahan waktu sosialisasi.
- 6). Pada dokumen laporan hasil Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD tercapai 100%
- 7). Pada SKPD yang termonitoring dalam rangka Pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD mengalami kenaikan 200% dikarenakan adanya beberapa SKPD yang memerlukan monitoring
- 8). Pada SKPD yang mengikuti FGD Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD tercapai 100%..

- 11). Sasaran Strategis Nomor 11 Meningkatnya kualitas pemenuhan sarpras perkantoran dengan indikator sasaran Persentase kinerja sarpras yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik adalah Perjanjian Kinerja Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 11 Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2020. Sehingga secara pencapaian kinerja telah terealisasi 100% dan telah mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan Penghargaan Pengurus Barang Terbaik pada tanggal 2 Desember 2020.
- 12). Sasaran Strategis Nomor 12 Meningkatnya pemberian pelayanan administrasi kepegawaian SKPD dengan indikator sasaran Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yg terpenuhi dan terpelihara dgn baik adalah Perjanjian Kinerja Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 12 Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2020.
- 13). Sasaran Strategis Nomor 13 Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja SKPD dengan indikator sasaran Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan adalah Perjanjian Kinerja Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 13 Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasubbag Perencanaan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2020.

Pada tahun 2020 Program Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD dengan kegiatan Penyusunan perencanaan dan

kinerja SKPD yaitu telah melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) sebanyak 2 dokumen dan penyusunan Laporan Kinerja SKPD sebanyak 3 dokumen dengan rincian yaitu : 1). Dokumen Renja Tahun 2021 BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Keputusan Kepala BPKAD Kabupaten Tanah laut Nomor 050.13/18/BPKAD/2020 tanggal 24 Juli 2020 2). Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2020 BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan surat Keputusan Kepala BPKAD Kabupaten Tanah laut Nomor 050.13/22/BPKAD/2020 tanggal 9 September 2020 3). Dokumen Laporan Kinerja (LAKIP) Tahun 2019 4). Dokumen Laporan LKPJ Tahun 2019 5). Dokumen Laporan LPPD tahun 2019. Dengan pagu dana sebesar Rp 3.996.200,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 3.936.400,- atau capaian keuangan sebesar 98,50%%, sedangkan capaian target kinerja tercapai 100%.

Kegiatan Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD tahun 2020 dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan SKPD sesuai ketentuan dengan indikator kinerja Jumlah dokumen perencanaan SKPD dengan target 2 dokumen yaitu (dokumen Renja Tahun 2021 dan dokumen Renja Perubahan Tahun 2020) telah tercapai 100% Sehingga dengan demikian pernyataan sasaran strategis nomor 13 Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut juga telah terpenuhi 100%.

Melaksanakan penyusunan dokumen pelaporan kinerja SKPD sesuai ketentuan dengan indikator kinerja Jumlah dokumen pelaporan kinerja SKPD dengan target 3 dokumen yaitu (dokumen Laporan LAKIP tahun 2019, dokumen Laporan LKPJ dan dokumen Laporan LPPD Tahun 2019) telah tercapai 100%.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan dan kinerja SKPD dengan indicator kinerja Jumlah dokumen Laporan Monitoring & Evaluasi perencanaan kinerja SKPD dengan target 4 dokumen, namun terealisasi sebanyak 6 dokumen yaitu (Laporan Monev Triwulan I, II, III, IV, Laporan

Semester 1 dan Laporan Semester 2 Tahun 2020) sehingga telah tercapai sebesar 150%.

- 14). Sasaran Strategis Nomor 14 Meningkatnya kualitas Laporan keuangan & Kinerja Keuangan SKPD dengan indikator sasaran Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuan adalah Perjanjian Kinerja Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 14 Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasubbag Keuangan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2020.

Pada tahun 2020 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD dengan kegiatan Penyusunan laporan keuangan yaitu telah melaksanakan kegiatan dalam rangka pelayanan administrasi keuangan atau dalam rangka pelayanan penatausahaan keuangan dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut yaitu pelayanan administrasi keuangan GU (BL), BTL LS, Gaji/Tunjangan, IWP, BPJS, JKK dan JKM, dengan target pada Perjanjian Kinerja sebanyak 75 dokumen dan telah terealisasi sebanyak 84 dokumen atau capaian sebesar 112%. Dengan pagu anggaran pada DPA Murni Tahun 2020 sebesar Rp 64.000.000,-, kemudian pada DPA Perubahan tahun 2020 berkurang sebesar Rp 32.863.740,-, sehingga Pagu DPA Perubahan tahun 2020 adalah sebesar Rp 31.136.260,- dan realisasi sebesar Rp 22.869.800,- atau capaian sebesar 73,45%.

Sedangkan realisasi kinerja SKPD yaitu telah melaksanakan kegiatan dalam rangka penyusunan 4 (empat) jenis dokumen laporan keuangan (1. laporan keuangan akhir tahun, 2. laporan bulanan kinerja keuangan, 3. laporan keuangan semesteran prognosis dan 4. laporan keuangan bulanan Bendahara Pengeluaran). Sehingga secara pencapaian dokumen telah terealisasi 4 dokumen dengan capaian 100%.

Sehingga dengan demikian capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang menjadi tanggungjawab Kasubbag Keuangan telah

melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi keuangan dengan lancar selama 12 bulan dan dapat menutup buku akhir tahun pada tanggal 23 Desember 2020 serta kegiatan dapat menyelesaikan 4 dokumen laporan keuangan tepat waktu atau dengan capaian kinerja 100% ,dan telah mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan Penghargaan Bendahara Pengeluaran Terbaik Kategori II Bulan Desember 2020 berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 191 Tahun 2019 tentang Penghargaan Kepada Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus Barang Terbaik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

15). Sasaran Strategis Nomor 15 Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan indikator sasaran Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah Perjanjian Kinerja Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut capaian kinerjanya melebihi target yang telah ditetapkan. Rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2018 adalah penilaian LAKIP Tahun 2017 sebesar 100,92 dan tahun 2019 adalah penilaian LAKIP Tahun 2018 adalah sebesar 113,61, sedangkan Rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2020 adalah penilaian LAKIP Tahun 2019 sebesar 131,99 mengalami kenaikan sebesar 18,38%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 15 Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasubbag Perencanaan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2020 .

Telah dilaksanakan Reviu SAKIP SKPD dengan indikator kinerja Jumlah dokumen SAKIP SKPD dengan target 8 dokumen, namun terealisasi sebesar 9 dokumen yaitu : 1). Renstra 2018-2023) 2). Renja Tahun 2019 3). Renja Tahun 2020 4). Perjanjian Kinerja tahun 2019 5). Perjanjian Kinerja Tahun 2020 6). LAKIP tahun 2019 7). IKU SKPD 8). Pohon Kinerja SKPD 9). Rencana Aksi Tahun 2019. Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Inspektorat maka pada tahun 2020 BPKAD kabupaten Tanah Laut telah

mendapatkan Nilai SAKIP SKPD sebesar 88,43 atau kategori A dari target nilai 67, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 131,98%

Telah dilaksanakan penyusunan dokumen SKM SKPD dengan indikator kinerja Jumlah dokumen SKM SKPD dengan target 1 dokumen telah terealisasi 100% dengan terbitnya dokumen Laporan SKM Tahun 2020 dengan ditetapkannya SK Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut Nomor : 800/17/BPKAD/2020 tanggal 29 Juni 2020.

Sehingga dengan demikian pernyataan sasaran strategis nomor 13 dan pernyataan sasaran strategis nomor 15 Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut yang dilaksanakan oleh Kasubbag Perencanaan telah terpenuhi 100%.

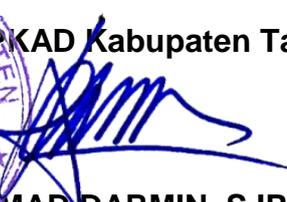
- 16).Setiap triwulan dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja dengan dibuatkan Berita Acara sebagai bukti telah dilakukan pengawasan internal dari Atasan Langsung kepada Pejabat Struktural dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut terhadap kinerja Kegiatan kegiatan di Bidangnya masing-masing sebagai bahan acuan pedoman untuk perbaikan kinerja yang akan datang.
- 17) Telah dilaksanakannya pemilihan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus Barang Terbaik se Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 191 Tahun 2019 tentang Penghargaan Kepada Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus Barang Terbaik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Berhasilnya pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tentunya sangat ditunjang oleh kualitas sumber daya aparatur, sumber dana serta dukungan dan partisipasi dari pihak-pihak terkait. Selain itu, masih terdapatnya kelemahan-kelemahan seperti terbatasnya tenaga profesional serta pelaksanaan tugas pada BPKAD sangat tergantung dari input SKPD lainnya sehingga diperlukan kerjasama yang baik dan harmonis dengan SKPD dalam mengelola keuangan dan aset daerah.

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi persoalan tersebut diantaranya dengan berupaya secara bertahap terus meningkatkan kualitas kinerja dan disiplin SDM aparatur pada BPKAD serta peningkatan sarana dan prasarana yang dapat mendukung operasional pelaksanaan tugas. Serta upaya untuk terus melakukan evaluasi terhadap kinerja baik pada waktu tahun berjalan maupun setelah akhir tahun sebagai pedoman dalam melakukan langkah-langkah perbaikan, salah satunya dengan memberikan reward dan penghargaan kepada Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Pengurus Barang terbaik setiap tahunnya.. Selain itu diperlukan peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait serta kerjasama dengan institusi lain.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut ini dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan dan pencapaian kinerja SKPD khususnya bagi BPKAD Kabupaten Tanah Laut.

Pelaihari, Januari 2021
Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut,

MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si
NIP. 19661227 198703 1 002

